

# Populasi

Volume 25 Nomor 1

Juni 2017

---

## Artikel

MARITAL STATUS, CAREER AND INCOME AS INDICATORS OF LIFE SATISFACTION AMONG MIDDLE-AGED CAREER WOMEN IN HULULANGAT, SELANGOR, MALAYSIA 1

*Siti Marziah Zakaria, Nor Ba'ayah Ab. Kadir, and Khairul Hisyam Baharuddin*

BAGAIMANA ORGANISASI MSM DAN TRANSGENDER BERTAHAN? STUDI TENTANG ORGANISASI MSM DAN TRANSGENDER DI INDONESIA DAN TIMOR LESTE 16

*Anna Marie Wattie dan Sri Purwatiningsih*

SMART FERT: APLIKASI PRAKTIS, VALID, DAN MUDAH UNTUK MENGUKUR INDIKATOR FERTILITAS DI ERA OTONOMI DAERAH 33

*Lutfi Agus Salim, Hari Kusnanto, Lutfan Lazuardi, dan Kuntoro*

ANALISIS KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PEKERJA WANITA SEKTOR INFORMAL PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI KOTA PALEMBANG 52

*Armansyah dan Kiki Aryaningrum*

DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS PERSATUAN NEGARA 64

*Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi*

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 82

*Muhamad Saleh, Muhadjir Darwin, Agus Heruanto Hadna, dan Dewi Haryani Susilastuti*

## Resensi Buku

NEGARA GAGAL: BAGAIMANA DENGAN INDONESIA? 92

*Muhadjir Darwin*

## KATA PENGANTAR

Kepuasan hidup merupakan sebuah konstruksi subjektif yang bervariasi menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, pendapatan, status perkawinan, dan faktor demografi lainnya. Artikel dari negara jiran Malaysia yang ditulis oleh Siti Marziah Zakaria, Nor Ba'ayah Ab. Kadir, dan Khairul Hisyam Baharuddin meneliti perbedaan kepuasan hidup wanita paruh baya dilihat dari tingkat pendidikan, status perkawinan, karier, dan tingkat pendapatan. Wanita lajang dan janda yang bekerja di sektor swasta dan mempunyai tingkat pendapatan rendah dilaporkan memiliki kepuasan hidup terendah. Temuan dalam kajian ini dapat memberi masukan bagi perencanaan program peningkatan kesejahteraan dan kepuasan hidup di kalangan wanita usia paruh baya.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang strategi agar organisasi yang bergerak dalam isu Men who have sex with men (MSM) dan Transgender (TG) dapat bertahan. Artikel ini ditulis oleh Anna Marie Wattiedan Sri Purwatiningsih. Mereka menyatakan bahwa variasi strategi yang dikembangkan oleh organisasi yang menangani MSM dan TG, baik di Indonesia maupun di Timor Leste, untuk dapat bertahan disesuaikan dengan kapasitas organisasi yang bersangkutan. Penilaian kapasitas organisasi dilihat berdasarkan indikator governance (tata kelola), efektivitas organisasi, keberlanjutan, dan atribut. Oleh karena itu, kondisi sosial, ekonomi, dan politik di setiap negara dapat mencerminkan tingkat efektivitas governance dan sustainabilitas.

Sementara itu, indikator fertilitas, seperti Crude Birth Rate (CBR), Total Fertility Rate (TFR), General Fertility Rate (GFR), dan Gross Reproductive Rate (GRR), untuk mengukur kinerja pengendalian penduduk setiap tahun di level kabupaten/kota sejak otonomi daerah sering tidak tersedia. Lutfi Agus Salim, Hari Kusnanto, Lutfan Lazuardi, dan Kuntoro menyatakan bahwa aplikasi sistem informasi fertilitas Smart Fert merupakan pengukur indikator fertilitas yang praktis, valid, dan mudah diaplikasikan. Aplikasi ini sangat layak untuk dikembangkan. Mereka juga menemukan bahwa hasil perhitungan fertilitas aplikasi Smart Fert tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan hasil metode langsung Sensus Penduduk 2010. Dengan demikian, aplikasi Smart Fert merupakan alat penghitung indikator fertilitas yang praktis, valid, dan mudah diimplementasikan untuk mengukur kinerja pengendalian penduduk di tingkat kabupaten/kota.

Di sisi yang lain, Armansyah dan Kiki Aryaningrum tertarik untuk mengulas tentang karakteristik demografi pekerja wanita sektor informal pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Kota Palembang. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa pekerja wanita sektor informal berada pada kelompok usia produktif dan pendidikan setara SMA ke bawah. Mayoritas para pekerja wanita itu memiliki keterampilan, tetapi tidak digunakan sebagai modal usaha karena keterbatasan dana. Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengikuti pelatihan, bekerja sebagai pedagang, dan mayoritas tidak memiliki pengetahuan tentang MEA.

Lebih lanjut, Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi membahas tentang dinamika perkembangan etnis di Indonesia dalam konteks persatuan negara. Mereka menggunakan data Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010 untuk mengungkapkan dinamika etnis di Indonesia dalam perspektif historis. Suku di Indonesia tersebar secara heterogen dengan keanekaragaman yang tinggi. Salah satu jalan untuk mewujudkan persatuan bangsa di tengah masyarakat yang heterogen adalah melalui pengembangan masyarakat multikulturalis. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah yang memihak semua golongan juga sangat diperlukan bagi terwujudnya persatuan Indonesia.

Artikel terakhir yang ditulis Muhamad Saleh berisi tentang evaluasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata. Hal ini karena sejak keluarnya perda tersebut hingga 2016, pembangunan kepariwisataan tidak mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan dari ketiga-tiga pendekatan yang terdapat dalam Perda tersebut, yaitu pendekatan sasaran, sumber dan proses tidak efektif. Rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut. (1) Penambahan fasilitas pendukung pariwisata dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. (2) Membangun kemitraan dengan sektor swasta, UKM, asosiasi kepariwisataan. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kepariwisataan.

**MARITAL STATUS, CAREER AND INCOME AS INDICATORS OF LIFE SATISFACTION AMONG MIDDLE-AGED CAREER WOMEN IN HULU LANGAT, SELANGOR, MALAYSIA**

Siti Marziah Zakaria<sup>1</sup>, Nor Ba'yah Ab. Kadir<sup>1</sup>, and Khairul Hisyam Baharuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Psychology and Human Well-being Research Centre, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43300, Bangi, Selangor, Malaysia, <sup>2</sup>Centre for Language and Generic Development, Universiti Malaysia Kelantan, 16300, Bachok, Kelantan, Malaysia

Korespondensi: Siti Marziah Zakaria (*e-mail*: marziah@ukm.edu.my/  
sitimarziah80@ukm.edu.my)

**Abstract**

Life satisfaction is a subjective construct that varies according to gender, education level, age, income, marital status, and other demographic factors. Life satisfaction is an important issue among middle-aged women. They face various responsibilities, roles and expectation at this age. The objective of this article is to identify the differences in life satisfaction among middle-aged Malay women from different educational level, marital status, career and income. This study applied a survey technique, which is a set of questionnaire which consisted of socio-demographic scale and life satisfaction scale (based on Life Satisfaction Index - Short Form by Barrette and Murk, 2006). Simple random sampling and purposive sampling have been used to obtain the responses. A total of 410 middle-aged career women in Hulu Langat, Selangor have participated in this study. The finding showed that life satisfactions among middle-aged women are different depending on their marital status, career and income. This was based on the result of ANOVA. Single women and widower who are working in private sector and of low-income level reported to have the lowest life satisfaction. This finding may provide input to the planning of programs to enhance the well-being and life satisfaction among middle aged career women.

**Keywords:** middle-aged women, life satisfaction, marital status, career, income.

**Introduction**

Women in their middle age might experience physical, cognitive and emotional changes. They have to accept the fact that their capabilities are declining in certain areas. Changes in the values of life are also common during the middle age phase after they had encountered various experiences. Their views towards religion have also changed in-

line with the changes in their perspectives of life (Costello, 2012). These changes would affect their perception on life satisfaction and happiness. At this stage, they are making choices, choosing what action should be taken, considering how to allocate time and resources and evaluating all aspects in life (Santrock, 2011). Middle-aged individuals would start to review where they had been

and what they had been doing in life. They will look forward on how much time remains for them to do the things they wanted in life (Santrock, 2011).

Life satisfaction is an important issue among middle-aged women. They face various responsibilities, roles, and expectation at this age. Middle age is supposedly a 'vacation' for women since their children are all grown up, having a stable job, and their marriages have also reached maturity. However, they need to carry a variety of demands and challenges in this phase (Navaie, Spriggs & Feldman, 2002). They are occasionally forced to bear a number of responsibilities as a mother, daughter, wife, grandmother, and as a worker at the same time (Berg, 2011). Women also have to prepare themselves to accept the changes in their family structure. The increase or reduction of family members, such as the presence of in-laws and their grandchildren or the death of their partners and parents, may greatly affect their life satisfaction.

In reality, life satisfaction is a subjective construct that varies according to gender, education level, age, income, marital status, and other demographic factors (Zhang, Erping & Chan, 2011). For example, Chipperfield and Havens (2001) found that women and men who have experienced marriage failures were reported to have low life satisfaction. Shichman and Cooper (2004), on the other hand, found that education level, income, and marriage are the main factors for life satisfaction. For seniors and the elderly, financial and physical aspects are more significant in affecting life satisfaction. Age is also related to life satisfaction, as proven by Jan and Masood (2008). With age increment, life satisfaction was found to decrease by 40%.

Ministry of Women, Family and Community Development, Malaysia (2017) is very concerned about the welfare of women in

Malaysia. This ministry aims at uplifting the participation of women in the development of country. Women should be the contributor and the recipient of the benefits of prosperity. The ministry is very committed in safeguarding the rights of women in all sectors. Women should be treated equally and deserve no discrimination. Women also should have access to involve in political, economic and social sector. Thus, this study will help to realize the vision of the ministry. The results of this study will help ministry to revise, plan and develop programs to enhance life satisfaction and well-being of women, especially middle-aged women. Thus, the objective of this study is to identify the differences in life satisfaction of middle-aged women from various marital, education, occupation and income background. The identification of groups with lowest level of life satisfaction will help to strategize the plan and reassess the policy for the betterment of women's life satisfaction.

## **Literature Review**

Life satisfaction is the most important and stable component of a person's subjective well-being besides the affective component (Kim-Prieto, et.al., 2005). An individual who has high life affluence was reported to have high level of life satisfaction and positive mood as well as emotional well-being (Suldo & Huebner, 2005). Life satisfaction was also defined as person's subjective evaluation of the degree to which his or her most important needs, goals, and wishes have been fulfilled (Valois, et.al., 2004). Diener (1999) suggested that there are some components in life satisfaction, such as desire to change life, satisfaction with current life, satisfaction with past, satisfaction with future, and significant others' views of one's life.

Life satisfaction is commonly studied in a few countries like Australia (NATSEM, 2010), the United States of America (Meeks and Murrell, 2001), the Netherlands (Kapteyn, Smith & Soest, 2009), Canada (Gee and Veevers, 1990), Sweden (Berg, 2011; Borg, Hallberg & Blomqvist, 2005), Japan (Yamasaki, Nelson & Omori, 2011), China (Leung, Moneta & Chang, 2005; Song and Appleton, 2008), India (Hasnain, Ansari & Sethi, 2011), and more. The study on life satisfaction was conducted on various samples including the elderly (Ramachandran and Radhika, 2012; Sener, 2011; Song, 1992), from adulthood to death (Hutchinson, Simeon, Bain & Wyatt, 2004), teenagers (Kong and You, 2013), university students (Mahanta and Aggarwal, 2013), women (Jan and Masood, 2008) and workers from various sectors (Adams, King & King, 1996; Jessica, Johnson, Pitt & Smyer, 2008). Nevertheless, the study on life satisfaction among middle-aged women is still not well explored in Malaysia. The level of life satisfaction among middle-aged women from different backgrounds is also yet to be further explored. Studies done overseas conversely reported various findings on the level of life satisfaction from different backgrounds.

For example, studies have found no significant differences in the life satisfaction scores for single, married, and divorced women (Jan and Masood, 2008). The factor for their life satisfaction is definitely varied as suggested by Kousha and Moheen (2004) who conducted a study among Iranian women living in urban areas. For married women, their life satisfactions are influenced by the marriage quality, work, and social activities. For single women, their life satisfactions are mainly influenced by social activities and level of education. This is similar to a study done in German where it was found that the factors influencing life satisfaction varied

between women with spouses and women without spouses (Albert, 2010). For women living with their spouses, satisfaction in their family influenced life satisfaction generally. For women living alone, satisfaction in friendship and socio-economic status are more influential. For them, satisfaction in family is less important in determining their life satisfaction (Albert, 2010).

Studies on education background and life satisfaction were done by several overseas researchers. Jan and Masood (2008) reported that there were differences in general life satisfaction between women of different levels of education. The differences in personal life satisfaction are found to have no significant dissimilarities between illiterate and highly educated women. There is a high level of personal life satisfaction among highly educated women. Highly educated women have more opportunities in the economic field and workforce. Sousa and Lyubonmirsky (2001) suggested that there will be a higher life satisfaction among women when they have the same income and education opportunities as men.

Meeks and Murrell (2001) also conducted a study on 1,177 seniors aged 55 years old and above. They were interviewed four times in 6 months. The study found that life satisfaction was related to education and negative emotions. A higher level of education conversely will decrease the level of negative emotions. Additionally, a lower negative emotion would contribute to higher life satisfaction and better health. Negative emotions, at the same time, mediate between education and healthy aging. This shows that education is an important foundation for healthy aging.

Nonetheless, there are also studies that negatively relate education and life satisfaction or harmony. For example, a study done in

Australia has found that respondents whose level of education was Grade 11 and below have higher life and work satisfaction as compared to respondents with higher education level. Respondents with Degrees, Masters and PhD are reported to have lower life satisfaction averagely (Gong, Cassells & Keegan, 2011). Respondents from different levels of education might have different evaluations on life satisfaction and sources for life satisfactions. Age also plays an important role where majority of the respondents who have low education level are mostly aged 50 years old and above and respondents who are university graduates are the younger generation.

Zhang, et.al. (2011) compared income and social status based on the occupation groups of the respondents. The finding of the study showed that occupation groups predicted the life satisfaction of the Chinese community from 2005 to 2009. A lower occupation group has shown a lower level of life satisfaction. As proven by Sheldon, et.al., (2001), the level of life necessity achievement can be related positively with the level of life satisfaction. A study by Easterlin et al., (2012) also found that the lowest social class reported a deteriorating life satisfaction. Conversely, a higher social class experienced improving life satisfaction.

Income was also found to be related to life satisfaction at urban areas in China. A higher household income was related to a higher life satisfaction (Song and Appleton, 2008). Unemployment was found to have been reducing life satisfaction promptly. In a study by Jan and Masood (2008) in Kashmir and Jammu, a comparative study between personal and household income was conducted. The researchers found that a higher personal income contributed to greater life satisfaction. A similar relationship pattern also occurred between household income and life satisfaction.

A study done by Berg, et.al. (2009) reported that divorce or death of spouse had a significant effect on life satisfaction, especially to male respondents. Gender difference indicates differences in role and responsibilities in marriages. Marriage conveys different meaning for men and women, especially from a psychosocial perspective. With the loss of spouse, it would be normally difficult for men to takeover home duties that were done by the wife previously (Berg, et.al., 2009). Loss of spouse also means loss of partner who are often the closest friend upon entering middle age (Chappel, 1989).

Life satisfaction has been studied in Indonesia as well. For example, research done by Khoerun Nisa (2014) analysed the influence of resources towards life satisfaction of retiree. This research was done in West Java. It applied cross sectional design and purposive sampling technique that involved 30 male and 30 female elderly who have passed minimum of one year retirement period. The result showed that the retirement resource ranked in medium category. There was no differences in life satisfaction between male and female elderly. The education, the per capita income, and the resource would increase life satisfaction in elderly. The regression test showed that resources affect life satisfaction positively among elderly in retirement phase (Khoerun Nisa, 2014).

This current study, on the other hand, will re-examine the differences of life satisfaction among middle-aged career women from diverse educational level, marital status, career and income. These variables were selected as past researches showed inconsistent results. Past researches have examine life satisfaction in multiple samples, contexts and locations. Observation on samples found that most of studies in life satisfaction focused on elderly or late adults as their samples. This

study, nonetheless, focuses only on middle-aged career women as this group of subjects is expected to have established their career, have achieved the goal in life, and have found a new life perspectives. This group is in the process of assessing and reviewing their life. Thus, a study on life satisfaction is critical and very relevant to this group. As Erik Erikson proposed the stage of generativity vs stagnation to middle-aged women.

## **Methodology**

### *Research Sample*

This study was carried out at three districts in Hulu Langat, Selangor which are Ampang, Kajang and Cheras. It involved middle-aged career women from different demographic characteristics (marital status, education background, employment status and health status). A total of 410 respondents were selected for this study. The mean age of respondents is 49 years old. Respondents were selected from both private and public sectors in Hulu Langat, Selangor. Statistics reported that Selangor have a total number of 2,972 ('000) labour force, which contributed to 21.3% of total labour force in Malaysia. The number of total labour force in urban areas in Selangor outnumbered the rural area. Comparatively, 1, 654 ('000) are male labours compared to 1,131 ('000) female labours (Department of Statistics, 2014).

The sampling methods used were simple random sampling and purposive sampling. Simple random sampling was done to select three districts out of seven districts in Hulu Langat, Selangor for the study. The districts selected were Kajang, Ampang and Cheras. Purposive sampling was done to get the sample of the study. Women who fulfilled the criteria were selected to participate in the study.

The criteria are Malay women, aged between 40 and 59 years old, working and living in Ampang, Kajang or Cheras, and have careers (either in the government or private sector or self-employed). Out of the 500 questionnaires distributed, 410 questionnaires were returned.

Career women were selected as they represented a high percentage of population in the state of Selangor. They work in many sectors, mainly services and sales (29%), administrative work (17.7%) and management, as professionals (14.8%). Thus, women in Selangor play a major role in developing the economic and social aspects. Selangor is one of the developed states in Malaysia. The number of career women is higher in urban areas compared to rural area (KPWKM, 2015). Furthermore, the number of career women or working women is increasing from 2010 to 2014, as reported by KPWKM (2015). In 2012, 49.5% of women participated in labour force. It increased to 52.4% in 2013, and 53.6% in 2014. In reality, they joined labour force for multiple reasons. Economic factor, better level of education, increasing cost of living and preferring a career life perhaps are the main reasons of joining labour force.

### *Research Design and Instruments*

This study has utilized questionnaires to get feedbacks from the respondents. The life satisfaction of middle-aged Malay women in Hulu Langat, Selangor was studied using Life Satisfaction Index A-Short Form by Barret and Murk (2006). The index contained 12-scales with reliability value of 0.79. The index was tested on various levels of age, especially on the middle-aged and seniors. There were five life satisfaction components studied in the index comprising of zest of life, strength and determination, similarities between achieved and envisioned goals, positive self-concept and mood tone (Barret and Murk,

2006). The feedbacks on the item are based on a 4-Likert scale: Strongly disagree, Disagree, Agree, and Strongly Agree.

### *Data Analysis*

The objective of this study was answered using ANOVA test (Analysis of Variance) by analysing One-Way ANOVA. SPSS programme was used to analyse the data. The mean value and F were given attention to get the accurate answer of the differences in life satisfaction among middle-aged women from various backgrounds. Test of significance was observed to determine whether the differences in mean are significant or significant. The value of p will decide the acceptance or rejection of the hypotheses.

The hypotheses that were tested in this study are as follows.

- Ho1: There are no differences in life satisfaction between middle-aged women from different marital statuses.
- Ho2: There are no differences in life satisfaction between middle-aged women from different educational levels.
- Ho3: There are no differences in life satisfaction between middle-aged women from different career sectors.
- Ho4: There are no differences in life satisfaction between middle-aged women from different income levels.

### **Results**

The first ANOVA analysis was done on marital status (Table 1). Marital status was divided into two categories, single/ divorced/ widowed, and married. It was clear that different marital status contributed to different life satisfaction. The value of  $F = 11.40$  was found to be significant at  $p < 0.01$ . The highest min value recorded by married women was 36.68. Single/divorced/widowed women recorded a low life satisfaction (mean 34.69). Life pressures originating from financial problems, various responsibilities, and the public's stigma may affect the achievement of their life satisfaction. Levene test showed a similarity in variances of the studied marital status categories, married and single ( $3.81, p > 0.05$ ). This implies a variety in the score for each of the same category.

Education level was also studied because previous findings showed that education can affect life satisfaction. The highest education level, which is university/ college showed highest life satisfaction, followed by primary and secondary school (Table 2). This may be due to the effect of education on the current career and income. It was clear that college/ university education background has affected women's perception on life satisfaction as they have a good position in the society and have a cosy life. Nevertheless, the F value recorded

**Table 1 Life Satisfaction from Different Marital Statuses**

<b>Marital Status</b>	<b>N</b>	<b>M</b>	<b>SD</b>	<b>F</b>
Single/ Divorced/ Widowed	82	34.69	5.47	11.40**
Married	320	36.68	4.55	

\*\*p < 0.01

Source: SPSS 18



**Table 2 Life Satisfaction from Different Education Level**

<b>Education level</b>	<b>N</b>	<b>M</b>	<b>SD</b>	<b>F</b>
Primary school and lower	26	35.92	4.29	2.77
Secondary school	212	35.78	4.77	
College/ university	165	36.94	4.88	

p > 0.05

Source: SPSS 18

a low score of 2.77, p > 0.05. This showed an insignificant difference between different levels of education on life satisfaction.

The difference of life satisfaction of women from different careers was also conducted. Careers were generally sorted according to the category of employer, such as public, private and self-employed. Statistic from the labour force indicated that majority of Malay women work at public sectors compared to women from other races. Thus, the data showed that there were 221 women in the public sector as compared to 68 women in the private sector. The analysis on the average score of life satisfaction showed that women in the public sector reported the highest life satisfaction followed by self-employed women.

This situation illustrated the work demand and stress faced at the workplace. Women in the private sector may experience higher work stress as compared to women in the public

sector and self-employed women, such as those who conduct their own business from home. A distinct average score was shown by the public servant (mean= 37.02), compared to private workers and self-employed, with the F value = 7.65, p < 0.01 (Table 3).

Moreover, the data indicated that the highest income (> RM5000) experienced the uppermost life satisfaction (mean = 38.28) compared to lower income earners. It is clear that lower income would contribute to a low average value in life satisfactions. The respondents might place income as a criterion to determine life satisfaction. Respondents with the lowest income might feel isolated from the community and felt that they did not deserve to experience the best quality of life. Value of F = 8.46, p < 0.01 showed that there is a significant difference (Table 4). Income played an important role in influencing life satisfaction of middle-aged women.

**Table 3 Life Satisfaction from Different Career Sectors**

<b>Career</b>	<b>N</b>	<b>M</b>	<b>SD</b>	<b>F</b>
Public	221	37.02	4.69	7.65**
Private	68	34.57	4.46	
Self-Employed	114	35.82	4.97	

\*\*p < 0.01

Source: SPSS 18

**Table 4 Life Satisfaction from Different Income Level**

Income	N	M	SD	F
<RM1000	80	34.61	4.41	8.46**
RM1001-RM3000	167	35.83	4.56	
RM3001-RM5000	113	37.35	4.67	
>RM5001	39	38.28	5.12	

\*\*p < 0.01

Source: SPSS 18

In short, analysis on the respondents' profiles indicated that single/divorced/widowed, private sector employees and low-income women were more likely to have the lowest level of life satisfaction. Marital status, career sectors and income levels clearly marked a great impact to their perception towards life satisfaction.

Therefore, the decisions have been made on the established hypotheses. Three null hypotheses need to be rejected. There are as below.

Ho1: There are no differences in life satisfaction between middle-aged women from different marital statuses. (Rejected)

Ho3: There are no differences in life satisfaction between middle-aged women from different career sectors. (Rejected)

Ho4: There are no differences in life satisfaction between middle-aged women from different income levels. (Rejected)

In other words, there are differences in life satisfaction of women from different marital statuses, career sectors, and income levels. Meanwhile, another hypothesis fail to be rejected as the result showed that there is no difference in life satisfaction among women from different educational level-

Ho2: There are no differences in life satisfaction between middle-aged women from different educational levels (Fail to be rejected).

## Discussion

Marital status is found to indicate differences in life satisfaction. Married women were reported to have higher life satisfaction than women who are single, divorced or widowed. This is supported by Joshua, et.al. (2011) who have found that being single gives bad impression towards life satisfactions. The study revealed that being alone without partners would further increase the level of stress among the respondents. Studies conducted on separations or divorced and life satisfactions in countries like the United States, United Kingdom, Switzerland and Russia also showed negative impact and were significant as well.

Nonetheless, other studies had shown that there were no differences in life satisfaction between women of different marital status. For example, Jan and Masood (2008) reported that there was no significant difference in the life satisfactions score between married, single and divorced women. This is because they have different life satisfactions' factors. For married women, the most important factors for life satisfactions are marriage

and work satisfactions. This is different for single women who gave more attention on education and social activities in evaluating life satisfactions (Kousha and Moheen, 2004). They also have good social support and good relationship with their family members. Their life satisfactions are influenced by income and education (Newtonson and Keith, 2001).

Education level was not found to contribute to life satisfaction. It may no longer be an issue to middle-aged or elderly women. After working for a long time, their experience helped them to improve their standard of living and income. Even with just SPM or STPM, they were still able to upgrade their skills and achievement through platforms provided by the government and private sectors such as promotion interviews, PTK examinations (for public servants), and skill courses. The platforms prepared enabled them to apply for promotions and salary increment in their respective sectors. Based on the statistics in 2014, a number of 1,596 ('000) women hold SPM certificate (*Sijil Pelajaran Malaysia*/ Malaysia Education Certificate) or equivalent. A significant number of women also reported to have Bachelor Degree (704 000), followed by 548 000 of those who hold *Diploma Degree* (Department of Statistics, 2014). This statistics showed that women have a better education level in Malaysia. In fact, they have a better access to quality education, have better facilities and are encouraged to upgrade themselves. Nevertheless, the challenges and expectations they encountered as middle-aged women might weaken the impact of education on their life satisfaction.

This was consistent with the findings in Rayanagoudar, Gaonkar & Itagi (2001) who reported that there was no difference in life satisfaction among women from different education background. This is also similar

with Clark and Oswald (1994); Frey and Stutzer (2002) who suggested that education only contributes to life satisfaction through mediums, such as ambitions, income, social participation and self-confidence. Individuals with high education level, such as bachelor degree and masters, did not necessarily have high life satisfaction. Seldom, individuals with primary and secondary school education are more happy and satisfied with life compared to those with the background of university education.

The study also found that life satisfaction differed among women of different incomes. The finding indicated that life satisfaction could increase with the increase of income. The respondents of the study were working middle-aged women living in Hulu Langat, Selangor. Women in urban areas experienced more effects of inflation and price increase of items. Money is a focus in their lives in order to fulfil all life necessities, especially when they are the family breadwinner. Life becomes difficult when income is low, giving more negative effects to harmony in life and life satisfaction. Report by the Department of Statistics (2014) revealed that poverty in urban areas has dropped year by year, comparatively, in 2009, 2012 and 2014, the percentage of poverty rate declined from 1.7% to 1.0% and eventually to 0.3% in 2014. For the overall population (rural and urban residents), it has dropped from 3.8% to 1.7% and 0.6% in 2014. This is indeed an indicator of nation's wealth and prosperity.

It is consistent with the study by Easterlin, et.al. (2012); Jan and Masood (2008); Song and Appleton (2008) which stated that the higher the individual's income is, the higher his or her life satisfaction would be. Women with different income clearly experienced different life satisfaction. Unemployment on the other hand could reduce life satisfaction

drastically (Song and Appleton, 2008). This showed that money had become a source for life satisfaction in this challenging age, where currency value kept on dwindling. Men and women struggle to upsurge their income in order to improve their status and quality of life. The increasing cost of living and utilities bills, children's school fees, housing and transportation loans, the inflation rate and many more affected income differently. People from high income group might not notice the increasing price of items compared to those with low income.

Household income of RM940 monthly is considered poor in urban areas, Peninsular Malaysia (Department of Statistics, 2014). Meanwhile, the household income of RM580 is categorized as very poor. Thus, these groups are entitled for monthly allowance from the government. Nevertheless, the percentage of poor residents in 2014 is low in Selangor, which is only 0.2% of the total population in Selangor. The average household income is RM8, 471 in urban areas in Selangor, compared to RM5, 272 for rural areas. It is the third in ranking compared to other states in Malaysia. Kuala Lumpur and Putrajaya marked the highest average of monthly household income, which is RM10, 629 and RM10, 401 respectively. Kuala Lumpur is the capital city of Malaysia and it is a prestigious city with high-end lifestyle and a bundle of job opportunities. Putrajaya on the other hand, is the government administrative city. It is the home for many civil servants and administrators. This city has been carefully designed for tourist attractions, with advanced amenities and beautiful landscape.

Career sector was also found to contribute to the different life satisfaction. The current study divided career into three categories, public, private and self-employed. The different career sector clearly showed different life satisfactions.

The public sector revealed the highest life satisfaction, followed by self-employed and private sector. This may be caused by the benefits entitled to public servants in the forms of financial security, medical benefits, numerous leave types, and allowance. The workload of public servants may be lighter compared to private sector workers. Self-employed women on the other hand experienced the advantage on time flexibility, financial freedom, autonomy, and many more. In U.S, public sector jobs accounted for 16.0% of total employment in 2013.

Rashid and Rashid (2012) demonstrated that employees' motivation was affected by the several work-related factors. Public sector employees were more motivated by work contents and experience. They enjoyed more balance between work and family life. However, private sector employees are more motivated by financial rewards, career development opportunities, and supportive environment (Rashid & Rashid, 2012). It is apparent that public servants are less motivated by financial rewards than private sector employees. It is assumed that people who give high emphasis to pay will seek employment in the private sector, which is generally perceived to pay more than the public sectors for similar jobs (Lewis & Frank 2002). Burgess and Ratto (2003) revealed that civil servants are motivated by other benefits and incentives than private sector workers. Therefore, women' career sectors, whether private or public might affect their happiness and life satisfaction. As the main focus of career women are career and family, the atmosphere they work in is vital.

The Department of Statistics (2014) reported that a high percentage of women in urban areas involved in manufacturing sectors. They are also participated in retail and wholesale business, food services,

education, and social work. A remarkable percentage of them have joined public services as administrators and supporting staff. Some of those who are self-employed involved in selling and offering financial products, such as *takaful*, insurance, share and so forth. The challenging life in Selangor did really urge women from all age groups to strive for a better living by having higher income and more financial freedom. They have become more active in doing business and sales and become the breadwinner of the family. Women who are single or widowed have more pressure to survive especially if they have kids to take care of and nurture. This will greatly affect their life satisfaction as they hold major responsibilities.

### **Limitations of Study**

The findings of this study can be generalized only to middle-aged women in Hulu Langat, Selangor. This study selected only middle-aged career women as they share similar lifestyle, routines of life and commitments. The findings cannot be generalized to non-working women who perhaps have different perspectives towards life and career. This study also focused on Malay women only as this enabled researcher to explore their unique views and perceptions. Malay women definitely hold different life orientation and ideology compared to non-Malay women. Future researches may examine and analyse life satisfaction of non-Malay women. Eventually, this study limit to districts in Selangor only to observe the impact of urbanization in Selangor to middle-aged career women. Women from other states may not experience the same challenges and pressures encountered by women in Selangor, and thus the results might be scattered. Further researches can study life satisfaction among women from other states,

including Sabah and Sarawak as they may have different experience and expectations. It can also be studied qualitatively to have deeper understanding and more information about their life experience and life satisfaction, in specific.

### **Conclusion**

To summarise, life satisfaction among middle-aged women varies depending on marital status, occupation, and income. Women of married status, working in public sectors with high income were reported to have highest life satisfaction. Women who are single/divorced/widowed, working in private sectors with low income on the other hand, reported to have low life satisfaction. It is evident that marital status, work and income play an important role in influencing life satisfaction among middle-aged women in Hulu Langat, Selangor. On the contrary, education does not significantly affect life satisfaction of women. Middle-aged women from different education backgrounds revealed an almost similar life satisfaction. University, secondary and primary education are not indicators of their life satisfaction.

The findings of this study clearly show that single/divorced/widowed women, low income and private sector employees should be given more attention. They reported a lower life satisfaction compared to the other groups. Emotional support, empathy and financial support are the main necessity to this group. Single mothers with low income are especially the ones with the most life struggles and highest pressure. The increasing living cost at urban areas would only worsen their emotional stability and life satisfactions. Thus, policy makers, psychologists, welfare workers and such can benefit from this study as it provides guidelines in making policies, programmes,

and interventions to help middle-aged women. This group needs help as they are the foundation for public and family harmony.

Therefore, this study recommends that:

1. Single/divorced/widowed women have to be given special attention by the employer, community and the government. They are the groups that carry great responsibilities to take care of the families. They are the breadwinner of the family. Most of the times, single women receive less support from the employer and the community. Community should have funds to support this group of women, especially during critical times, such as before festive seasons.
2. Low income groups especially in urban areas have been greatly affected by the increasing cost of living. They have to pay a lot for the house rental, transportation charge and even educational fee. There should be more opportunities given to this group to start up small business. This group perhaps deserve a lower house rental, lower transportation charges, lower educational fee and so forth. Living in Selangor and other urban areas is very hard for this people.
3. Private workers need to be given a special care, especially those working in small companies. Their salaries are normally lower than public servants. They have higher workload and responsibilities. Most of the times, they cannot negotiate and demand for a better wage and a better work environment. At times, they have to work in a stressful and inconvenient environment. But, they need to stay and persevere to endure their life. This has profoundly affected their quality of

life and life satisfaction. Government may establish few policies to ensure that their welfare can be safeguarded.

## References

- Adams, G.A., King, L.A., & King, D.W. 1996. "Relationship of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction". *Journal of Applied Psychology*, 81 (4), 411-420. <http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.81.4.411>.
- Albert, I., Labs, K. & Trommsdorff, G. 2010. "Are older adult German women satisfied with their lives? On the role of life domains, partnership status, and self-construal". *The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry*, 23 (1), 39-49. <http://dx.doi.org/10.1024/1662-9647/a000002>.
- Barrette, A.J. & Murk, P.J. 2006. "Life Satisfaction Index for the Third Age (LSITA): A measurement of successful aging". In E.P. Isaac (Ed.). *Proceedings of the 2006 Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education* (pp.7-12). St. Louis: University of Missouri, St. Louis.
- Berg, J.A. 2011. "The stress of caregiving in midlife women". *The Female Patient*, 36, 33-35. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/citations;jsessionid=5F9867E2902D183EF482A99486E45-27A?doi=10.1.1.370.8694>.
- Borg, C. Hallberg, I.R., & Blomqvist, K. 2005. "Life satisfaction among older people with reduced self-care capacity: The relationship to social, health, and financial aspects". *Journal of Clinical Nursing*, 15, 607-618. <http://www.readcube.com/articles/10.1111/j.1365-2702.2006.01375.x>.
- Burgess, S., & Ratto, M. 2003. "The role of incentives in the public sector: Issues and

- evidence". *Oxford Review of Economic Policy*, 19(2), 285-300.
- Chappell, N.L. 1989. "Health and helping among the elderly". *Journal of Aging and Health*, 1, 102-120. <http://doi.org/10.1177/089826438900100107>.
- Chipperfield, J.G., & Havens, B. 2001. "Gender differences in the relationships between marital status transitions and life satisfaction in later life". *Journal of Marriage and the Family*, 12 (3), 176-186.
- Clark, A. & Oswald, A. 1994. "Unhappiness and unemployment". *The Economic Journal*, 104 (424), 648-659. <http://doi.org/10.2307/2234639>.
- Costello, M.S. 2012. "The role of spirituality in the second half of life". Paper presented at Symposium at the Library of Congress, Washington, June.
- Diener, E. D., Suh, E. M., Lucas. E. E. Smith, H. L. 1999. "Subjective Well-being: Three Decades of Progress". *Psychological Bulletin*. 125 (2), 276-302.
- Easterlin, R.A., Morgan, R., Switek, M. & Fei, W. 2012. "China's Life Satisfaction". *Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 109 (25), 9775-9780. <http://doi.org/10.1073/pnas.1205672109>.
- Gee, E. M. & Veevers, J.E. 1990. "Religious involvement and life satisfaction in Canada". *Sociological Analysis*, 51, 387-394. <http://doi.org/10.2307/3711079>.
- Gong, H., Cassells, R., & Keegan, M. 2011. "Understanding life satisfaction and the education puzzle in Australia: A profile from HILDA Wave 9". *NATSEM Working Paper 11/12*, University of Canberra.
- Frey, B.S. & Stutzer, A. 2002. "What can economist learn from happiness research". *Journal of Economic Literature*, 40, 420-435.
- Hasnain, N., Ansari, S.A., & Sethi, S. 2011. "Life satisfaction and self-esteem in married and unmarried working women". *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 37 (2), 316-319.
- Hutchinson, G., Simeon, D.T., Bain, B.C., Wyatt, G.E., Tucker, M.B. & Lefranc, E. 2004. "Social and Health determinants of well-being and life satisfaction in Jamaica". *International Journal of Social Psychiatry*, 50 (1), 43-53. <http://doi.org/10.1177/0020764004040952>.
- Jan, M. & Masood, T. 2008. "An assessment of life satisfaction among women". *Extension and Communication*, 2 (1), 33-42.
- Jessica, K.M., Johnson, M., Pitt, E.B., Smyer, M. & Matz-Costa, C. 2008. "Quality of employment and life satisfaction: A relationship that matters for older workers". *Workplace Flexibility*. The Center on Aging and Work.
- Joshua, D., Joel, T.N., & Meghan, R.L. 2011. "Sex difference in delaying family: Effects on job and life satisfaction". *Psychology Research*, 1(6), 444-452.
- Kapteyn, A., Smith, J.P., & Soest, A.V. 2009. "Life Satisfaction". *Discussion paper no. 4015*. IZA, The Netherlands.
- Kim-Prieto, C., Diener, E., Tamir, M., Scollon, C. N., & Diener, M. 2005. "Integrating the Diverse Definitions of Happiness: A Time-Sequential Framework of Subjective Well-Being". *Journal of Happiness Studies*. 6 (3), 261-300.
- Khoerun Nisa. 2014. "Sumber daya pensiun dan kepuasan hidup lansia pria dan wanita pada masa pensiun". *Skripsi untuk Sarjana Sains*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Kong, F. & You, X. 2013. "Loneliness and self-esteem as mediators between social support and life satisfaction in late adolescence". *Social Indicator Research*,

- 110, 271-279. <http://doi.org/10.1007/s11205-001-9930-6>.
- Kousha, M. & Moheen, N. 2004. "Predictors of life satisfaction among urban Iranian women: An exploratory analysis". *Journal of Social Indicators Research*, 40 (3), 320-357.
- KPWKM. 2015. "Perangkaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia 2015", Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Putrajaya. Retrieved from <http://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/Penerbitan/Buku%20statistik/BUKU%20STATISTIK%202015%20KPWKM.pdf>. Downloaded on 20 March 2017.
- Leung, B. W. C, Moneta, G.B., & Chang, C.M. 2005. "Think positively and feel positively: Optimism and life satisfaction in late life". *International Journal of Aging and Human Development*, 61 (4), 335-365.
- Levinson, D. 1978. *The Seasons of a Man's Life*. New York: Knopf.
- Lewis, G. B., & Frank, S. A. 2002. "Who wants to work for the government?", *Public Administration Review*, 62 (4), 395-404.
- Light, Hertsgaard, & Martin. 1985. "Education and income: significant factors in life satisfaction of farm men and women". *Research in Rural Education*, 3 (1), 7-12.
- Lora, E. & Chaparo, J.C. 2008. *The Conflictive Relationship between Satisfaction and Income*. Inter-American Development Bank. Department of Investigation, Washington, New York.
- Mahanta, D. & Aggarwal, M. 2013. "Effect of perceived social support on life satisfaction of university students". *European Academic Research*, 1 (6), 1083-1094.
- Meeks, S. & Murrell, S.A. 2001. "Contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative effect". *Journal of Aging Health*, 13(1), 92-119. <http://doi.org/10.1177/089826430101300105>.
- NATSEM. 2010. "The Pursuit of Happiness: Life Satisfaction in Australia". *NATSEM Income and Wealth Report*. University of Canberra.
- Navaie-Waliser, M., Spriggs, A., & Feldman, P.H. (2002). Informal caregiving: Differential experiences by gender. *Medical Care*, 40 (12), 1249-1259.
- Newtson, R. L., and P. M. Keith. 1997. "Single women in later life". In *Handbook on women and aging*, edited by J. M. Coyle, 385-99. Westport, Conn.: Greenwood Press.
- Panda, A.K. 1999. *Life Satisfaction among Elderly Females in Delhi*. Department of Social Work, Delhi University, Unpublished manuscript.
- Ramachandran, R., and Radhika, R. 2012. "Socioeconomic status and life satisfaction in cross cultural perspective: The elderly in Japan and India". *International Journal of Humanities and Social Science*, 2 (16), 285-297.
- Rashid, S. & Rashid, U. 2012. "Work Motivation Differences between Public and Private Sector". *American International Journal of Social Science*, 1 (2), 24-33.
- Rayanagoudar, S., Gaonkar, V. & Itagi, S.K. 2001. "Effect of income, education and religion on the life satisfaction of the elderly retired women". *Man in India*, 81, 301-304.
- Santrock, J.W. 2011. *Life Span Development*. New York: Mc Graw Hill.
- Sener, A. 2011. "Emotional support exchange and life satisfaction". *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(2), 79-88.
- Sheldon, K.M., Elliot, A.J., Kim, Y. & Kasser, T. 2001. "What is satisfying about satisfying events? Testing 10 candidate psychological needs". *Journal of Personality and Social Psychology*, 60, 570-585. <http://dx.doi.org/10.1037>.



- Shichman, S., & Cooper, E. 2004. "Life satisfaction and sex role concept". *Journal of Sex Role*, 11, 227-240.
- Song, L. & Appleton, S. 2008. "Life satisfaction in Urban China: Components and determinants". *World Development*, 36 (11), 2325-2340.
- Song, Y. I. 1992. "Life satisfaction of the Korean-American elderly from a socio-psychological analysis". *Journal of Population and Development*, 21 (2), 225-241.
- Sousa, L., & Lyubomirsky, S. 2001. "Life Satisfaction". In J. Wore (ed). *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender*. New Jersey: Prentice Hall.
- Suldo, S. M., & Huebner, E. S. 2005. "Is Extremely High Life Satisfaction During Adolescence Advantageous?", *Social Indicators Research*. 78, 179-203.
- The Department of Statistics 2014. "Data Asas Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, Putrajaya". Retrieved from <http://www.rurallink.gov.my/wp-content/uploads/2015/05/1-DATA-ASAS-MALAYSIA1.pdf>. Downloaded on 27 March 2017.
- Valois, R. F., Zullig, K. J., Huebner, S. E., Drane, J. W. 2004. "Life Satisfaction and Suicide Among High School Adolescents". *Social Indicators Research*, 66, 81-105.
- Yamawaki, N., Nelson, J.A.P., & Omori, M. 2011. "Self-esteem and life satisfaction as mediators between parental bonding and psychological well-being in Japanese Young adults". *International Journal of Psychology and Counseling*, 3 (1), 1-8.
- Zhang, S., Erping, W., & Chen, Y. 2011. "Relative deprivation based on occupation: An effective predictor of Chinese life satisfaction". *Asian Journal of Social Psychology*, 14, 148-158. <http://doi.org/10.1111/j.1467-839x.2010.01338.x>.

**BAGAIMANA ORGANISASI MSM DAN TRANSGENDER BERTAHAN?  
STUDI TENTANG ORGANISASI MSM DAN TRANSGENDER DI INDONESIA  
DAN TIMOR LESTE<sup>1</sup>**

Anna Marie Wattie<sup>2</sup> dan Sri Purwatiningsih<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

<sup>3</sup>Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Anna Marie Wattie (e-mail: amwattie@yahoo.com)

**Abstrak**

**Latar Belakang:** *Men who have sex with men* (MSM) dan transgender (TG) merupakan sebagian dari berbagai kelompok yang berisiko terhadap infeksi HIV&AIDS. Secara global, terjadi eskalasi kasus HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG, tetapi datanya terbatas. *Community-Based Organization* (CBO) merupakan pionir dalam pemberian layanan HIV&AIDS untuk kelompok MSM dan TG. **Tujuan:** Studi ini bertujuan untuk melihat strategi organisasi yang bergerak dalam isu MSM dan transgender di Indonesia dan Timor Leste untuk bertahan. **Metode:** Studi dilakukan dengan menggabungkan studi kuantitatif dan kualitatif untuk menilai organisasi-organisasi MSM dan TG yang terkait dengan HIV&AIDS di Indonesia dan Timor Leste. **Hasil:** Berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif, ditemukan adanya variasi strategi yang dikembangkan oleh organisasi untuk dapat bertahan yang disesuaikan dengan kapasitas organisasi yang menangani MSM dan TG. Penilaian kapasitas organisasi dilihat berdasarkan indikator *governance* (tata kelola), efektivitas organisasi, keberlanjutan, dan atribut. **Kesimpulan:** Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di setiap negara mencerminkan tingkat efektivitas *governance*, dan sustainability, serta praktik dan atribut dari setiap organisasi yang memengaruhi model strategi yang dikembangkan.

**Kata kunci:** MSM, Transgender, Organisasi, *best practices*, HIV&AIDS

<sup>1</sup> Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) yang didanai oleh ISEAN HIVOS tahun 2011. Sejalan dengan kerja sama antara ISEAN dan HIVOS dalam program berjudul *Strengthening Community System to Reduce Vulnerability to and Impact of HIV infection on MSM and TG in Insular South-East Asia*, payung penelitian ini bertujuan mengatasi kesenjangan kebutuhan terhadap pelayanan serta terbatasnya dukungan dan peningkatan kegiatan untuk mengurangi prevalensi HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG.

## HOW MSM AND TG ORGANIZATIONS CAN SURVIVE? STUDY ON ORGANIZATIONS WORKING ON HIV & AIDS IN INDONESIA AND TIMOR LESTE

### Abstract

**Background:** Men who have sex with men (MSM) and transgender (TG) are some of groups who have a high risk of infected by HIV&AIDS. Globally, there has been an increasing of HIV&AIDS cases among MSM and TG although the exact data regarding the incidence and prevalence are unavailable. Community-Based Organizations (CBO) are the pioneer in the delivery of services to MSM and TG who are infected with HIV&AIDS. **Objectives:** This study aims to see how the organization's strategy working on MSM and TG issues in Indonesia and Timor Leste to survive. **Methods:** This study uses a combination of qualitative and quantitative methods whereby qualitative analysis is used to augment quantitative data in order to assess the MSM and TG organizations working on HIV&AIDS. **Result:** Based on qualitative and quantitative data, the research found a variety of strategies developed by the organization to survive, where it adapts to the capacity of organizations related issues among the MSM and TG. The assessment on the CBO capacity and good practices was carried out on several indicators, including governance, organization effectiveness, sustainability and attribute. **Conclusions:** Social, cultural, economic, and political environments in each country determine the degree of organization effectiveness, governance, sustainability, practices and attributes of any organization that influences the developed strategy model.

**Keywords:** MSM, Transgender, Organization, best practices, HIV&AIDS

### Pendahuluan

Perilaku seks sejenis ditemukan pada hampir semua kelas sosial, baik yang terbuka mengakuinya maupun yang masih secara tersembunyi. Perilaku ini meliputi laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki (MSM, *men who have sex with men*) dengan perilaku seksual yang berisiko terpapar HIV&AIDS. Transgender (TG atau lebih dikenal dengan istilah waria) juga termasuk dalam payung terminologi MSM, tetapi dengan pengertian yang lebih spesifik. Hal ini terkait dengan identitas gender kelompok transgender yang dianggap berbeda menurut norma sosial jika dikaitkan dengan jenis kelamin dan identitas gender mereka saat dilahirkan (Yuliani, 2006).

WHO (2010) melaporkan bahwa estimasi populasi MSM di Asia Tenggara adalah sekitar 6-12 persen dari populasi MSM di dunia. Epidemio HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG secara global meningkat, tetapi karena keterbatasan data dan sensitivitas isu, tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti jumlahnya. Hitungan secara kasar dengan *odds ratio* 1/5 menyebutkan bahwa 18,7 persen MSM dan TG di Asia terpapar HIV&AIDS. Sementara itu, mereka yang hidup dengan HIV di Indonesia untuk kelompok MSM mencapai 5,2 persen dan pada kelompok TG di Jakarta mencapai 34 persen. Kemudian di Timor Leste 0,9 persen kelompok MSM positif HIV, sedangkan data tidak ditemukan pada kelompok TG (WHO, 2010).

Studi mengenai MSM dan TG sebelumnya lebih memfokuskan pada MSM dan TG sebagai target penelitian, seperti mengkaji perilaku dan sikap waria terhadap HIV&AIDS atau konstruksi sosial yang mendiskriminasi mereka (Hartiti, dkk., 2009 dan Suwarti, 2009). Demikian juga dengan studi mengenai homoseksualitas sebelumnya yang lebih banyak menekankan pada aspek perilaku dan identitas kelompok homoseksual (Rahardjo, 2009). Belum banyak studi yang mengkaji organisasi yang menangani TG dan MSM sebagai fokus penelitian. Beberapa studi terkait dengan kelompok LGBT menjelaskan bahwa kelompok ini banyak mengalami diskriminasi (USAID dan UNDP, 2014). Oleh karena itu, organisasi yang mewadahi mereka juga harus berstrategi untuk dapat bertahan di tengah diskriminasi dan marginalisasi yang dialami.

Organisasi berbasis masyarakat (CBO atau *community-based organization*) merupakan lembaga yang berada di garis depan dalam upaya menyediakan kebutuhan pelayanan HIV&AIDS bagi kelompok MSM dan TG. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil studi yang lebih menekankan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi MSM dan TG terhadap upaya pengurangan dampak HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG di Indonesia dan Timor Leste. Oleh karena itu, hasil studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan sumbangan rekomendasi kebijakan terhadap upaya pengurangan prevalensi HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG.

## Metode Penelitian

### Definisi Konsep

MSM merujuk pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain, terlepas dari identitas dan orientasi seksual mereka, atau apakah mereka juga

berhubungan seksual dengan perempuan. MSM merujuk pada perilaku dan bukan pada identitas sosial di masyarakat. Termasuk dalam MSM adalah laki-laki yang aktif secara seksual dan teridentifikasi sebagai homoseksual (gay), biseksual, dan individu yang teridentifikasi di masyarakat sebagai laki-laki yang feminin. MSM juga mencakup laki-laki dengan karakteristik maskulin yang tidak dipersepsikan sebagai homoseksual maupun gay, tetapi melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki (*The Global Fund*, 2008).

Sementara itu, menurut *The Yogyakarta Principles*, transgender (TG) adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan individu dengan identitas atau ekspresi gender yang berbeda dari harapan konvensional yang mengacu pada jenis kelamin yang teridentifikasi secara fisik saat dilahirkan. Berikut adalah kelompok-kelompok yang termasuk sebagai TG. Pertama adalah perempuan yang mengidentifikasi dirinya menjadi laki-laki kemudian laki-laki yang mengidentifikasi dirinya menjadi perempuan, *cross-dresser*, dan berbagai identitas budaya ketika seseorang mengidentifikasi diri menjadi gender yang berbeda dari gender yang dilekatkan padanya berdasarkan jenis kelamin secara biologis saat ia dilahirkan (O'Flaherty dan Fisher, 2008).

### Kerangka Analisis

Strategi bertahan (*survival strategy*) dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan eksistensi kediriannya yang bernilai atau dianggap bernilai, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Dalam perspektif sosiologi, strategi bertahan lazimnya menjadi sebuah pilihan di tengah gerusan ancaman-ancaman yang setiap

waktu dapat merusak nilai-nilai yang menjadi kearifan dari sebuah komunitas (Sulaiman, 2014).

Sementara itu, suatu organisasi atau lembaga harus dapat beradaptasi secara cepat dan lebih baik agar dapat bertahan. Sebuah organisasi dapat menyikapi perubahan dan tuntutan perubahan zaman sehingga organisasi dapat dengan cepat membaca dan mengenali kondisi-kondisi baru dan segera beradaptasi terhadap perubahan itu (Goh, 1998).

Penilaian terhadap strategi bertahan yang diterapkan oleh organisasi dilakukan dengan mengidentifikasi *excellence practices* berdasarkan kerangka kerja dari ICOM (Lighid dan Satia, 2009), terutama untuk menilai organisasi yang berupaya mencapai *excellence*. Selain efektivitas organisasi untuk memastikan bahwa dasar kebijakan institusi masih dipegang, peningkatan *excellence practices* juga perlu didukung dengan keberlanjutan dan *governance*. Keberlanjutan meliputi penilaian tentang sumber daya keuangan dan kelangsungan hidup organisasi, efektivitas program, dan

dampak jangka panjang. Sementara itu, *governance* meliputi peran yang sesuai untuk *board* atau manajerial organisasi dan sistem untuk menjamin kinerja, integritas, dan akuntabilitas (Lighid dan Satia, 2009).

Indikator-indikator penilaian untuk setiap poin adalah sebagai berikut.

a. *Governance*

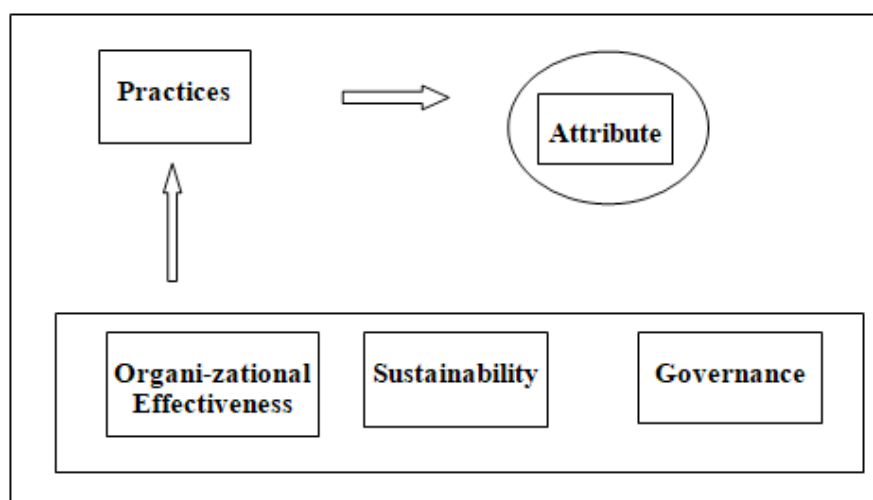
- pernyataan yang jelas mengenai struktur organisasi dan *job description*
- mekanisme yang efektif untuk integritas dan akuntabilitas

b. Keberlanjutan

- sumber pendanaan yang aman untuk menjamin keberlanjutan program
- program yang terus berjalan meskipun di dalam lingkungan yang tidak menguntungkan
- jaringan yang luas dan *partnership*

c. Efektivitas organisasi

- latar belakang sejarah
- visi, misi, dan tujuan yang jelas
- penerimaan sosial, kelayakan finansial, dan perencanaan strategis
- kompetensi peran agar organisasi dapat melaksanakan strategi secara efektif



Sumber: Lighid dan Satia, 2009

**Gambar 1** Kerangka Analisis/Penilaian Organisasi

d. Atribut

- keterlibatan yang berarti dan luas dengan MSM dan TG
- tanggapan pemerintah dan masyarakat terhadap organisasi dan kinerjanya.

*Metode Pengumpulan Data*

Studi ini dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperkaya analisis dan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan, observasi, FGD, dan reviu sejumlah dokumen. Sementara itu, secara kuantitatif, digunakan *check list* yang dikembangkan dari IOM dan PACT *Assessment Tools* (<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/164047/howdo/pactool.xls>). Hasil dari *check list* tersebut dianalisis dengan menghitung nilai dari setiap indikator untuk setiap organisasi. Hasil akhir untuk menilai *best practices* diperoleh berdasarkan data kualitatif yang ditriangulasi dengan penilaian secara kuantitatif.

Beberapa organisasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan merepresentasikan organisasi MSM dan TG dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keamanan dengan memperhatikan lama organisasi, kepengurusan, pendanaan, dan jaringan. Namun, pemilihan lembaga yang diteliti tidak dilakukan dengan sangat ketat dan memperhitungkan populasi. Di Indonesia, terpilih empat organisasi, yaitu Mediasi dan Hero yang berlokasi di Jakarta sebagai representasi lembaga yang mapan serta Seruling di Solo dan Setaman di Yogyakarta yang merepresentasikan lembaga dalam masa permulaan. Sementara itu, hanya ada satu organisasi terkait MSM yang peduli tentang HIV&AIDS untuk Timor Leste, yaitu Seruni yang berbasis di Dili. Untuk

kepentingan etika penelitian, nama-nama organisasi yang disebutkan tersebut bukan nama yang sebenarnya.

Wawancara dan FGD dilakukan terhadap staf manajerial dari setiap organisasi. Selain itu, wawancara dan FGD juga melibatkan beberapa penerima manfaat dari organisasi-organisasi tersebut. Kemudian untuk memperkaya data, juga dilakukan studi dokumen yang dimiliki oleh setiap organisasi, seperti akta pendirian, AD/ART, laporan tahunan, maupun dokumen lain yang menjabarkan visi misi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

*Konteks Lokal MSM dan TG*

a. Indonesia

Dalam konteks Indonesia, perilaku homoseksual di masyarakat nusantara dapat digolongkan dalam lima tipologi berikut ini (Oetomo, 2001).

- hubungan homoseksual yang dikenal dan diakui, misalnya *induk jawi* di masyarakat Minang, *mairilan* yang mengacu pada hubungan antarsantri di pondok pesantren Jawa, atau *dalaq* di Madura
- hubungan homoseksual yang dilembagakan dalam rangka pencarian kesaktian atau mempertahankan kesakralan. Contoh dari tipologi ini adalah hubungan *warok* di Ponorogo yang agar tetap sakti hanya boleh berhubungan seksual dengan *gemblak* yang seorang remaja laki-laki.
- perilaku homoseksual yang dikaitkan dengan jabatan sakral pelakunya, misalnya penjaga pusaka kerajaan yang disebut dengan *bissu* di Sulawesi Selatan

- perilaku homoseksual yang dijadikan bagian ritual inisiasi, misalnya pada beberapa suku di Papua ditemukan hubungan *genitor-oral* dan *genitor-anal* antara remaja laki-laki dan laki-laki dewasa sebagai bagian ritual inisiasi dalam rangka mencapai maskulinitas
- perilaku homoseksual yang dilembagakan dalam seni pertunjukan, misalnya seni pertunjukan kadang melibatkan pemeran yang menjalankan peran homoseksual, seperti pada tari Seudati (Aceh), pertunjukan lenong Betawi, atau ludruk.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada perbedaan cukup jelas antara transgender (yang biasa disebut waria) dan MSM. Waria adalah laki-laki yang berperilaku, berpenampilan (pakaian dan riasan), dan berganti nama dengan nama perempuan yang membuat mereka lebih terbuka tentang identitas seksual mereka. Sementara itu, MSM tetap dengan penampilan dan perilaku sebagai laki-laki, bahkan ada yang cenderung menonjolkan aspek maskulin secara fisik. MSM di Indonesia terdiri atas beberapa subkategori, seperti kaum gay serta laki-laki yang berhubungan seks dengan perempuan dan laki-laki lain (biseksual).

Kelompok MSM dan TG yang telah membuka identitasnya sering menerima pelanggaran-pelanggaran sebagai akibat dari pilihan mereka terhadap orientasi seksual yang dianggap berbeda. Kelompok LGBT sering menerima pelanggaran-pelanggaran terkait hak asasi manusia (HAM) karena orientasi seksual mereka yang dianggap berbeda (Ariyanto dan Triawan, 2008). Berbagai bentuk pelanggaran sering diterima oleh mereka, seperti stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Namun, negara seolah membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut

meskipun Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Kaum waria yang telah membuka identitasnya sering mendapat perlakuan diskriminatif di lingkungan sosial mereka, salah satunya adalah di lingkungan pendidikan. Perlakuan diskriminatif di sekolah berimbas terhadap tingkat pendidikan waria. Kebanyakan waria tidak mampu mencapai pendidikan tinggi karena mempertahankan penampilan dan identitas seksual mereka. Diskriminasi yang masih dialami oleh kelompok waria ini dipicu oleh adanya konstruksi sosial yang menganggap waria sebagai patologi sosial (Yuliani, 2006). Sebaliknya, kelompok MSM lebih diuntungkan dengan ketertutupan identitas dan upaya mempertahankan diri sebagai kelompok laki-laki. Dalam hal ini, kelompok gay dan biseksual masih tetap leluasa mengakses pendidikan formal dan pekerjaan, bahkan ada di antaranya yang melakukan pernikahan heteroseksual.

Berbagai stigma dan diskriminasi yang diterima oleh kelompok MSM dan TG ini pada gilirannya menjadikan mereka kelompok yang tertutup. Padahal pada sisi yang lain, kelompok MSM dan waria di Indonesia juga merupakan salah satu kelompok yang berisiko terhadap HIV&AIDS. Ketertutupan mereka ini menjadikan kelompok MSM dan TG sulit dijangkau untuk pencegahan HIV&AIDS. Berdasarkan studi Surveilans Terpadu Biologis Perilaku pada Kelompok Berisiko (STBP) tahun 2007, diketahui terdapat 35.000 waria di Indonesia. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan waria pekerja seks mencapai 34 persen di Jakarta, 28 persen di Surabaya, dan 16 persen di Bandung, serta kurang dari 50 persen di antara mereka yang menggunakan kondom. Kemudian diketahui

**Tabel 1 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS menurut Faktor Risiko, 2012 dan 2014**

<b>Faktor Risiko</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>
Heteroseksual	18680	34305
Homo-Biseksual	1014	1366
IDU	10265	8462
Transfusi Darah	73	130
Transmisi Perinatal	912	1506
Tidak diketahui	1153	9536

Sumber: Statistik Kasus HIV&AIDS di Indonesia s.d. Juni 2012 dan s.d. September 2014, Ditjen PP & PL Kemenkes RI (<http://spiritia.or.id/Stats/StatCurr.pdf>)

bahwa MSM berkontribusi 3,1 persen terhadap penyebaran HIV ([http://www.msngf.org/index.cfm/id/17/country\\_id/88](http://www.msngf.org/index.cfm/id/17/country_id/88)). Data dari Ditjen PP&PL Kemenkes RI pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sama dengan faktor risiko yang lain, faktor risiko homo-biseksual meningkat.

Sementara itu, jika mengaitkan kelompok LGBT dengan isu HIV&AIDS dianggap tidak seksi lagi. Besarnya perhatian terhadap kelompok LGBT memunculkan permintaan terhadap terpenuhinya hak asasi manusia. Namun, kegiatan-kegiatan mitigasi HIV&AIDS yang telah dilakukan terhadap kelompok ini telah menggembelng para LGBT untuk bertindak dan menuntut pengakhiran terhadap stigmatisasi dan diskriminasi pada mereka (Oey, 2012).

#### b. Timor Leste

WHO melaporkan terdapat sekitar 350 hingga 2.000 MSM/TG di Timor Leste. Sementara itu, hasil pemetaan di Dili pada 2008 menemukan 267 MSM yang telah terbuka dan masing-masing memiliki jaringan dengan MSM yang masih tertutup

sebagai pasangan sehingga diestimasikan terdapat sekitar 500 MSM di Dili (<http://aidsdatahub.org/en/timor-leste-reference-library/item/18306-timor-leste-msm-country-snapshots>). Informasi mengenai keberadaan MSM dan TG di Timor Leste diperoleh secara *snowball* berdasarkan informasi dari MSM yang telah secara terbuka mendeklarisasikan jati dirinya. Selain variasi antara MSM yang telah terbuka dan *hidden* MSM, juga terdapat keunikan dalam menyebut istilah TG. Berdasarkan wawancara dengan aktivis NGO, diketahui bahwa TG lebih digunakan untuk menyebut mereka yang telah memasang implan payudara meskipun kelompok ini sangat terbatas jumlahnya. Kemudian mereka yang tidak melakukan implan payudara lebih merasa nyaman dengan sebutan MSM. Dengan demikian, sangat jarang TG atau MSM yang berpenampilan seperti perempuan dijumpai di tempat umum karena masyarakat Timor menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Kalaupun ada TG yang berpenampilan layaknya perempuan, biasanya mereka ditemukan di acara-acara yang diadakan untuk kelompok MSM dan TG.



## *Tekanan Sosial terhadap MSM dan TG*

### a. Indonesia

Meskipun penerimaan terhadap kelompok minoritas seksual di Indonesia telah banyak didiskusikan sejak tahun 1990-an (Oetomo, 2001), keberadaan kelompok ini tetap mengundang kontroversi, apalagi kalau harus muncul di tempat-tempat umum. Kaum gay dan waria masih sering dianggap sebagai kelompok dengan “penyakit moral” atau komunitas yang “rusak” sehingga perlu “diperbaiki”. Berbagai tindak kekerasan terhadap kaum gay dan waria berpangkal dari pendapat bahwa satu-satunya seksualitas yang dapat diterima adalah heteroseksualitas atau hubungan antara mereka yang berbeda jenis kelamin (<http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/partners/236.html>).

Sementara itu, menurut Mulia (2008), stigma yang diberikan kepada kelompok homoseksual –gay atau lesbi- sering juga menggunakan dalih agama. Kelompok ini dipandang sebagai kelompok immoral, tidak religius, haram, penyakit sosial, menyalahi kodrat, dan bahkan dituduh sebagai sekutu setan. Dalam komunitas muslim arus utama, penolakan terhadap homo dipandang mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Stigma dan diskriminasi yang sangat kuat terhadap gay, waria, dan ODHA merupakan penyebab utama kurangnya program yang responsif terhadap HIV&AIDS bagi kaum homoseksual di Indonesia ([www.it'smylifecolub.co](http://www.it'smylifecolub.co)). Kondisi ini ditengarai menjadi penyebab tidak berkembangnya organisasi yang menjangkau kaum gay dan waria jika dibandingkan dengan CBO yang bergerak isu-isu yang lain, misalnya isu gender dan kesehatan reproduksi.

Namun, tekanan dan kelonggaran yang diberikan kepada kelompok MSM dan TG di

Indonesia cukup bervariasi. Secara umum, penerimaan masyarakat terhadap keberadaan kelompok waria lebih terbuka dibandingkan dengan kelompok gay. Hal ini juga yang menyebabkan lebih mudahnya dijumpai waria yang secara ekspresif menunjukkan identitas seksualnya dibandingkan dengan kaum gay yang cenderung lebih tertutup. Selain itu, kondisi masyarakat dan sistem pemerintahan lokal di Indonesia yang beragam juga memberikan tekanan dan kelonggaran tersendiri bagi eksistensi kelompok waria dan gay, termasuk akses terhadap pelayanan publik, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.

### b. Timor Leste

Meskipun diketahui bahwa keberadaan MSM di Timor Leste diakui oleh pemerintah - seperti dilaporkan oleh WHO (2010), di Timor Leste hubungan seks di antara laki-laki dewasa adalah legal - belum ada peraturan yang secara khusus melindungi MSM dan TG. Pada September 2009, Pemerintah Timor Leste menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang meningkatkan penerimaan pemerintah terhadap keberadaan kelompok MSM dan TG. Bentuk penerimaan terhadap MSM secara langsung dapat dilihat dari pelibatan kelompok MSM dalam acara-acara formal kenegaraan, seperti sebagai pembawa acara, pengisi acara hiburan, ataupun sebagai pembuat dekorasi acara. Sementara itu, pengakuan pemerintah terhadap organisasi yang memiliki program untuk MSM, seperti Seruni, dapat dilihat dari dukungannya terhadap program HIV&AIDS untuk kelompok MSM. Kementerian Kesehatan merupakan lembaga pemerintah yang utama dalam pengorganisasian, implementasi, dan memonitor program HIV&AIDS di Timor Leste. Seruni menggunakan bendera HIV&AIDS

dalam bekerja sama dengan pemerintah karena sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberantas HIV&AIDS.

Meskipun tidak secara tegas menerima keberadaan MSM, gereja di Timor Leste juga tidak menolak eksistensi MSM. Untuk aktivitas gereja, dengan masyarakat di Timor Leste yang dikenal sebagai penganut Katolik konservatif, bahkan MSM telah dilibatkan dalam paduan suara gereja. Berdasarkan pengakuan informan MSM, dalam khotbah di gereja pun, pastor tidak pernah menyinggung atau menghakimi keberadaan MSM di Timor Leste.

Masyarakat juga cenderung permisif yang dibuktikan dalam acara seremonial, seperti pesta perkawinan, hampir semua kegiatan dipegang oleh MSM, seperti sebagai pembuat dekorasi acara, jasa katering, pemandu acara, dan pengisi acara hiburan. Alasannya sederhana: kelompok MSM dianggap sangat terampil menjalankan urusan-urusan terkait keindahan, kesenian, dan makanan.

Penerimaan pemerintah, gereja, dan masyarakat terhadap MSM di Timor Leste ini merupakan modal penting untuk mencegah HIV&AIDS pada salah satu kelompok yang berperilaku seksual berisiko ini. Koeswinarno (2005) menjelaskan bahwa waria diterima atau ditolak di dalam masyarakat akan sangat ditentukan dari cara mereka membangun negosiasi dengan masyarakat untuk menjadi bagian dari lingkungan sosial tersebut. Keputusan masyarakat untuk menolak atau menerima kehadiran waria pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan seorang waria, baik secara individual maupun kolektif, dalam merepresentasikan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini TG di Timor Leste mampu bernegosiasi dengan lingkungan sekitar sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat.

Meskipun keberadaan MSM di Timor Leste pada umumnya dapat diterima, mereka tidak dapat lepas dari stigma. Stigma yang menonjol adalah adanya terminologi yang berasal dari bahasa Tetum (bahasa di Timor Leste) yang merujuk pada MSM, yaitu *panlero* yang berarti laki-laki setengah perempuan. Jika ada orang yang memanggil mereka dengan sebutan *panlero*, mereka tidak dapat menerimanya atau marah karena bermakna negatif dan dianggap sebagai sebuah ejekan. Bentuk lain dari stigma terhadap MSM adalah adanya anggapan di masyarakat bahwa mereka tidak mau berdekatan dengan MSM karena takut tertular menjadi MSM. Stigma ini membuat banyak MSM belum mau terbuka terhadap identitasnya.

#### *Strategi Bertahan Organisasi yang Bekerja untuk MSM dan TG*

##### a. Indonesia

Ada beberapa variasi strategi yang diterapkan oleh organisasi MSM dan TG di Indonesia untuk dapat bertahan. Strategi ini merupakan upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan (Goh, 1998 dan Sulaiman, 2014) dan salah satu caranya adalah mengembangkan jaringan dengan organisasi sejenis. Hal yang sangat menonjol dalam konteks organisasi di Indonesia adalah kuatnya dukungan dari sebuah lembaga yang memayungi semua organisasi gay, waria, dan lesbian di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, sebagai organisasi yang menginisiasi jejaring di antara organisasi yang bergerak dalam isu MSM dan TG di Indonesia.

Strategi bertahan dengan berjejaring, baik secara lokal, nasional, maupun internasional, juga sejalan dengan laporan UNDP dan USAID (2014). Dijelaskan bahwa sejumlah

organisasi secara sistematis berupaya membina komunitas dan jaringan di dalam kota atau kabupaten/provinsi yang sama, bahkan secara nasional. Organisasi gay telah memfasilitasi pembentukan organisasi gay lainnya dan kadang-kadang juga organisasi waria atau organisasi lesbian dan pria transgender.

Kuatnya jejaring yang dikembangkan ini menunjukkan hasil yang cukup positif. Sebagai contoh adalah Mediasi dan Hero yang mengakui bahwa jejaring yang dibangun di antara organisasi yang ada sangat membantu mereka bertukar pengalaman dan saling mendukung kegiatan masing-masing. Selain mendapatkan manfaat untuk saling mendukung dalam jejaring ini, Seruling dan Hero juga menjadi *implementing partner* bagi GWL-INA untuk menjalankan aktivitasnya di daerah mengingat GWL-INA berbasis di Jakarta dengan jangkauan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Seruling mengembangkan jejaring tersebut secara lebih luas dan hasilnya telah tampak saat ini ketika Seruling mampu memotivasi kelompok MSM dan/atau TG untuk berorganisasi di beberapa tempat.

Meskipun telah memiliki jejaring yang kuat, untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dan mendapatkan dana, mereka harus bersembunyi di balik organisasi yang berlabel "organisasi yang peduli dengan HIV&AIDS". Mereka tidak berani secara terbuka mengatasmakan diri sebagai organisasi khusus MSM dan TG karena masih kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap kedua kelompok ini.

#### (1) *Governance* (Tata Kelola)

Dua organisasi yang fokus pada isu TG, yaitu Hero dan Setaman, menunjukkan bahwa mereka harus berjuang keras

melawan stigma dari masyarakat sekitar. Hal ini mereka siasati dengan menunjukkan identitas mereka secara terbuka sebagai TG dan selalu memberi edukasi kepada masyarakat sekitar tentang hak-hak TG dan peran TG dalam pembangunan. Kedua organisasi ini menerapkan prinsip *good corporate governance* seperti yang dijelaskan oleh Syakhroza (2008), yaitu tata kelola organisasi yang baik menyangkut mekanisme mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Strategi yang dilakukan oleh Setaman dan Hero adalah melibatkan TG dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat secara luas kepada masyarakat, seperti program *income generating*, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan kesenian yang tidak hanya untuk TG, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Dengan fokus program yang melibatkan masyarakat sekitar tersebut, penerimaan masyarakat terhadap kaum TG menjadi semakin baik dan kapasitas TG dapat lebih berkembang. Hal ini juga dilakukan oleh Seruling. Dengan identitas diri yang sangat terbuka (sebagai gay), Ketua Seruling mampu memberi pemahaman kepada berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah daerah terhadap eksistensi atau keberadaan kaum gay di wilayah Solo dan sekitarnya.

#### (2) Efektivitas Organisasi

Mediasi, Seruling, maupun Setaman telah mampu menyusun berbagai dokumen yang diperlukan untuk menunjang eksistensinya sebagai sebuah organisasi. Hal ini tampak ketika organisasi memperoleh dana untuk membiayai suatu program atau kegiatan. Untuk memenuhi standar penyusunan dokumen, seperti rencana kegiatan tahunan maupun sistem pelaporan, termasuk laporan keuangan, berbagai upaya

dilakukan, misalnya mengikuti pelatihan khusus maupun belajar secara mandiri kepada para ahli atau pihak lain yang lebih menguasainya.

Kondisi ini tidak terlepas dari latar belakang para pengurus yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi dalam mengelola organisasi, padahal mereka tidak selalu memperoleh insentif atau gaji tetap. Kemauan yang besar untuk dapat mencapai tujuan organisasi ini sesuai dengan konsep efektivitas organisasi menurut Tangkilisan (2005), yaitu efektivitas organisasi menyangkut cara mewujudkan tujuan organisasi.

Adanya rencana kegiatan yang selalu disusun menunjukkan keseriusan organisasi dalam menangani permasalahan yang dihadapi kelompok dampingannya. Hal ini pada gilirannya dapat memunculkan respons pemerintah yang ditunjukkan dengan berbagai aksi, seperti pemberian program pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gratis, termasuk obat-obatan dan pembagian kondom gratis. Dalam beberapa kesempatan, pengurus organisasi juga dilibatkan dalam pembahasan atau penyusunan rencana strategis dinas/instansi terkait di tingkat pemerintah lokal.

### (3) Keberlanjutan

Mediasi, Hero, Seruling, dan Setaman menjaga eksistensi organisasi demi keberlanjutan program dengan terus memelihara jejaring dengan GWL-INA. Relasi dengan pihak pemerintah dan lembaga donor asing juga terus dimantapkan untuk mengakses dana. Selain itu, penggalangan dana juga dilakukan secara internal melalui iuran sukarela atau dengan cara menyisihkan 10 persen dari uang gaji dan honor yang mereka terima ketika mengikuti pelatihan atau seminar untuk lembaga/organisasi.

### (4) Atribut

Kualitas pencapaian mencerminkan seberapa jauh struktur organisasi, program, kegiatan, dan jejaring yang dimiliki oleh suatu organisasi berdampak secara internal maupun eksternal. Setaman berhasil membangun jejaringan dengan berbagai pihak, seperti organisasi lain, pihak akademisi, pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, keberadaan Setaman sangat dikenal dan tidak lagi dianggap sebagai organisasi yang harus di jauhi atau diperlakukan secara diskriminatif. Banyak mahasiswa yang menyusun skripsi atau tesis dengan mengangkat masalah TG mengambil Setaman sebagai studi kasus dan narasumber. Hal ini karena mereka melihat keberhasilan program dan manajemen organisasinya. Setaman juga berhasil meyakinkan pemerintah bahwa kelompok TG patut mendapat perhatian yang sama dengan kelompok masyarakat yang lain sehingga program pemberdayaan khusus untuk kelompok TG juga mendapat porsi anggaran tertentu di pemerintah daerah. Selain itu, Setaman dikenal oleh kelompok TG di seluruh wilayah Jawa dan luar Jawa sebagai organisasi atau lembaga yang mempunyai kepedulian paling tinggi dalam penanganan HIV&AIDS. Hal ini terkait dengan akses Setaman dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pihak Pemerintah Kota Yogyakarta.

### b. Timor Leste

Jika organisasi-organisasi di Indonesia mengembangkan strategi bertahan dengan menguatkan jejaring, organisasi di Timor Leste melakukan hal yang berbeda karena belum banyak organisasi sejenis di wilayah tersebut. Organisasi di Timor

Leste menggunakan pendekatan dukungan pemerintah dan lembaga donor sebagai strategi untuk bertahan. Namun, organisasi ini juga masih harus berlandung di bawah 'bendera' HIV&AIDS untuk mendapatkan dana dari lembaga donor dan dapat bekerja sama dengan pemerintah. Sementara itu, penerimaan masyarakat terhadap kelompok MSM dan TG juga lebih terbuka dibandingkan dengan di Indonesia sehingga organisasi di Timor Leste juga dapat lebih terbuka.

(1) *Governance* (Tata Kelola)

Sebagai satu-satunya organisasi yang bergerak dalam isu HIV&AIDS dengan sasaran utama kelompok MSM dan TG, Seruni mampu bekerja sama dengan sangat baik dengan pemerintah nasional dan kota. Legalitas keberadaan MSM di Timor Leste, seperti yang dilaporkan WHO dalam TREAT (2006), tampak dari pengakuan pemerintah pada organisasi ini sebagai bagian dari sasaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara empiris, ada pelibatan MSM dan TG dalam kegiatan formal, bahkan acara kenegaraan merupakan salah satu modal penting yang dimiliki oleh MSM dan TG di Timor Leste. Polisi dan pihak militer merupakan unit pengamanan yang juga dilibatkan sebagai sasaran dalam program sehingga secara umum kegiatan-kegiatan Seruni memperoleh jaminan keamanan.

Secara internal, organisasi ini juga telah memenuhi aspek-aspek organisasi yang penting dengan adanya struktur pengurus, sistem keuangan teraudit, jaminan sosial bagi pengurus dan aktivis, serta jaringan yang baik dengan mitra dan benefisiaris. Struktur organisasi Seruni terdiri atas struktur keanggotaan dan jajaran eksekutif. Kejelasan struktur ini kemudian diterjemahkan menjadi

pembagian kerja untuk setiap komponen. Seruni juga memiliki sistem *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja staf dan capaian program yang dijalankan dengan baik karena program evaluasi dilakukan secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Sementara itu, urusan keuangan juga telah dikelola dengan sistem akuntansi dan pengelolaan yang terstruktur, serta ada audit yang rutin. Audit keuangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara kuartalan dan tahunan karena selama ini Kementerian Kesehatan menjadi PR (*Principle Recipient*) dari *Global Fund*, sedangkan Seruni merupakan SR (*sub-recipient*).

(2) Efektivitas Organisasi

Seruni telah berhasil menunjukkan bahwa program yang baik dan tepat seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dimiliki tiap komunitas sasaran. Sebagai contoh *best practices* adalah sosialisasi tentang HIV&AIDS yang dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi tempat indekos atau tempat kerja para MSM dan TG. Selain itu, Seruni selalu mengadakan kegiatan yang bersifat menyenangkan untuk menjangkau MSM dan TG, misalnya melalui kegiatan lomba dansa dan peragaan busana yang dilakukan hingga ke desa-desa. Hal ini menjadi nilai tambah Seruni dalam menjangkau target karena masih banyak MSM dan TG tertutup.

Secara praktis, Seruni terus berupaya untuk menggunakan beberapa pendekatan demi mengamankan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari target layanan di tengah lingkungan sosial yang kurang mendukung. Cara yang digunakan adalah menggabungkan layanan-layanan langsung, seperti tindakan preventif, VCT, dan pendampingan, dengan kebijakan

advokasi, aktivitas penyadaran publik, dan upaya sensitivitas. Upaya yang dilakukan oleh Seruni ini seperti yang dijelaskan oleh Tangkilisan (2005) dan Sedarmayanti (2009) mengenai efektivitas organisasi sebagai tingkat keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan.

Kegiatan praktis yang cukup efektif karena mampu menjangkau sasaran di tempat yang tepat adalah dengan menyediakan seks aman untuk MSM dan TG melalui program *Dispenser Condom*. Layanan yang diletakkan di semua hotel di Dili serta di semua tempat indekos MSM dan TG diharapkan dapat menjadi media preventif terhadap HIV&AIDS. Kelebihan program ini adalah adanya dukungan pemerintah dan aparat keamanan, suatu hal yang sangat jarang terjadi di negara/daerah lain. Aparat, bahkan mempunyai kewenangan untuk menegur pengelola hotel yang tidak menyediakan layanan kondom gratis ini.

### (3) Keberlanjutan

Di Timor Leste, institusi yang peduli dengan isu HIV&AIDS tidak memiliki hambatan berhubungan dengan lembaga donor. Berdasarkan penjelasan dari Program Manager Seruni, sebenarnya banyak lembaga donor yang menawarkan dana di Timor Leste, tetapi kapasitas staf di Seruni agak terbatas. Hal ini menyebabkan Seruni tidak berkesempatan untuk bekerja sama dengan lebih dari satu lembaga donor. Sejak 2009 hingga 2015, Seruni didukung oleh Global Fund yang merupakan *sub-recipient* untuk memerangi AIDS, Tuberculosis, and Malaria (GFATM) untuk Round 10 sejak 2012. GFATM menyediakan dana untuk Seruni dalam program perubahan perilaku terkait isu HIV melalui Kementerian Kesehatan yang

merupakan *principal recipient* dari GFATM.

Untuk memastikan keberlanjutan program, Seruni memiliki relawan di setiap desa. Relawan didukung oleh staf lapangan untuk menjangkau MSM di desa yang tampaknya masih resisten terhadap jati dirinya dan terhadap MSM dan TG sendiri. Seperti telah dijelaskan, masyarakat di desa-desa pada umumnya masih resisten terhadap MSM dan TG karena mereka memiliki ketidakpahaman serta stigma terhadap MSM dan TG. Meskipun ketidakpahaman berdampak pada diskriminasi dan kekerasan terhadap MSM dan TG di masyarakat, sejauh ini staf lapangan dan relawan Seruni masih dapat melakukan kegiatannya dengan cukup teratur.

### (4) Atribut

Mengacu teori Lighid dan Satia (2009), atribut dinilai berdasarkan unsur keterlibatan anggota dan tanggapan pemerintah terhadap keberadaan organisasi. Dalam konteks lokal Kota Dili dan nasional negara Timor Leste, Seruni merupakan satu-satunya organisasi yang berpartner dengan pemerintah untuk menanggulangi HIV&AIDS di negara tersebut. Pencapaian kualitas organisasi, baik secara kelompok maupun individu, juga tercermin dari posisi dan peran penting aktivis organisasi ini dalam badan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu National AIDS Commission (NAC). Sebagai organisasi yang tergolong masih baru dan berasal dari negara yang baru pula, Seruni aktif mengirim perwakilan untuk mengikuti kegiatan berskala internasional, seperti seminar dan *workshop*. Dengan demikian, nama Seruni menjadi lebih dikenal di kancah internasional sebagai salah satu upaya membangun jaringan internasional.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### *Kesimpulan*

Secara umum, penerimaan sosial terhadap individu atau organisasi MSM dan TG cukup baik meskipun mereka belum secara terbuka menyatakan diri sebagai organisasi yang mewadahi MSM dan TG. Pada umumnya organisasi-organisasi ini lebih memilih berlindung di bawah label HIV&AIDS agar mereka lebih leluasa bergerak dan mengimplementasikan program pengurangan dampak HIV&AIDS kepada kelompok MSM dan TG. Hal ini karena penerimaan yang relatif terbuka dari pemerintah maupun masyarakat terhadap kelompok ini ternyata masih dibayangi oleh stigma terhadap MSM dan TG. Organisasi masih menghadapi kondisi yang tidak aman ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan penegakan moral.

Sementara itu, secara legal, Timor Leste mengakui hubungan seks sesama laki-laki, sebuah kondisi yang memberikan kenyamanan untuk MSM/TG. Di Indonesia, meskipun ada kelompok garis keras yang menolak, masyarakat masih memberikan atmosfer yang relatif nyaman untuk MSM dan TG. Keberadaan TG lebih diterima dibandingkan dengan gay dan situasi ini memengaruhi perbedaan individu maupun kelompok MSM dan TG dalam hal keberanian untuk muncul di publik.

Tata kelola atau *governance* mencakup peran yang memadai bagi sumber daya dan sistem untuk mendukung kinerja, integritas, dan akuntabilitas organisasi. Dengan membandingkan aspek *governance* organisasi MSM dan TG yang ada di Indonesia dan Timor Leste, indikator tata kelola menunjukkan bahwa struktur organisasi berhasil dibangun untuk menjaga pembagian

tugas dan mekanisme kontrol. Namun, dalam praktik organisasi tampak adanya permasalahan dengan aspek kepemimpinan dan pembagian kekuasaan yang menjadi tantangan bagi organisasi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan di Timor Leste yang menunjukkan bahwa satu-satunya organisasi MSM dan TG yang ada telah terorganisasi dengan baik.

Baik di Indonesia maupun Timor Leste, sebenarnya suatu organisasi dimungkinkan untuk menyatakan diri secara jelas sebagai organisasi MSM atau TG. Kejelasan identitas suatu organisasi sangat bermanfaat dalam upaya menjalankan program dan kegiatan karena dukungan – dan penolakan - terhadap program dan kegiatan tersebut akan menjadi jelas juga. Hal ini telah dialami oleh MSM dan TG di Indonesia, tetapi satu-satunya organisasi yang bekerja untuk MSM dan TG di Timor Leste, yaitu Seruni, masih berlabel organisasi HIV&AIDS.

Aksesibilitas terhadap lembaga donor di Indonesia cukup baik karena organisasi diperbolehkan mengajukan dan mengatur sendiri dana yang diperoleh dari lembaga donor. Sementara itu, di Timor Leste, organisasi tidak dapat leluasa mengakses dana karena status Seruni adalah sebagai *sub-recipient* di bawah Kementerian Kesehatan yang menjadi *principal recipient*. Organisasi di Indonesia memiliki aksesibilitas langsung terhadap lembaga donor, tetapi tidak otomatis memudahkan organisasi mendapatkan kucuran dana. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya organisasi yang membutuhkan dana, sedangkan lembaga-lembaga donor yang ada tidak mampu memenuhi semua permintaan sehingga terjadi kompetisi yang tinggi di antara organisasi MSM dan TG maupun organisasi lain.

Adanya GWL-INA yang merupakan konsorsium untuk MSM dan TG di Indonesia

merupakan upaya strategis dalam hal jejaring, keuangan, dan pengakuan sosial. Hambatan mendasar dalam aspek keberlanjutan organisasi MSM dan TG di Indonesia adalah kapasitas staf yang rendah dan penerima manfaat yang juga terbatas kapasitasnya untuk menciptakan program yang dapat meningkatkan keuangan organisasi dan sekaligus meningkatkan kapasitas dan potensi sumber daya manusia.

### Rekomendasi

Adanya stigma dan diskriminasi terhadap kelompok MSM dan TG berdampak pada terbatasnya ruang gerak organisasi. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara kebutuhan terhadap pelayanan serta terbatasnya dukungan dan peningkatan kegiatan untuk mengurangi prevalensi HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG. Secara umum, rekomendasi untuk pemerintah terbagi dalam dua hal berikut.

Pertama, meningkatkan dukungan politik dan finansial kepada MSM dan TG, baik secara individu maupun organisasi. Kedua, memberikan perlindungan kepada individu dan organisasi MSM dan TG dengan kerangka hak asasi manusia.

Secara khusus, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan komitmen untuk memenuhi hak sipil bagi MSM dan TG dengan desain skema bantuan dan alokasi anggaran untuk memberdayakan organisasi MSM dan TG. Yang lebih penting adalah melindungi individu dan kelompok ini dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu. Hal ini juga berlaku untuk MSM dan TG di Timor Leste. Meskipun MSM dan TG di Kota Dili dapat menikmati kondisi yang relatif lebih baik, mereka yang tinggal di perdesaan

masih membutuhkan pengakuan dan jangkauan pelayanan. Perlindungan dan jaminan keamanan dari tindakan diskriminatif terhadap individu dan organisasi MSM dan TG diharapkan dapat memberi keleluasaan untuk pengembangan potensi dan kapasitas yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya prevalensi HIV&AIDS di kalangan kelompok MSM dan TG maupun masyarakat umum.

### Daftar Pustaka

- Ariyanto dan Triawan, Rido. 2008. *Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Yogyakarta: Arus Pelangi dan Yayasan Tifa.
- Capriati, Wigke dan Permana, Yogi Setya. 2008. "Gerak Progresif Gerakan Gay Kontemporer di Yogyakarta" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12 (1), 59-77, Juli.
- Colonne, Stevanus dan Eliana, Rika. 2005. "Gambaran Tipe-tipe Konflik Interpersonal Waria Ditinjau dari Perspektif Gender" dalam *Psikologia*, VI (2), 96-104, Desember.
- Fahamu. 2004. "Community Based Organisations: The Emerging Force within the Third Center". Fahamu Oxford and Durban, and Center for Adult Education South Africa". Diunduh dari <http://www.fahamu.org/downloads/CBOSurveyReport.pdf>.
- Goh, Swee C. 1998. "Toward a Learning Organization: The Strategic Building Blocks". *Sam Advanced Management Journal*. Faculty of Administration, University of Ottawa.
- Hartiti, Tri, Riwayati, dan Arif Sofyan. 2010 "Manajemen Kasus HIV AIDS terhadap Kualitas Hidup ODHA Waria di LSM Graha Mitra Semarang" dalam *Jurnal Fikkas Unimus*, 03 (01), 45-54, Maret.



- HIV and AIDS Data Hub for Asia-Pacific. 2011. "Asia-Pacific Country Reviews August 2011: Timor Leste at A Glance". Source: <http://aidsdatahub.org/en/timor-leste-reference-library/item/18306-timor-leste-msm-country-snapshots>.
- Koeswinarno. 2005. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lighid, Elmer Herradura dan Satia, Jay. 2009. *Achieving Excellence in Your NGO: Concept, Framework, Assessment Instruments, and Intervention Tools*. International Council on Management of Population Programmes.
- Mulia, Musdah. 2008. "Adakah Islam Bicara Soal Homo?" dalam *Madina*, 6 (1), 90-92. Juni 2008.
- Oetomo, Dede. 2001. *Memberi Suara pada yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press.
- OECD. 2006. "DAC Guidelines and Reference Series Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-operation, OECD, Paris". Diunduh dari <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7231>.
- Oey, King. 2012. "When Talking of TGBT, Whose Moral Authority Counts?" Paper dipresentasikan pada the Second International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia (SEAHRN); 17-18 Oktober 2012, Jakarta.
- O'Flaherty, Michael and Fisher, John. 2008. "Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualizing the Yogyakarta Principles" dalam *Human Rights Law Review*. Published by Oxford University Press.
- Philippine National AIDS Council. 2012. "Global AIDS Response Progress Report" diunduh dari <http://aidsdatahub.org/en/reference-librarycols2/item/24189-ungass-country-progress-report-philippines-philippine-national-aids-council-2012>.
- Putri, Madha Tresnowaty dan Sutarmanto, Hadi. 2009. "Kesejahteraan Subjektif Waria Pekerja Seks Komersial (PSK)" dalam *Psikohumanika*, II (2), 46-55, Februari.
- Rahardjo, Wahyu. 2009. "Homophobia dan Kita" dalam *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14 (1), 11-23, Juni.
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syakhroza, Ahmad. 2008. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
- Sulaiman, Aimie. 2014. "Strategi Bertahan (Survival Strategy); Studi Tentang "Agama Adat" Orang Lom" dalam *Jurnal Society*, II (1), 1-14.
- Suwarti. 2009. "Strategi Coping Waria dalam Menghadapi Kecemasan Terjangkit HIV&AIDS di Purwokerto" dalam *PSYCHO IDEA*, 7 (1), 35-47, Juli.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Teh, Kooch Y. 2008. "HIV-related needs for safety among male-to-female transsexuals (mak nyah) in Malaysia" dalam SAHARA J. 2008 Dec; 5(4):178-85. Diunduh dari <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19194599>.
- The Global Fund. 2008. *The Global Fund Gender Equality Strategy*. Geneva: The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
- TREAT ASIA. 2006. "MSM and HIV&AIDS risk in Asia: what is fueling the epidemic among MSM and how can it be stopped?" *Amfar Special Report*. Bangkok.
- UNAIDS. 2006. "Consultative Meeting MSM and HIV&AIDS in the Philippines". Diunduh dari <http://lagablab.files.wordpress>.

com/2006/08/msm-consultation-overview-unaid-philippines-aug-2006.pdf.

- UNAIDS. 2009. "Philippines Country Report". Diunduh dari [http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knownyourresponse/countryprogressreports/2010countries/philippines\\_2010\\_country\\_progress\\_report\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knownyourresponse/countryprogressreports/2010countries/philippines_2010_country_progress_report_en.pdf).
- UNDP dan USAID, 2014. *Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia*. Jakarta.
- UNECA. 2007. *National Information and Communication Infrastructure (NIC) e-Strategies: Best Practices and Lesson Learnt*. United Nation Economic Commission for Africa.
- UNGASS. 2012. *UNGASS Country Progress Report: Philippines*.
- WHO. 2010. *HIV&AIDS among Men who have Sex with Men and Transgender Population in Southeast Asia: the Current Situation and National Responses, WHO Regional Office for Southeast Asia*.
- Yuliani, Sri. 2006. "Menguak Konstruksi Sosial di Balik Diskriminasi terhadap Waria" dalam *Jurnal Sosiologi Dilema*, 18 (2), 129-140.

**SMART FERT: APLIKASI PRAKTIS, VALID, DAN MUDAH UNTUK MENGUKUR INDIKATOR FERTILITAS DI ERA OTONOMI DAERAH**

Lutfi Agus Salim<sup>1</sup>, Hari Kusnanto<sup>2</sup>, Lutfan Lazuardi<sup>2</sup>, dan Kuntoro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya, <sup>2</sup>Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Lutfi Agus Salim (*e-mail*: lutfi.as@fkm.unair.ac.id / lut\_unair@yahoo.com)

**Abstrak**

Indikator fertilitas, seperti Crude Birth Rate (CBR), Total Fertility Rate (TFR), General Fertility Rate (GFR), dan Gross Reproductive Rate (GRR), untuk mengukur kinerja pengendalian penduduk setiap tahun di level kabupaten/kota sejak otonomi daerah sering tidak tersedia. Aplikasi sistem informasi fertilitas *Smart Fert* sebagai alat untuk mengukur indikator fertilitas yang praktis, valid, dan mudah diaplikasikan sangat layak untuk dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi *Smart Fert* serta menguji hasil perhitungan indikator fertilitas dari aplikasi *Smart Fert* dibandingkan dengan perhitungan dari hasil Sensus Penduduk 2010. Penelitian ini merancang aplikasi *Smart Fert* berbasis bahasa *visual basic*. Untuk mengukur ketepatan dan kevalidan hasil perhitungan fertilitas dari aplikasi *Smart Fert*, maka hasilnya dibandingkan dengan standar yang baik, yaitu hasil Sensus Penduduk 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan fertilitas dengan aplikasi *Smart Fert* tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan hasil metode langsung Sensus Penduduk 2010. Dengan demikian, aplikasi *Smart Fert* dapat dipakai sebagai alat penghitung indikator fertilitas yang praktis, valid, dan mudah diimplementasikan untuk mengukur kinerja pengendalian penduduk di tingkat kabupaten/kota.

**Kata kunci:** Perhitungan Indikator Fertilitas, Aplikasi *Smart Fert*, Pengendalian Penduduk

**SMART FERT: THE PRACTICAL, VALID AND EASY APPLICATION TO MEASURE FERTILITY INDICATORS IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY**

**Abstract**

Fertility indicators, such as Crude Birth Rate (CBR), Total Fertility Rate (TFR), General Fertility Rate (GFR), Gross Reproductive Rate (GRR) to measure the performance of population control each year at the district level since regional autonomy are often unavailable. Smart Fert fertility information system application development as a tool to measure fertility indicators that are practical, valid, easy to apply is very feasible to be made. The purpose of this research is to develop an application and to test the measurement results the fertility indicators by the Smart

Fert application compare with the measurement results by 2010 Population Census data. This research is a set of Smart Fert applications based on visual basic language. To check the accuracy of Smart Fert's indirect method, comparison would be made with the measurement results by 2010 Population Census data. The result showed that fertility measurement results by Smart-Fert application was not significantly different with the measurement result by 2010 Population Census data. Thus Smart Fert application could be used as a valid, practical, easy to implement to measure fertility indicators tool to measure the performance of population control at the district/city level.

**Keywords:** Measurement of Fertility Indicators, Smart Fert application, population control

## Pendahuluan

Indikator fertilitas di tingkat nasional dan provinsi biasanya tersedia dengan baik seiring dengan kegiatan sensus penduduk dan survei, seperti SDKI, Susenas, dan Survei RPJMN. Indikator fertilitas hasil olahan Sensus Penduduk tercatat sangat baik sampai tingkat kabupaten/kota, tetapi kelemahannya adalah Sensus Penduduk dilaksanakan hanya sepuluh tahun sekali. Padahal, dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah untuk urusan pengendalian penduduk, sangat mendesak dibutuhkan ketersediaan indikator fertilitas setiap tahun untuk bahan perencanaan dan mengukur kinerja pengendalian penduduk. Namun, pada kenyataannya, indikator fertilitas di tingkat kabupaten/kota, apalagi tingkat kecamatan sangat jarang tersedia.

Berbagai metode perhitungan fertilitas telah banyak ditemukan oleh banyak ahli demografi dan lembaga kependudukan, baik metode langsung maupun metode tidak langsung, seperti metode Anak Kandung, metode *Reverse Survival Ratio*, metode Riwayat Kehamilan, dan metode Rele (UN Manual X, 1983), (UN Manual IV, 1967), (Barclay, 1970), (Bogue, 1971), (Iskandar, 1977), (Kasto, 1995), (Nilakusmawati, 2009),

(Lembaga Demografi, 1981). Namun, bagi tingkat kabupaten/kota, dirasakan metode tersebut kurang aplikatif karena berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan alat (aplikasi), data, metode dan kemampuan petugas.

Sampai saat ini telah ada *software* atau aplikasi perhitungan indikator fertilitas yang dikembangkan oleh lembaga internasional, misalnya *software* Mortpak for Windows (UN, 2003) dan *software* EastWestPop (East West Center Research Program, 1992). *Software* tersebut terdiri atas beberapa modul, misalnya untuk menghitung indikator fertilitas dengan *software* Mortpak for Windows, digunakan modul FERTPF dan FERTCB. Sementara itu, semua modul *software* EastWestPop digunakan untuk menghitung fertilitas.

Sampai saat ini data registrasi vital kelahiran belum tersedia dengan baik karena kurang sadarnya penduduk melaporkan kelahirannya di awal tahun. Namun, untuk umur di atasnya (umur lima tahunan), data telah tersedia dengan baik sampai tingkat kabupaten/kota, bahkan kecamatan yang dapat dipakai untuk menghitung fertilitas metode tidak langsung. Salah satunya adalah metode Rele, yaitu metode yang memanfaatkan data penduduk lima tahunan, jumlah balita, dan jumlah perempuan usia subur.

Melihat kondisi di atas, pengembangan aplikasi sistem informasi fertilitas sebagai alat untuk menghitung indikator fertilitas yang praktis, valid, dan mudah diaplikasikan sesuai dengan *input* data yang tersedia sangat layak untuk dibuat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi *Smart Fert* dan menguji hasil perhitungan indikator fertilitas dari aplikasi *Smart Fert* dibandingkan dengan standar yang baik, yaitu perhitungan dari hasil Sensus Penduduk 2010. Apabila didapatkan hasil perhitungan yang valid, maka aplikasi *Smart Fert* dapat dipakai untuk menghitung indikator fertilitas setiap tahunnya tingkat kabupaten/kota, bahkan tingkat kecamatan.

## Tinjauan Pustaka

### *Pengukuran Fertilitas Metode Langsung*

Pengukuran fertilitas secara langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan maupun pengukuran fertilitas kumulatif sama-sama mempunyai kelemahan dan keuntungan (Lembaga Demografi, 1981).

#### a. Crude Birth Rate (CBR)

Tingkat Kelahiran Kasar adalah perbandingan antara jumlah kelahiran hidup dengan jumlah seluruh penduduk selama setahun per 1.000 penduduk (Lembaga Demografi, 1981).

$$CBR = \frac{B}{P} \times K:$$

Keterangan:

B = Jumlah kelahiran

P = Jumlah penduduk pertengahan tahun

Kelemahan dari metode ini adalah semua penduduk dianggap mampu dan dapat melahirkan karena yang menjadi penyebut adalah seluruh penduduk yang meliputi semua umur. Kenyataan menunjukkan bahwa hanya penduduk perempuan saja yang dapat melahirkan dan ini pun masih terbatas pada kelompok umur tertentu.

#### b. General Fertility Rate (GFR)

Tingkat kelahiran umur adalah jumlah kelahiran hidup selama setahun per 1.000 penduduk perempuan dalam usia reproduksi umur 15-49 tahun (Lembaga Demografi, 1981).

$$GFR = \frac{B}{PF_{(15-49)}}$$

Keterangan:

B = jumlah kelahiran

$PF_{(15-49)}$  = penduduk perempuan usia reproduksi.

Kelemahan metode ini adalah fertilitas dari penduduk perempuan usia reproduksi dianggap sama. Tidak ada variasi fertilitas dari golongan umur tua maupun muda. Dalam kenyataan, fertilitas tahunan berhubungan erat pada struktur umur perempuan.

#### c. Age Specific Fertility Rate (ASFR)

Tingkat fertilitas spesifik menurut umur adalah perbandingan antara jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk perempuan pada golongan umur tertentu <sup>(i)</sup> pada usia reproduksi (Lembaga Demografi, 1981).

$$ASFR = \frac{B_i}{PF_i} \times K$$

Keterangan:

$B_i$  = Jumlah kelahiran dari kelompok umur (i), misalnya umur 20-24 tahun

$PF_i$  = Jumlah penduduk perempuan menurut umur (i) dalam usia reproduksi, misal umur 20-24 tahun.

Dibandingkan dengan ukuran pertama maupun kedua, metode ini lebih spesifik dalam memberikan informasi tentang variasi fertilitas menurut umur. Namun, ukuran fertilitas yang ada atau rata-rata jumlah anak yang dimiliki belum dipisahkan menurut jenis kelamin.

d. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak (laki-laki dan perempuan) yang dilahirkan per 1.000 penduduk perempuan selama masa reproduksi dengan asumsi bahwa tingkat kelahiran tidak mengalami perubahan selama periode reproduksi.

Dalam bentuk rumus dituliskan sebagai berikut (Lembaga Demografi, 1981).

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45=15} ASFR_i$$

TFR adalah lima kali jumlah ASFR (Tingkat Fertilitas menurut Umur). Meskipun dapat memberikan informasi tentang rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, metode ini belum memberikan gambaran jumlah anak perempuan yang siap menggantikan peran ibunya dalam hal fertilitas. Ini sama halnya dengan ukuran fertilitas menurut golongan umur yang hanya memberikan informasi bahwa fertilitas itu berbeda menurut umur.

e. Gross Reproductive Rate (GRR)

Gross Reproduction Rate (GRR) dan Net Reproduction Rate (NRR) merupakan ukuran fertilitas yang berkaitan dengan kemampuan penduduk perempuan melahirkan bayi perempuan untuk menggantikan dirinya bereproduksi. Ukuran yang didapatkan umumnya dinyatakan dengan reproduksi (*reproduction*), bukan fertilitas (*fertility*).

Gross Reproduction Rate (GRR) atau tingkat reproduksi bruto adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan hidup per 1.000 penduduk perempuan dengan asumsi bahwa tidak ada bayi perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri usia reproduksi.

Dalam bentuk rumus dituliskan sebagai berikut (Lembaga Demografi, 1981).

$$GRR = 5 \sum_{i=15-19}^{45=15} ASFR_{Fi}$$

Catatan: Notasi  $F_i$  berarti kelahiran bayi perempuan

f. Net Reproductive Rate (NRR)

Tingkat Reproduksi Neto adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan per 1.000 penduduk perempuan dengan mempertimbangkan kemungkinan bayi tersebut meninggal dalam usia reproduksi. Dikatakan reproduksi neto karena ukuran ini telah mempertimbangkan kemungkinan meninggal. Berbeda halnya dengan Reproduksi Bruto (GRR), kemungkinan meninggal dari bayi perempuan tersebut belum dipertimbangkan. Dalam ukuran reproduksi neto ini, kemungkinan meninggal dihitung menggunakan Tabel Kematian dengan rumus sebagai berikut (Lembaga Demografi, 1981).

$$NRR = \sum_{i=15-19}^{45=15} ASFR_{Fi} \times \frac{5 I_x}{10}$$

### Pengukuran Fertilitas Metode Tidak Langsung

#### a. Metode Anak Kandung

Metode anak kandung atau lebih dikenal dengan *own children* diperkenalkan pertama kali oleh W.H. Grabill dan diperbaiki bersama Lee-Jay Cho dan Choe (1986). Dasar asumsi perkiraan fertilitas dengan metode *Survival Ratio*, yaitu memperkirakan angka fertilitas sebelum sensus atau survai kependudukan dilakukan atas dasar tabulasi dari anak-anak yang tinggal bersama ibunya pada saat pencacahan atau pendataan yang dilakukan.

Berikut adalah tiga tahap perhitungan.

1. memperkirakan jumlah kelahiran dalam setahun, dengan dengan cara *Reverse Survival Ratio* dari anak-anak berumur 0-4 atau 0-14 tahun
2. memperkirakan rata-rata jumlah penduduk perempuan pada pertengahan tahun, yaitu rata-rata dari jumlah penduduk menurut sensus atau survei dan perkiraan jumlah penduduk 15 tahun sebelum sensus atau survei
3. memperkirakan angka kelahiran menurut umur (ASFR) yang diperoleh dari hasil pembagian perkiraan jumlah kelahiran dan rata-rata jumlah penduduk perempuan.

Keunggulan dari metode anak kandung adalah perkiraan angka kelahiran (ASFR) dapat dirinci menurut umur tahunan dan tidak memerlukan banyak informasi/data. Informasi pokok yang diperlukan adalah jumlah anak tinggal bersama ibunya menurut umur. Di samping itu, beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan adalah kealpaan/lupa tentang

jumlah anak dan kesalahan pelaporan umur. Selanjutnya mortalitas, terutama mortalitas anak, dapat juga berpengaruh terhadap hasil perkiraan fertilitas. Sejalan dengan kelemahan ini, untuk mendapatkan perkiraan angka fertilitas yang baik diperlukan penyesuaian yang harus dilakukan sesuai dengan kelemahan data dasar yang digunakan.

#### b. Metode *Reverse Survival Ratio*

Dasar asumsi perkiraan fertilitas dengan metode *Reverse Survival Ratio* adalah penduduk usia 0-14 tahun berasal dari kelahiran selama ini sampai lima tahun lalu. Misalnya, penduduk usia 4 tahun adalah mereka yang berasal dari lima tahun yang lalu, penduduk usia 3 tahun berasal dari kelahiran empat tahun lalu, dan seterusnya. Dengan demikian, perkiraan fertilitas didasarkan pada komposisi umur penduduk, khususnya penduduk perempuan. Metode estimasi ini sangat tergantung kualitas data komposisi umur penduduk. Oleh karena itu, sebelum data digunakan, komposisi umur penduduk sebaiknya dirapikan dulu untuk mengurangi kesalahan yang ada.

Tahap-tahap perkiraan angka fertilitas adalah sebagai berikut :

1. menghitung penduduk perempuan usia subur untuk rentang waktu sebelum sensus atau survai dilakukan
2. menghitung jumlah penduduk perempuan tengah periode
3. menghitung indeks fertilitas dan proporsi penduduk perempuan yang statusnya nikah. Indeks fertilitas alami dapat diperoleh dari buku manual (UN Manual IV, 1967) atau pola yang lain bila datanya tersedia.
4. menghitung penduduk perempuan yang ditimbang dengan cara mengalikan jumlah penduduk perempuan tengah

periode dengan faktor penimbangan pada setiap umur yang sama

5. Indeks fertilitas dapat dihitung dengan cara jumlah penduduk kelahiran selama lima tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan tertimbang.

### c. Metoda Riwayat Kehamilan

Untuk mengatasi berbagai hambatan maupun ketidakcermatan pengumpulan data fertilitas serta untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu, Singuefield (1978) dalam (Kasto, 1995) telah menawarkan metode baru untuk memperkirakan fertilitas. Metode estimasi fertilitas ini dinamakan *pregnancy status* atau metode status kehamilan dari Singuefield, yang digunakan untuk memperkirakan angka kelahiran. Cara ini dianggap cukup sederhana, biayanya murah, dan hasilnya lebih cermat. Asumsi dasar dari metode status kehamilan adalah apabila perempuan yang hamil, ia mengetahui bahwa dirinya sedang hamil dan mengetahui pula lama (minggu atau bulan) kehamilannya. Dari semua kehamilan ini diasumsikan akan berakhir dengan menghasilkan lahir hidup.

Kelemahan dari metode ini adalah apabila ada sebagian dari perempuan yang hamil tidak mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Ini dapat terjadi pada kehamilan usia muda, terutama kurang dari dua bulan. Dapat saja mereka belum mengetahui bahwa dirinya telah hamil. Untuk itu, diperlukan angka penyesuaian agar usia kehamilan muda tidak kekurangan cacah. Kemudian diperlukan pula angka penyesuaian untuk kehamilan yang tidak menghasilkan lahir hidup meskipun proporsinya semakin kecil. Kemajuan di bidang pangan dan gizi akan menekan proporsi bayi lahir mati. Faktor ini dapat diabaikan karena proporsinya semakin sedikit.

Keuntungan dari model estimasi ini adalah datanya yang dikumpulkan sangat sederhana dan mudah untuk dijawab. Apakah ibu sedang hamil?. Bila sedang hamil, telah berapa minggu atau bulan? Kecermatan data ini terjamin dari responden karena ia dapat mengingat kembali tentang urutan kelahiran pada anak-anak yang masih hidup maupun telah meninggal. Karena pertanyaannya sangat sederhana, maka proses pengumpulan data di lapangan relatif singkat dan dapat menyajikan data dalam waktu singkat pula untuk tahun yang bersangkutan.

Angka penyesuaian yang dapat dilakukan adalah distribusi kekurangan cacah perempuan hamil, terutama kehamilan usia muda. Jika data yang dikumpulkan cukup lengkap, maka angka penyesuaian kekurangan cacah dapat dihitung untuk setiap bulan. Akan tetapi, bila datanya kurang tersedia, dapat dilakukan untuk setiap kelompok. Apabila ingin mendapatkan angka perkiraan yang lebih baik, maka angka penyesuaian sebaiknya dilakukan pula untuk kegagalan kehamilan, yakni kehamilan yang tidak diakhiri dengan lahir hidup. Dalam hal ini, pelaporan umum responden juga perlu dievaluasi.

Adioetomo dalam (Kasto, 1995) menggunakan asumsi bahwa distribusi bulan kehamilan dianggap merata dari bulan ke-1 sampai 9 sehingga kekurangan cacah perempuan hamil pada bulan kehamilan. Sejalan dengan itu, diperlukan angka penyesuaian untuk bulan kehamilan. Rata-rata kehamilan dianggap 9 bulan sehingga angka penyesuaian dapat diperkirakan sesuai dengan kekurangan tersebut.

Parameter fertilitas biasanya tidak dinyatakan dalam bulan, tetapi dinyatakan dalam tahun. Sejalan dengan ini, maka angka penyesuaian dihitung dengan rumus  $12/9$ , yaitu sembilan bulan kehamilan dari dua belas bulan. Dengan demikian, angka pemikiran angka penyesuaian seperti berikut.



$$AP = \frac{BK}{BK - ({}_nKC_i + {}_nKC_{i+3} + {}_nKC_{i+6})} \times \frac{12}{BK}$$

Keterangan:

- AP = Angka penyesuaian
- BK = Rata-rata lama kehamilan,  
diasumsikan selama 9 bulan
- ${}_nKC_i$  = Kekurangan cacah kehamilan  
untuk bulan *i*. Jika dikehendaki  
angka yang teliti, maka  
kekurangan cacah bulan ke-*i* ini  
dapat dihitung untuk setiap bulan.  
Dalam contoh perhitungan ini  
menggunakan angka kelompok  
bulan kehamilan 1 sampai dengan  
3 bulan.
- ${}_nKC_{i+6}$  = Kekurangan cacah bulan  
kehamilan *i*+6, dalam hal ini untuk  
kehamilan bulan 7 s/d 9 bulan.
- n* = Interval kelompok bulan  
kehamilan, dapat dihitung untuk  
setiap bulan, dapat dihitung setiap  
bulan. Dalam contoh perhitungan  
ini dihitung untuk kelompok 3  
bulan.
- i* = nilainya 1 (satu)
- 12 = Banyaknya bulan dalam satu  
tahun kalender.

d. Metode Rele

Menurut metode Rele dalam Kasto (1995) dan juga dalam Nilakusmawati (2009), pada hampir semua populasi dapat dijumpai hubungan linear antara rasio ibu anak (*child women ratio*) dengan tingkat kelahiran kasar (Gross Reproduction Rate) yang kemudian dapat diubah menjadi tingkat kelahiran total TFR (Total Fertility Rate).

Keuntungan utama dari metode ini adalah kesederhanaannya karena hanya memerlukan sebaran umur penduduk dan perkiraan kematian. Berdasarkan komposisi

penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dapat dihasilkan rasio ibu-anak. Dengan mengetahui perkiraan kasar atas harapan hidup saat lahir, jumlah ini dapat diubah menjadi perkiraan TFR. Dengan demikian, metode ini menghasilkan suatu cara yang cepat dan mudah dalam memperkirakan kelahiran. Kebutuhan data terbatas pada persebaran penduduk menurut umur dan jenis kelamin, serta indikasi tentang tingkat mortalitas dalam bentuk angka harapan hidup saat lahir. Tabulasi umur dan jenis kelamin boleh dikatakan selalu tersedia pada survei yang dilakukan oleh BPS, seperti SP, Supas, dan Susenas. Dengan demikian, CWR selalu dapat dihitung di setiap kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Kelemahannya adalah metode ini sensitif terhadap perbedaan tingkat lewat cacah antara ibu dan anak. Selain itu, dalam perhitungannya diperlukan informasi tentang tingkat kematian. Rele mendasarkan diri pada konsep penduduk stabil (*stable population*). Prinsip yang menjadi dasar konsep penduduk stabil adalah jika pengaruh migrasi internasional terhadap suatu penduduk suatu negara dapat diabaikan, maka komposisi umur penduduk merupakan akibat dari kecenderungan fertilitas dan mortalitas di masa lalu.

Langkah pertama adalah menghitung *child woman ratio* (CWR) dengan salah satu rumus sebagai berikut.

$$CWR1 = \frac{P0-4}{W15-44}$$

$$CWR2 = \frac{P0-4}{W15-49}$$

$$\text{CWR 3} = \frac{\text{P5-9}}{\text{W20-49}}$$

$$\text{CWR 4} = \frac{\text{P5-9}}{\text{W20-54}}$$

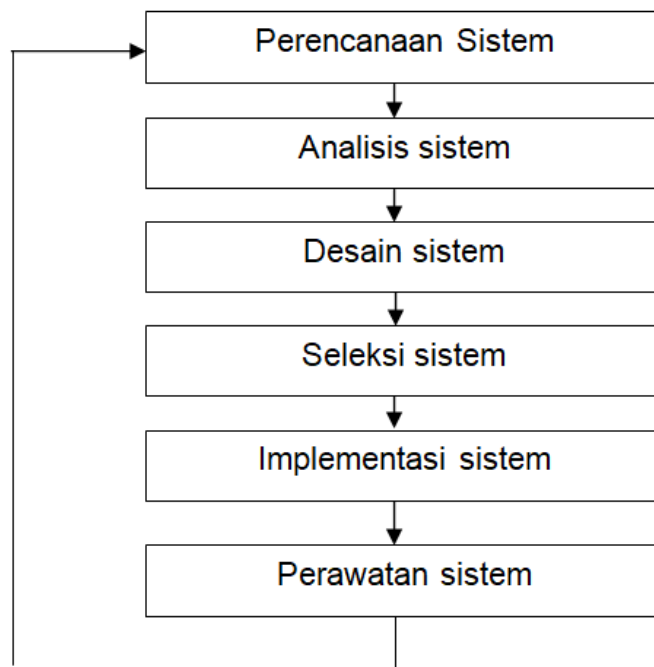
Keterangan:

- P0-4 = penduduk yang berumur 0-4 tahun
- P5-9 = penduduk yang berumur 5-9 tahun
- W15-44 = perempuan yang berumur 15-44 tahun
- W15-49 = perempuan yang berumur 15-49 tahun
- W20-49 = perempuan yang berumur 20-49 tahun
- W20-54 = perempuan yang berumur 20-54 tahun

Rele (1967) telah menghitung serangkaian faktor pengali yang dirinci menurut tingkat kematian yang dapat dipakai untuk merubah CWR menjadi GRR (Gross Reproduction Rate) dan TFR (Total Fertility Rate). Seperti halnya dalam metode *reverse* dan anak kandung, terlebih dulu harus diketahui *mortality level* yang biasanya dihitung dengan metode Brass (1968) atau modifikasinya berdasarkan rata-rata anak yang pernah dilahirkan dan yang masih hidup (Kasto, 1995).

### Pengembangan Sistem Informasi

Dalam pengembangan sistem informasi proses utama untuk menggambarkan langkah-langkahnya, digunakan siklus hidup pengembangan sistem (*systems development life cycle*) (Yakub, 2012). *Systems development life cycle* memiliki fase-fase tertentu yang setiap fasenya



Sumber: Jogiyanto (2005)

**Gambar 1** Siklus Hidup Pengembangan Sistem

memiliki karakteristik tersendiri. Tahapan dari siklus hidup pengembangan sistem (*systems development life cycle*) terdiri atas tahap perencanaan sistem (*systems planning*), analisis sistem (*systems analysis*), desain sistem (*system designs*), seleksi sistem (*systems selection*), implementasi sistem (*systems implementation*), dan perawatan sistem (*systems maintenance*) (Jogiyanto, 2005).

Pengembangan sistem (*system development*) dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.

Tahap perancangan sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan kebutuhan informasi para pemakai sistem serta memberikan rancang bangun kepada pemrogram komputer dan ahli lainnya (Jogiyanto, 2009). Perencanaan sistem mencakup keseluruhan unit bisnis maupun seluruh seluruh departemen dengan memperhatikan tujuan dari unit bisnis perusahaan (Yakub, 2012).

Sementara itu, ada dua tujuan perancangan sistem (Jogiyanto, 2009), yaitu perancangan sistem secara logika (*logical system design*) atau perancangan sistem secara umum (*general system design*) dan perancangan sistem secara terinci (*detail system design*). Tujuan dari perancangan sistem secara umum adalah memberikan gambaran secara umum tentang suatu perancangan sistem. Hal ini akan membantu untuk lebih mengefisiensi dana jika rancangan sistem tidak disetujui untuk diterapkan karena perancangan sistem masih bersifat umum (Jogiyanto, 2009).

Perancangan sistem secara terinci atau perancangan sistem fisik adalah tahap lanjutan dari perancangan sistem secara umum karena memberikan gambaran komponen-komponen sistem dan digunakan untuk menggambarkan

secara fisik komponen-komponen sistem yang akan dibangun (Jogiyanto, 2009).

Fase perancangan sistem harus memperhatikan faktor-faktor kelayakan dan faktor-faktor strategis. Menurut Jogiyanto (2005), faktor-faktor kelayakan menilai apakah sistem informasi yang dikembangkan akan mampu memenuhi tujuan organisasi. Faktor kelayakan (*feasibility factors*) terdiri atas kelayakan teknis, ekonomis, legal, operasional, dan kelayakan rencana. Studi kelayakan ini biasanya dilakukan oleh seorang analis sistem. Sementara itu, faktor-faktor strategis terdiri atas produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Faktor strategis berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan.

Analisis sistem (*system analysis*) (Jogiyanto, 2005) dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Maksud dari penguraian itu adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

Tahap analisis sistem terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Jogiyanto, 2009).

1. Studi pendahuluan, yaitu kegiatan awal dari analisis sistem yang memberikan gambaran mengenai ruang lingkup dan pemahaman awal dari pembangunan sistem informasi
2. Studi kelayakan (*feasibility study*) dalam analisis sistem sama dengan dalam perencanaan sistem namun dalam perencanaan sistem yang dipaparkan oleh Jogiyanto (2009) terdiri atas lima macam kelayakan yaitu kelayakan teknologi, kelayakan ekonomis, kelayakan legal, kelayakan operasi, dan studi kelayakan sosial.

3. mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai
4. memahami sistem yang ada
5. menganalisis hasil penelitian.

Setelah sistem selesai dirancang, maka tahap berikutnya adalah implementasi sistem dan pada tahap ini sistem siap dioperasikan. Tahap implementasi sistem terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut (Jogiyanto, 2005).

1. mempersiapkan rencana implementasi
2. melakukan kegiatan implementasi, di antaranya memilih dan melatih orang-orang yang akan mengoperasikan sistem, memilih dan mempersiapkan lokasi penempatan sistem, mengujicobakan sistem, serta konversi sistem
3. menindaklanjuti implementasi.

Dalam tahap implementasi sistem, dibutuhkan sebuah proses untuk menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Menurut Jogiyanto (2009), hal ini dapat dilakukan dengan konversi sistem. Berbagai macam konversi sistem adalah sebagai berikut.

1. Konversi paralel adalah pemodelan pengonversian dengan mengoperasikan sistem yang baru bersamaan dengan sistem yang lama dalam periode waktu yang sama. Kedua sistem dioperasikan secara bersama untuk melihat kesuksesan atau kegagalan pengimplementasian sistem baru yang menggantikan sistem yang lama (Yakub, 2012). Kelebihan konversi paralel adalah apabila penerapan sistem baru mengalami kegagalan, maka sistem lama masih berjalan, tetapi penerapan sistem ini membutuhkan biaya yang lebih mahal (Jogiyanto, 2009).

2. Konversi pilot atau konversi lokasi (*location conversion*) dilakukan bertahap dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu departemen ke departemen lain hingga sistem informasi terimplementasi dengan sempurna. Jadi dalam penerapan sistem ini, pengimplementasian sistem dapat dievaluasi dari lokasi sebelumnya agar lokasi berikutnya dapat terimplementasi dengan baik (Jogiyanto, 2009)
3. Konversi bertahap (*phasing conversion atau stepped conversion atau staged conversion atau phase-in conversion atau phased cut-over conversion*) dilakukan dengan mengimplementasikan sistem tahap demi tahap per modul. Kelebihan dari sistem ini adalah risiko kegagalannya tidak terlalu tinggi karena diterapkan per modul. Sementara itu, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang relatif lama.
4. Konversi langsung (*direct conversion atau direct cutover atau cold turkey conversion atau abrupt cutover*) adalah penggantian pengimplementasian secara langsung dari sistem yang lama ke sistem yang baru sehingga biayanya tidak terlalu besar, tetapi risiko kegagalan sangat tinggi karena sistem lama telah benar-benar dikonversi.

Yang terakhir adalah operasi dan perawatan sistem. Menurut Jogiyanto (2009), jika sistem telah dioperasikan, maka harus ada perawatan lebih lanjut. Tahap ini disebut operasi dan perawatan sistem (*system operation and maintenance*). Sistem perlu dirawat karena sistem mengandung kesalahan-kesalahan yang perlu terus diperbaiki, juga dapat karena perubahan kebutuhan terhadap sistem

## SMART FERT: APLIKASI PRAKTIS, VALID, DAN MUDAH UNTUK MENGUKUR INDIKATOR FERTILITAS DI ERA OTONOMI DAERAH

yang digunakan, perubahan sistem karena perubahan lingkungan ekstern, dan perlunya peningkatan sistem informasi sesuai dengan kompleksitas zaman.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Sementara itu, hipotesis penelitian ini adalah ada tidaknya perbedaan antara hasil olahan *Smart Fert* dengan metode langsung olahan data Sensus Penduduk 2010. Populasinya adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sehingga unit analisisnya adalah kabupaten/kota.

Bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah seperangkat aplikasi *Smart Fert* (dengan bahasa *visual basic*), *software excell* untuk mengecek kebenaran perhitungan metode tidak langsung *Smart Fert*, seperangkat paket program SPSS untuk menilai kesesuaian hasil olahan *Smart Fert*

dengan olahan BPS data Sensus Penduduk 2010.

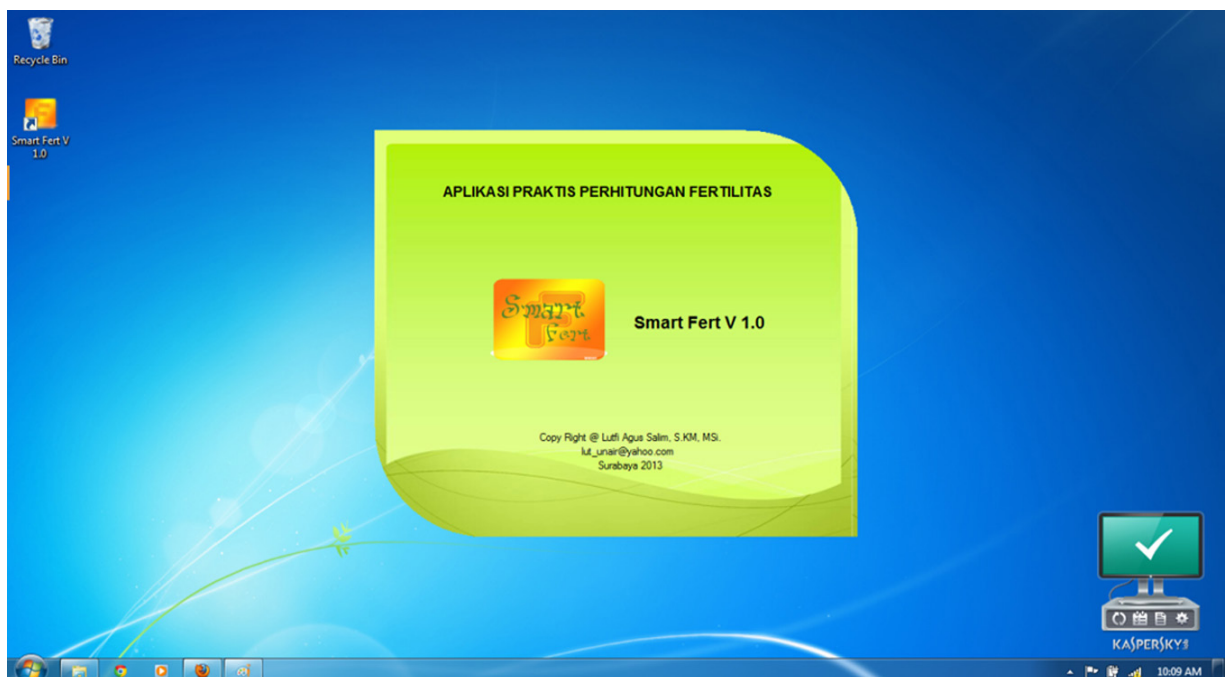
Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji perbedaan sampel independen (*independent t test*) untuk menguji kesesuaian antara hasil olahan *Smart Fert* dengan hasil pengukuran fertilitas Sensus Penduduk 2010.

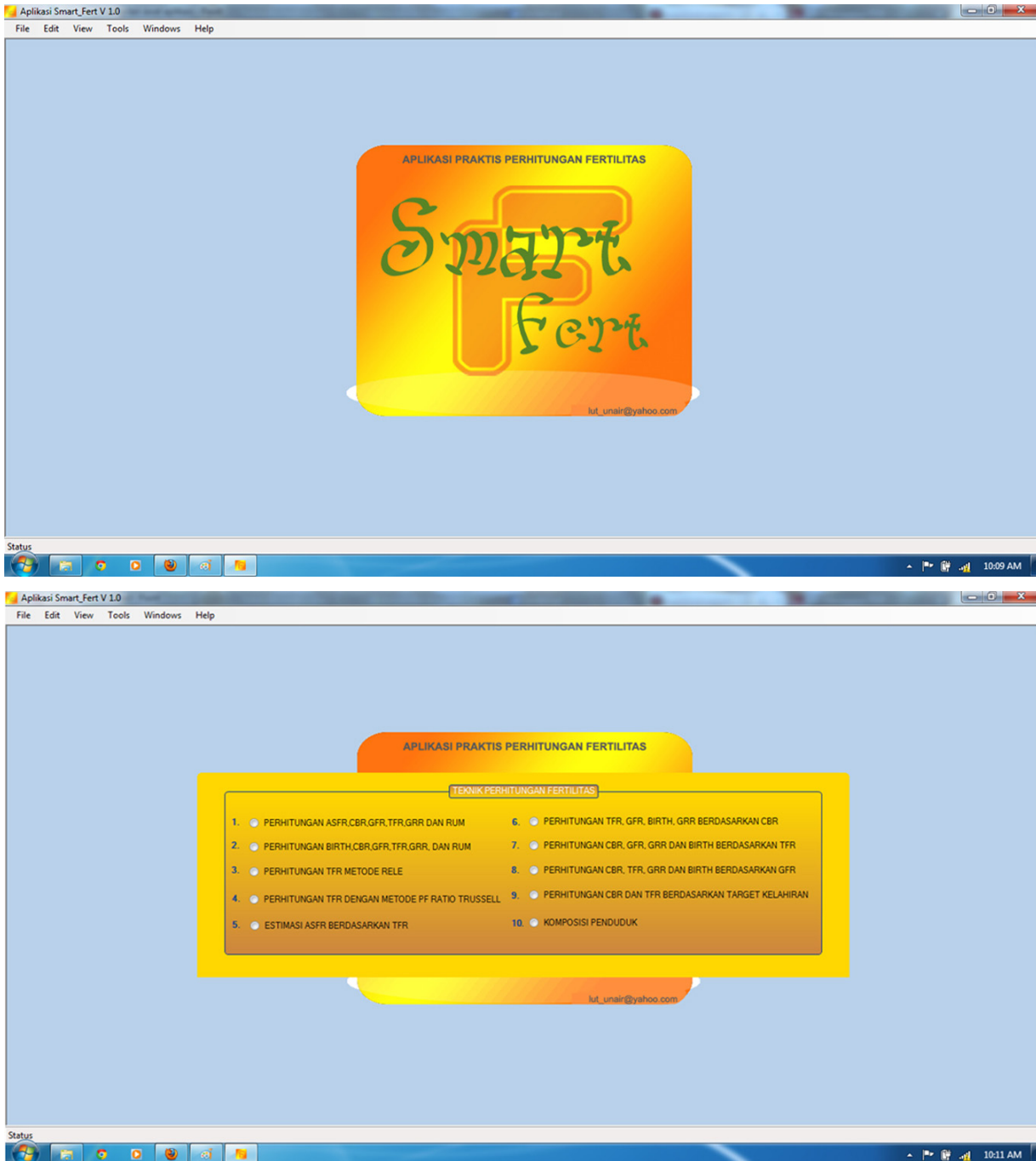
### Hasil Penelitian

#### *Pengembangan Sistem Informasi Smart Fert*

Aplikasi *Smart Fert* dirancang dan dikembangkan dengan bahasa *visual basic* dan dapat dioperasikan dengan program windows. Penampilan dan keluaran hasil dari aplikasi *Smart Fert* telah dicek kesesuaiannya dengan perhitungan dengan program excel.

Menu yang dikembangkan terdiri atas sepuluh menu perhitungan indikator fertilitas, baik metode langsung maupun metode tidak langsung sebagai berikut.





- Menu 1 : Perhitungan ASFR, CBR, GFR, TFR, GRR dan RUM
- Menu 2 : Perhitungan Birth, CBR, GFR, TFR, GRR dan RUM
- Menu 3 : Perhitungan TFR metode RELE
- Menu 4 : Perhitungan TFR dengan metode PF *ratio* Trussell
- Menu 5 : Estimasi ASFR berdasarkan TFR

- Menu 6 : Perhitungan TFR, GFR, Birth, GRR berdasarkan CBR
- Menu 7 : Perhitungan CBR, GFR, GRR dan Birth berdasarkan TFR
- Menu 8 : Perhitungan CBR, TFR, GRR dan Birth berdasarkan GFR
- Menu 9 : Perhitungan CBR dan TFR berdasarkan target kelahiran
- Menu 10 : Komposisi Penduduk

*SMART FERT: APLIKASI PRAKTIS, VALID, DAN MUDAH UNTUK  
MENGUKUR INDIKATOR FERTILITAS DI ERA OTONOMI DAERAH*

Untuk setiap menu, akan ditampilkan informasi mengenai *input* dan *output*-nya. Hasil perhitungannya dapat langsung dilihat di menu tampilan atau dapat disimpan juga di program excell. Informasi mengenai instalasi, menjalankan seluruh menu di aplikasi *Smart Fert* dapat dibaca petunjuk penggunaan aplikasi *Smart Fert* tersendiri.

*Kesesuaian Hasil Olahan Aplikasi Smart Fert dengan Hasil Sensus Penduduk 2010*

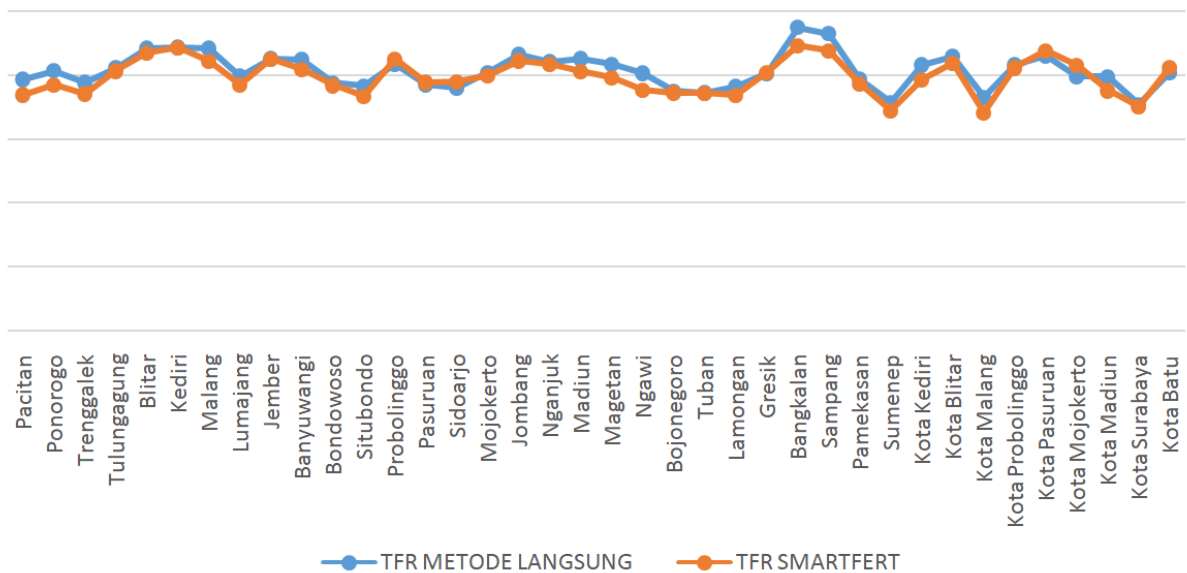
Untuk melihat kesesuaian antara hasil olahan aplikasi *Smart Fert* dan metode langsung Sensus Penduduk 2010, dilakukan uji perbedaan antara hasil kedua metode tersebut. Indikator yang akan dibandingkan adalah indikator Total Fertility Rate (TFR), General Fertility Rate (GFR), dan Crude Birth Rate (CBR).

*Hasil Perhitungan Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)*

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak (laki-laki dan perempuan) yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya. Ukuran fertilitas ini adalah ukuran yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan pengendalian penduduk di suatu daerah.

Bila menggunakan metode langsung, maka TFR dihitung dari penjumlahan dari total kelahiran yang dirinci menurut kelompok umur perempuan (ASFR). Karena sistem administrasi saat ini belum baik, maka ASFR tidak didapatkan setiap tahun.

Salah satu metode tidak langsung dalam menghitung TFR adalah metode Rele, dengan *input* data yang utama adalah CWR (Child Woman Ratio) serta kebutuhan data balita dan data perempuan usia subur. Data balita dan perempuan usia subur ini didapatkan sampai tingkat kecamatan untuk setiap tahunnya.



**Gambar 2** TFR Hasil Olahan Smart Fert dan Sensus Penduduk 2010

**Tabel 1 TFR Hasil Olahan Aplikasi *Smart Fert* dan Sensus Penduduk 2010**

Kab/Kota	TFR Metode Langsung (Data SP 2010)	TFR Metode Rele dengan Aplikasi <i>Smart Fert</i> (Data SP 2010)	Selisih
Kabupaten			
1 Pacitan	1,969	1,846	0,123
2 Ponorogo	2,036	1,923	0,113
3 Trenggalek	1,944	1,855	0,089
4 Tulungagung	2,061	2,034	0,027
5 Blitar	2,211	2,177	0,034
6 Kediri	2,219	2,215	0,004
7 Malang	2,213	2,110	0,103
8 Lumajang	1,993	1,927	0,066
9 Jember	2,131	2,126	0,005
10 Banyuwangi	2,126	2,048	0,078
11 Bondowoso	1,941	1,920	0,021
12 Situbondo	1,917	1,837	0,080
13 Probolinggo	2,091	2,126	-0,035
14 Pasuruan	1,930	1,944	-0,014
15 Sidoarjo	1,900	1,946	-0,046
16 Mojokerto	2,022	1,997	0,025
17 Jombang	2,164	2,115	0,049
18 Nganjuk	2,107	2,085	0,022
19 Madiun	2,130	2,027	0,103
20 Magetan	2,089	1,980	0,109
21 Ngawi	2,018	1,883	0,135
22 Bojonegoro	1,878	1,863	0,015
23 Tuban	1,865	1,859	0,006
24 Lamongan	1,913	1,845	0,068
25 Gresik	2,015	2,025	-0,010
26 Bangkalan	2,376	2,233	0,143
27 Sampang	2,329	2,196	0,133
28 Pamekasan	1,969	1,930	0,039
29 Sumenep	1,789	1,719	0,070
Kota			
30 Kota Kediri	2,083	1,965	0,118
31 Kota Blitar	2,151	2,097	0,054
32 Kota Malang	1,829	1,705	0,124
33 Kota Probolinggo	2,082	2,058	0,024
34 Kota Pasuruan	2,156	2,196	-0,040
35 Kota Mojokerto	1,990	2,076	-0,086
36 Kota Madiun	1,992	1,880	0,112
37 Kota Surabaya	1,773	1,753	0,020
38 Kota Batu	2,022	2,063	-0,041
<b>JATIM</b>	<b>2,011</b>	<b>2,006</b>	<b>0,005</b>

Sumber: Data primer, 2013.



*SMART FERT: APLIKASI PRAKTIS, VALID, DAN MUDAH UNTUK MENGUKUR INDIKATOR FERTILITAS DI ERA OTONOMI DAERAH*

TFR hasil olahan *Smart Fert* dan metode langsung dari Sensus Penduduk dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan uji t-test untuk membedakan antara TFR hasil *Smart Fert* dengan TFR metode langsung data Sensus Penduduk di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan hasil tidak signifikan (Sig. = 0,132). Hal ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kedua metode perhitungan TFR.

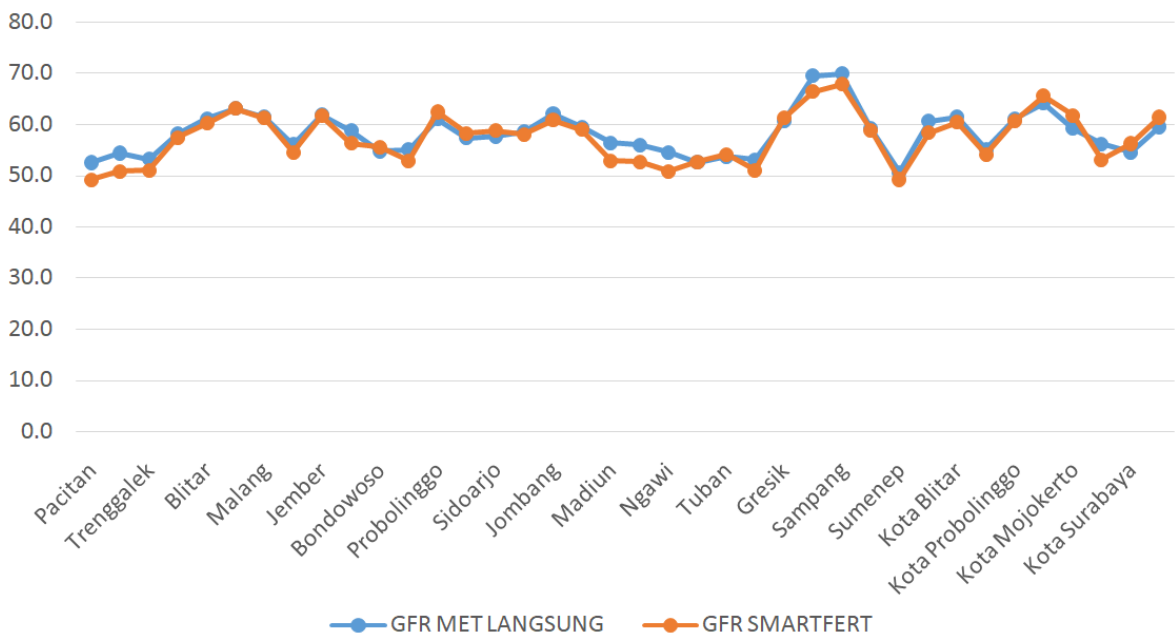
*Hasil Perhitungan Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR)*

General Fertility Rate (GFR) adalah jumlah kelahiran per 1.000 perempuan usia reproduktif secara total tanpa dirinci menurut usia.

Bila menggunakan metode langsung, maka GFR dihitung dari jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah perempuan usia subur. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini pelaporan rutin mengenai jumlah kelahiran setiap tahunnya belum baik. Di Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota, data jumlah yang lahir adalah jumlah yang mengurus akta kelahiran, padahal jumlah yang mengurus akta kelahiran selalu lebih sedikit daripada jumlah kelahiran.

Dalam metode tidak langsung, GFR di aplikasi *Smart Fert* ini dihitung menggunakan metode asosiasi dengan memanfaatkan data CWR dan TFR hasil perhitungan metode Rele. *Input* data ini mudah didapatkan karena pendataan balita dan perempuan usia subur telah dilakukan secara rutin.

GFR dari olahan kedua metode dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3** GFR Hasil Olahan Smart Fert dan Sensus Penduduk 2010

**Tabel 2 GFR Hasil Olahan Aplikasi *Smart Fert* dan Sensus Penduduk 2010**

Kab/Kota	GFR Metode Langsung (Data SP 2010)	GFR Metode Asosiasi dengan Aplikasi <i>Smart Fert</i> (Data SP 2010)	Selisih
Kabupaten			
1 Pacitan	52,6	49,2	3,4
2 Ponorogo	54,4	50,9	3,5
3 Trenggalek	53,2	51,1	2,1
4 Tulungagung	58,2	57,5	0,7
5 Blitar	61,1	60,3	0,8
6 Kediri	63,1	63,2	-0,1
7 Malang	61,5	61,3	0,2
8 Lumajang	56,1	54,5	1,6
9 Jember	61,9	61,8	0,1
10 Banyuwangi	58,8	56,3	2,5
11 Bondowoso	54,8	55,6	-0,7
12 Situbondo	55,1	53,0	2,1
13 Probolinggo	61,1	62,5	-1,4
14 Pasuruan	57,3	58,3	-1,0
15 Sidoarjo	57,7	58,9	-1,1
16 Mojokerto	58,6	58,1	0,5
17 Jombang	62,1	61,0	1,2
18 Nganjuk	59,5	59,0	0,5
19 Madiun	56,4	53,0	3,5
20 Magetan	56,1	52,7	3,4
21 Ngawi	54,6	50,8	3,7
22 Bojonegoro	52,6	52,8	-0,2
23 Tuban	53,8	54,2	-0,5
24 Lamongan	53,1	51,0	2,1
25 Gresik	60,7	61,3	-0,7
26 Bangkalan	69,5	66,5	2,9
27 Sampang	69,9	67,9	2,0
28 Pamekasan	59,2	58,9	0,3
29 Sumenep	50,7	49,3	1,4
Kota			
30 Kota Kediri	60,6	58,5	2,2
31 Kota Blitar	61,5	60,4	1,0
32 Kota Malang	55,2	54,2	1,0
33 Kota Probolinggo	61,2	60,8	0,4
34 Kota Pasuruan	64,1	65,7	-1,6
35 Kota Mojokerto	59,2	61,8	-2,7
36 Kota Madiun	56,2	53,1	3,1
37 Kota Surabaya	54,6	56,3	-1,7
38 Kota Batu	59,5	61,5	-1,9
<b>JATIM</b>	<b>58,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1,0</b>

Sumber: Data primer, 2013

*SMART FERT: APLIKASI PRAKTIS, VALID, DAN MUDAH UNTUK MENGUKUR INDIKATOR FERTILITAS DI ERA OTONOMI DAERAH*

Berdasarkan uji t-test untuk membedakan antara GFR hasil *Smart Fert* dengan GFR metode langsung data Sensus Penduduk di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan hasil tidak signifikan (Sig. = 0,423). Dengan demikian, diketahui bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua metode perhitungan GFR.

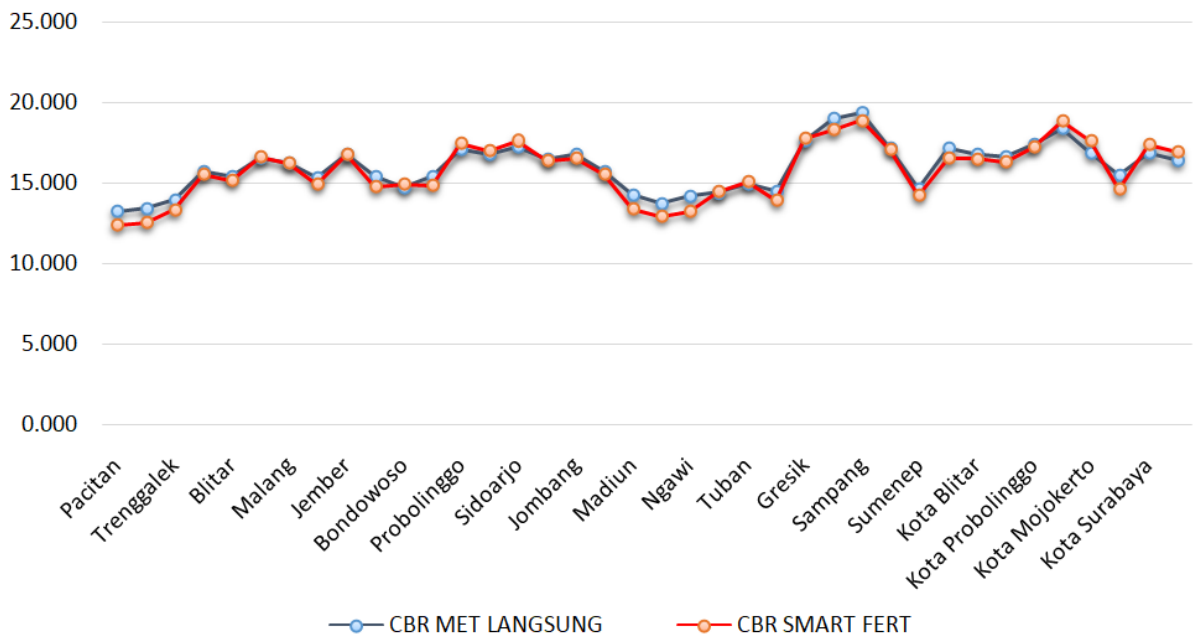
*Hasil Perhitungan Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)*

Salah satu faktor yang ikut berperan dalam penghitungan angka pertumbuhan penduduk

adalah kelahiran (fertilitas). Untuk mengetahui tingkat kelahiran hidup, antara lain, digunakan rumus CBR, yaitu banyaknya kelahiran hidup pada setiap seribu penduduk.

Bila menggunakan metode langsung, maka CBR dihitung dari jumlah kelahiran dibagi 1.000 penduduk. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini pelaporan rutin mengenai jumlah kelahiran setiap tahunnya belum baik. Dalam metode tidak langsung, CBR di aplikasi *Smart Fert* ini dihitung dengan menggunakan metode asosiasi.

CBR dari olahan kedua metode dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4** CBR Hasil Olahan Smart Fert dan Sensus Penduduk 2010

**Tabel 3 CBR Hasil Olahan Aplikasi *Smart Fert* dan Sensus Penduduk 2010**

Kab/Kota	CBR Metode Langsung (Data SP 2010)	CBR Metode Asosiasi dengan Aplikasi <i>Smart Fert</i> (Data SP 2010)	Selisih
Kabupaten			
1 Pacitan	13,263	12,407	0,856
2 Ponorogo	13,456	12,588	0,868
3 Trenggalek	13,930	13,383	0,547
4 Tulungagung	15,760	15,586	0,174
5 Blitar	15,428	15,218	0,210
6 Kediri	16,594	16,626	-0,032
7 Malang	16,301	16,254	0,047
8 Lumajang	15,351	14,934	0,417
9 Jember	16,813	16,784	0,029
10 Banyuwangi	15,457	14,801	0,656
11 Bondowoso	14,749	14,958	-0,209
12 Situbondo	15,462	14,860	0,602
13 Probolinggo	17,091	17,486	-0,395
14 Pasuruan	16,783	17,070	-0,287
15 Sidoarjo	17,275	17,626	-0,351
16 Mojokerto	16,514	16,401	0,113
17 Jombang	16,840	16,575	0,265
18 Nganjuk	15,728	15,601	0,127
19 Madiun	14,284	13,407	0,877
20 Magetan	13,749	12,933	0,816
21 Ngawi	14,215	13,260	0,955
22 Bojonegoro	14,391	14,472	-0,081
23 Tuban	14,987	15,119	-0,132
24 Lamongan	14,517	13,975	0,542
25 Gresik	17,628	17,821	-0,193
26 Bangkalan	19,063	18,318	0,745
27 Sampang	19,470	18,924	0,546
28 Pamekasan	17,190	17,145	0,045
29 Sumenep	14,669	14,278	0,391
Kota			
30 Kota Kediri	17,183	16,564	0,619
31 Kota Blitar	16,821	16,541	0,280
32 Kota Malang	16,639	16,347	0,292
33 Kota Probolinggo	17,400	17,292	0,108
34 Kota Pasuruan	18,414	18,872	-0,458
35 Kota Mojokerto	16,888	17,653	-0,765
36 Kota Madiun	15,503	14,635	0,868
37 Kota Surabaya	16,853	17,404	-0,551
38 Kota Batu	16,452	16,980	-0,528
<b>JATIM</b>	<b>16,107</b>	<b>15,766</b>	0,341

Sumber: Data primer, 2013

Berdasarkan uji t-test untuk membedakan antara CBR hasil *Smart Fert* dengan CBR metode langsung data Sensus Penduduk di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan hasil tidak signifikan (Sig. = 0,575). Hal ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kedua metode perhitungan CBR.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah aplikasi Sistem Informasi Fertilitas *Smart Fert* dapat dipakai sebagai alat pengukur fertilitas yang valid, praktis, dan mudah diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota, bahkan di tingkat kecamatan sesuai dengan *input* data yang ada. Data yang tersedia dan indikator yang dihasilkan *Smart Fert* dapat tersedia setiap tahun tanpa menunggu hasil Sensus Penduduk setiap sepuluh tahun sekali. Aplikasi *Smart Fert* valid karena setelah diuji tingkat kesesuaian dengan hasil Sensus Penduduk 2010, didapatkan tidak ada perbedaan hasil yang signifikan.

Saran yang direkomendasikan adalah perlunya integrasi indikator fertilitas dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD. Dengan integrasi indikator fertilitas ke dalam RPJMD, maka dapat dipastikan Program Kependudukan dan KB menjadi bagian penting serta strategis dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal itu karena program tersebut mendapat alokasi anggaran yang memadai dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, sinergitas dan keberlangsungan pembangunan berwawasan kependudukan akan terjamin. Di samping itu, diperlukan juga adanya panduan teknis tentang integrasi indikator fertilitas dalam perencanaan pembangunan dan teknik perhitungannya sehingga akan memudahkan bagi perencana dan pelaksana program kependudukan di kabupaten/kota. Di dalam panduan tersebut, perlu dijelaskan berbagai

teknik perhitungan fertilitas, baik metode langsung maupun metode tidak langsung, serta pengenalan aplikasi fertilitas, termasuk aplikasi *Smart Fert* yang terbukti valid, simpel, dan mudah diimplementasikan.

### **Daftar Pustaka**

- Barclay, G. W. 1970. *Technique of Population Analysis*, New York: John Willey & Sons Inc.
- Bogue, D. J. 1971. *Demographic Techniques of Fertility Analysis*, Community and Family Study Centre University of Chicago.
- Iskandar. 1977. *Demografi Teknik*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur, Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Jogiyanto., 2009. *Sistem Teknologi Informasi*. Edisi III. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kasto. 1995. *Handout Teknik Demografi*. Yogyakarta: Program Studi Kependudukan UGM.
- Lee-Jay Cho, R. D. R. and Choe, M. Ki. 1986. *The Own Children Method of Fertility Estimation*. Honolulu: East West Centre.
- Lembaga Demografi. 1981. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nilakusmawati, D. P. E. 2009. *Matematika Populasi*. Denpasar: Udayana University Press.
- UN. 2003. *Mortpak For Windows*. New York: Population Division Depart of Economic and Social Affairs UN.
- UN Manual IV. 1967. *Methods of Estimating Basic Demographic Measures From Incomplete Data*. New York: United Nations.
- UN Manual X. 1983. *Indirect Technique For Demographic Estimation*. New York: United Nations.
- Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

**ANALISIS KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PEKERJA WANITA SEKTOR  
INFORMAL PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
DI KOTA PALEMBANG**

Armansyah dan Kiki Aryaningrum

Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Palembang

Korespondensi: Armansyah (*e-mail*: armagedone77@yahoo.com)

**Abstrak**

Sektor informal merupakan kegiatan ekonomi alternatif bagi pekerja wanita di Kota Palembang. Selama ini potret sektor informal identik dengan rendahnya upah, pendidikan, kualitas, produktivitas, dan daya saing serta tidak ada keterampilan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas karakteristik demografi pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan *indepth interview*. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan tahapan *reduction, display dan conclusion*. Keabsahan data diuji dengan derajat *credibility* yang meliputi; perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan pekerja wanita sektor informal berada pada kelompok usia produktif dan pendidikan setaran SMA ke bawah. Mayoritas mereka memiliki keterampilan tetapi tidak digunakan sebagai modal usaha karena keterbatasan dana, kebanyakan dari mereka juga tidak pernah mengikuti pelatihan, bekerja sebagai pedagang dan tidak memiliki pengetahuan tentang MEA.

**Kata kunci:** karakteristik demografi, pekerja wanita, sektor informal

**ANALYSIS OF CHARACTERISTICS DEMOGRAPHY WOMEN WORKER  
INFORMAL SECTOR IN ERA OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY IN  
PALEMBANG CITY**

**Abstract**

The informal sector is an alternative economic activity for female workers in Palembang City. So far, the portrait of the informal sector is synonymous with low wages, education, quality, productivity, and competitiveness and no skills. This paper aims to discuss the demographic characteristics of informal women workers in the city of Palembang in the era of the ASEAN Economic Community (MEA). The method used is qualitative approach, with data collection through interview, observation, documentation and *indepth interview*. The collected data is analyzed by the *reduction, display and conclusion* stage. The validity of the data is tested with the degree of *credibility* that includes; extension of observation, increased perseverance, and triangulation. The results showed that informal sector

## *ANALISIS KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PEKERJA WANITA SEKTOR INFORMAL PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI KOTA PALEMBANG*

workers were in the productive age group and lower school education. The vast majority of them have skills but are not used as venture capital because of limited funds, most of them also have never attended training, worked as traders and have no knowledge of MEA.

**Keywords:** *demographic characteristics, women workers, informal sector*

### **Pendahuluan**

Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sejak Desember 2015 membawa banyak perubahan dalam dinamika pasar Indonesia. Arus mobilisasi pasar bukan hanya pada jenis barang dan investasi tetapi juga tenaga kerja terampil. MEA adalah pasar tunggal bagi negara ASEAN yang berarti persaingan barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja bukan lagi pada skala lokal tetapi telah mencapai taraf internasional. Berikut tambahan penjelasan Abdurofiq (2015:254),

“Dalam beberapa kondisi, perekonomian Indonesia mengalami tantangan dalam menghadapi MEA 2015. Pemberlakuan MEA pada 2015 menjadi sebuah realita yang harus dihadapi oleh berbagai sektor industri, ditengah perbandingan kebutuhan pasar dengan tenaga kerja industri yang terjadi saat ini. Ekonomi nasional saat ini banyak didorong oleh kontribusi industri kreatif dengan melibatkan banyak generasi muda yang memiliki kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)”.

Untuk menghadapi kondisi ini, tenaga kerja yang berkualitas dan terampil jelas sangat diperlukan supaya dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja selain pada sektor formal juga terjadi pada sektor informal. Sektor informal bahkan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah

yang lebih besar. Keterbatasan kesempatan kerja pada sektor formal membuat sektor informal menjadi alternatif pilihan bagi para tenaga kerja yang gagal memasuki sektor pekerjaan formal.

Sektor informal sarat dengan permasalahan terutama terkait dengan para pekerjanya. Menurut Pitoyo (2007:129) “gambaran umum sektor informal masih identik dengan aktivitas ekonomi skala kecil, kurang produktif, dan tidak mempunyai prospek yang menjanjikan”. Selama ini sektor informal digambarkan sebagai wadah bagi para pekerja yang memiliki kualitas rendah yang hanya memanfaatkan sektor ini untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal menurut Rolis (2013:93) “sektor informal, dengan segala keterbatasannya menyimpan kekuatan luar biasa sebagai penyangga ribuan, bahkan jutaan kelangsungan hidup warga. Dalam banyak penelitian, sektor ini mampu menjadi tempat berlindung hingga 70 persen tenaga kerja di negara sedang berkembang”. Sektor informal menjadi lahan yang baik bagi para pekerja wanita. Penyebabnya adalah sektor informal memiliki waktu yang fleksibel sehingga memudahkan para pekerja wanita mengatur waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga. Berikut ini adalah pernyataan Lamba (2011:156) terkait hal tersebut.

“Kehadiran sektor informal perkotaan dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang muncul sebagai akibat dari situasi pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi di kota. Mereka yang memasuki usaha

berskala kecil ini, pada mulanya bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan. Kebanyakan dari mereka yang terlibat adalah orang-orang migran darigolongan miskin,berpendidikan rendah dan kurang terampil. Latar belakang mereka bukanlah pengusaha dan juga bukan kapitalis yang mengadakan investasi dengan modal yang besar. Namun harus diakui bahwa banyak di antara mereka telah berhasil mengembangkan usahanya dan secara perlahan-lahan memasuki dunia usaha berskala menengah bahkan berskala besar”.

Keterbatasan ekonomi, suami yang tidak/ belum bekerja dan mengisi waktu luang adalah bagian dari alasan para pekerja wanita memilih sektor informal. Dengan demikian peran wanita saat ini bukan hanya sebagai ibu rumah tangga yang ikut membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu kepedulian terhadap pekerja wanita harus lebih ditingkatkan. Ahdiah (2013:1090), menyatakan sebagai berikut.

“Di Indonesia, kepedulian terhadap eksistensi perempuan adalah dengan adanya instruksi Presiden RI No.9 tahun 2000 tentang “Pengarutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional”. Sasaran strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan

permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan”.

Bentuk kepedulian ini harus semakin ditingkatkan terutama terkait permasalahan saat ini, yaitu kondisi pasar ketenagakerjaan yang telah berubah. Keadaan pasar ekonomi bukan hanya milik penduduk lokal melainkan telah menjadi milik kawasan negara ASEAN. Informasi ini penting untuk diketahui oleh pekerja wanita sektor informal supaya mulai dari sekarang, mereka dapat meninggalkan kebiasaan dan budaya lama yang menganggap sektor informal hanya sebagai pelarian. Pekerja wanita sektor informal harus mempersiapkan segala hal, baik yang berhubungan dengan pendidikan, keterampilan, kualitas barang, dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas mereka di ranah ekonomi ASEAN. Berdasarkan data BPS Kota Palembang 2016 jumlah tenaga kerja sektor informal lebih tinggi dibandingkan dengan sektor formal.

Tabel 1 menunjukkan jumlah pekerja sektor informal lebih tinggi dibandingkan dengan yang formal. Hal ini berarti peranannya dalam mengatasi pengangguran di Kota Palembang cukup besar. Sektor informal yang biasanya ditekuni oleh pekerja wanita, misalnya adalah pedagang, jasa, perhotelan, industri, dan pertanian. Berdasarkan data BPS Kota Palembang bidang perdagangan merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dimasuki oleh pekerja wanita.

**Tabel 1 Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1	Formal	103.939
2	Informal	222.345

Sumber: Palembang dalam Angka 2016



## *ANALISIS KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PEKERJA WANITA SEKTOR INFORMAL PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI KOTA PALEMBANG*

Besarnya jumlah pekerja wanita sektor informal seharusnya menjadi modal bagi pembangunan ekonomi kreatif masyarakat yang dapat mendukung peningkatan ekonomi bangsa. Untuk menjadi sektor yang diandalkan, pekerjaanya juga harus memiliki karakteristik yang baik, seperti; pendidikan tinggi, dan berketerampilan sehingga harapan untuk perbaikan pada sektor informal akan menjadi kenyataan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan meneliti karakteristik demografi pekerja wanita sektor informal pada era MEA di Kota Palembang. Tujuannya adalah melihat kondisi di lapangan tentang karakteristik pekerja wanita sektor informal. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yang berhubungan dengan pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengali karakteristik demografi pekerja wanita sektor informal di pada era MEA di Kota Palembang secara mendalam. Penelitian ini melakukan kajian pada situasi sosial yang meliputi karakteristik demografi, pekerja wanita, sektor informal dan MEA. Permasalahan penelitian difokuskan pada karakteristik demografi para pekerja wanita sektor informal era MEA di Kota Palembang. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan kondisi kerarakteristik demografi pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang pada era MEA.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dari informan yang adalah para pekerja wanita sektor

informal yang ada di Kota Palembang. Selain itu, peneliti menggunakan data sekunder seperti: data BPS, jurnal, dan buku. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik *reduction*, *display*, dan *conclusion*. Sementara itu, teknik keabsahan data menggunakan derajat *credibility* dengan tahapan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dan pengecekan data dari anggota peneliti.

### **Pembahasan**

#### *Karakteristik Demografi Pekerja Wanita Sektor Informal pada Era MEA di Kota Palembang*

Karakteristik demografi adalah ciri-ciri yang melekat pada seorang individu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Menurut Kotler dan Armstrong (2001:101) dalam Yoga (2013:1109), demografi adalah ilmu tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, jenis kelamin, ras, mata pencaharian, dan statistik lainnya. Sementara itu, penelitian Handoyono (2015:3323) mengarahkan penelitiannya pada karakteristik demografi, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya Riwantoko (2013:81) dalam penelitiannya menyatakan bahwa karakteristik demografi penduduk, seperti usia, jenis kelamin dan pekerjaan berpengaruh pada pola pendapatan ketika menjalankan usaha perdagangan. Penelitian tentang karakteristik demografi juga dilakukan oleh Alfredi (2013:11) seperti berikut ini.

“umur, jumlah keluarga yang terlibat, pendidikan dan jam kerja efektif pendapatan petani penyadap dapat dilakukan dengan meningkatkan tarif getah per kg nya yang berlaku sehingga dapat

memberikan rangsangan lebih kepada petani penyadap untuk lebih giat lagi menyadap dan menjadikan penyadapan sebagai pekerjaan utama sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka”.

Kemampuan dan kualitas tenaga kerja dapat diidentifikasi dari karakteristik demografi yang melekat pada dirinya. Pada era MEA salah satu standar yang digunakan untuk tenaga kerja adalah terampil. Yang dimaksud dengan terampil disini adalah tenaga kerja pada era MEA harus memiliki pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan yang baik sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam era MEA. Penelitian ini telah mengkaji karakteristik demografi yang ada pada pekerja wanita sektor informal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kondisi pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang saat ini khususnya pada era MEA. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal (*single market and production base*). Penerapannya akan terwujud dalam tiga bentuk, yaitu terjadinya 1) aliran bebas barang/jasa, 2) aliran bebas investasi dan 3) aliran bebas tenaga kerja terampil atau profesional (Usman, 2016:33). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 berikut. *“To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic goods, services, investment, skill labor economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.”* (Abdurofiq, 2015:252). MEA menjadi wadah bagi negara di kawasan Asia Tenggara dalam menjalankan roda perekonomian yang akan meliputi mobilisasi barang, modal/investasi, dan tenaga kerja terampil.

Kajian ini diperlukan karena pekerja wanita merupakan aset bangsa dalam menopang perekonomian, baik skala lokal maupun nasional. Pendapat ini diungkapkan juga oleh Aswiyati (2016:2) yang mengatakan bahwa “wanita Indonesia menjadi tumpuan harapan untuk mendorong laju dan keberhasi-lan pembangunan, baik secara luas maupun sempit”. Sementara itu, Wauran (2012:1) mengajukan pendapatnya tentang hal itu sebagai berikut.

“Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kotemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja”.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita bekerja. Penelitian Soebyakto dan Armansyah (2016:131) menunjukkan hal berikut ini.

*“The dominant factors that cause migrant women working in the informal sector is the desire to help the family income, flexible working time, The desire to help the family income is the biggest cause of migrant women working in the informal sector with the percentage of 100% of the number of migrant women working in the informal sector said that the reason they work in the informal sector because they want to help the family income”.*

**Tabel 2 Jumlah Pekerja Wanita Sektor Informal Berdasarkan Kelompok Usia**

Kelompok Umur	Jumlah	Keterangan
15-19	17	
20-24	35	
25-29	6	
30-34	6	
35-39	9	Kelompok Usia Produktif
40-44	15	
45-49	8	
50-54	4	
55-59	6	
60-64	2	
65+	0	Non produktif
<b>Total</b>	<b>108</b>	

Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2017

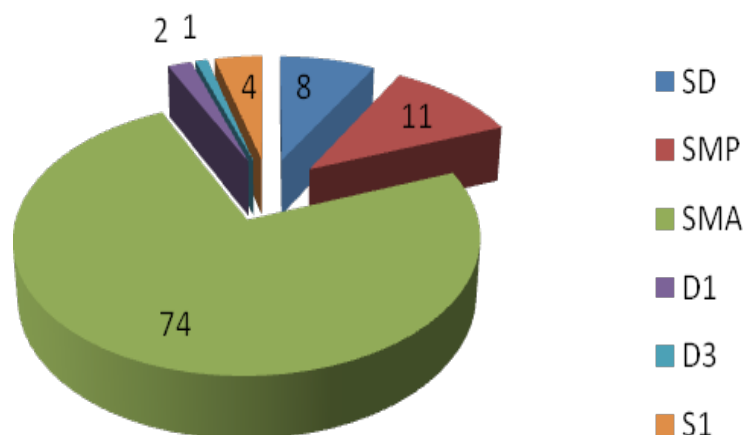
Berdasarkan temuan di atas dapat dikatakan bahwa penyebab dominan wanita bekerja di sektor informal disebabkan keinginan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Menurut Risnawati (2016:117) faktor seperti pendapatan suami yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan banyaknya tanggungan keluarga juga merupakan penyebab wanita memutuskan untuk bekerja pada sektor informal. Sementara itu, karakteristik demografi yang peneliti lihat pada penelitian ini meliputi usia, pendidikan, keterampilan, pelatihan, pekerjaan, dan pengetahuan tentang MEA. Uraianya dapat dilihat pada bagian di bawah ini.

#### (1) Usia

Usia sangat menentukan tingkat produktivitas seorang pekerja. Jika usia pekerja terlalu muda perkembangannya dalam meningkatkan kualitas diri seperti meningkatkan pendidikan dan keterampilan akan terganggu. Namun, jika terlalu tua, maka tingkat produktivitas juga akan menurun sehingga kesulitan mengikuti

persaingan global. Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pekerja wanita sektor informal merupakan kelompok usia produktif, yaitu antara 20-24 tahun, yang dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa kelompok usia 20-24 mendominasi pekerja wanita sektor informal dan jika dikelompokkan berdasarkan usia maka semua pekerja wanita di atas merupakan kelompok usia produktif. Berdasarkan hasil penelitian Dwipawati (2013:5) puncak umur pekerja wanita adalah antara 21-25 tahun dan tingkat pendidikan yang mendominasi adalah SMA/SMK. Hal ini karena keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya jika dilihat dari kelompok usia, maka pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang masih tergolong produktif dan mampu bersaing. Yang perlu dilakukan kemudian adalah manajemen untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas para pekerja wanita sektor informal. Dengan demikian pada era MEA, mereka mampu bersaing dan ikut berpartisipasi dalam wadah pasar ASEAN.



Sumber: Pengolahan Data Lapangan Tahun 2017

**Gambar 1** Persentase Pekerja Wanita Berdasarkan Tingkat Pendidikan

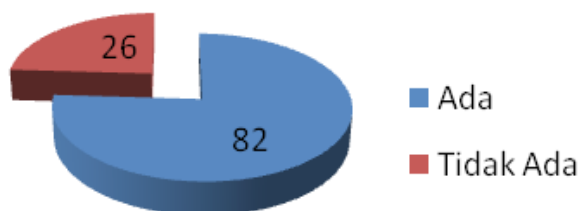
(2) Pendidikan

Pendidikan juga menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pekerja. Semakin baik pendidikan seseorang akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan individu tersebut. Dalam era MEA, pendidikan minimal SMA/SMK sangat diperlukan sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja ASEAN. Peneliti menemukan bahwa tingkat pendidikan pekerja wanita di Kota Palembang mayoritas adalah setara SMA ke bawah. Datanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pekerja wanita sektor informal dominan pada level SMA disusul

oleh SMP dan SD. Hal ini berarti, jika dilihat dari karakteristik pendidikan pekerja wanita sektor informal yang ada di Kota Palembang masih tergolong rendah. Alasannya adalah karena tingkat pendidikan pekerja wanita masih banyak dari level SMA ke bawah. Padahal pada era MEA tingkat pendidikan yang diharuskan adalah SMA/SMK ke atas.

Kondisi ini menjelaskan bahwa walaupun usia pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang tergolong produktif, tingkat pendidikan mereka masih rendah. Hal itu disebabkan oleh latar belakang keluarga mereka yang kurang mampu sehingga terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan. Oleh sebab itu, perlu



Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2017

**Gambar 2** Jumlah Pekerja Wanita Berdasarkan Keterampilan

perhatian khusus dari pemerintah untuk mengupayakan agar para pekerja wanita sektor informal, terutama yang masih berusia 15-24 tahun, dapat ditingkatkan pendidikan dan keterampilannya. Dengan demikian, nantinya mereka dapat memiliki pendidikan yang memadai.

### (3) Keterampilan

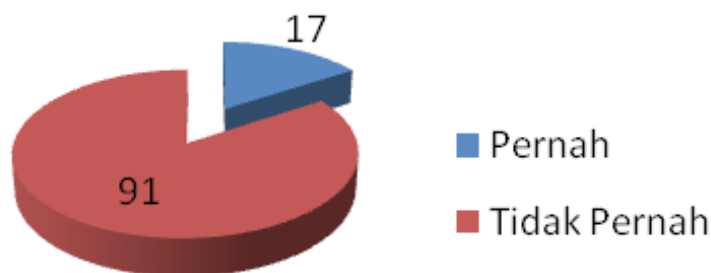
Pada hakikatnya pendidikan berdampak pada keterampilan, sehingga jika mereka berpendidikan tinggi, keterampilan yang dimiliki juga baik. Namun, hal ini berbeda pada kondisi pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang. Mayoritas mereka tidak memiliki keterampilan untuk digunakan dalam memperoleh pendapatan.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang mengaku memiliki keterampilan yang cukup memadai untuk dapat digunakan sebagai alat bekerja memperoleh pendapatan. Beberapa diantara mereka memperoleh keterampilan dengan cara belajar dari keluarga, seperti orang tua, paman, bibi, teman dan lain-lain. Ada juga yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, bahkan ada juga yang membayar sendiri untuk mengikuti kursus pelatihan namun jumlah mereka

relatif kecil. Jenis keterampilan yang dimiliki oleh pekerja wanita sektor informal adalah, seperti menjahit, memasak, menari, salon, dan menyablon. Meskipun mayoritas pekerja wanita memiliki keterampilan, tetapi tidak serta merta keterampilan tersebut dapat mereka gunakan sebagai modal bekerja. Banyak pekerja wanita sektor informal yang tidak menggunakan keterampilan yang mereka miliki dikarenakan keterbatasan modal untuk mengembangkan keterampilan yang mereka miliki sehingga akhirnya mereka memilih pekerjaan yang mudah dijalankan seperti; berdagang, dan menjadi pelayan toko atau karyawan.

### (4) Pelatihan

Pelatihan merupakan hal yang penting bagi para pekerja wanita sektor informal. Melalui pelatihan mereka dapat meningkatkan keterampilan dan memiliki pemikiran dapat mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik. Selain itu, adanya pelatihan akan meningkatkan keterampilan pekerja wanita sektor informal dalam mengolah dan meningkatkan produk yang mereka hasilkan. Tentunya pelatihan tersebut harus relevan dengan pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh para pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang.



Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2017

**Gambar 3** Jumlah Pekerja Wanita Sektor Informal Berdasarkan Kegiatan Pelatihan

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas pekerja wanita sektor informal menyatakan mereka tidak pernah mengikuti pelatihan. Faktanya menunjukkan bahwa dari 108 pekerja wanita sektor informal hanya 17 orang yang pernah mengikuti pelatihan, sedangkan 91 lainnya tidak pernah mengikuti pelatihan. Kondisi ini menjelaskan bahwa rendahnya keterampilan, produktivitas, dan kualitas pekerja wanita sektor informal merupakan hal yang wajar karena mereka kebanyakan tidak atau belum pernah mengikuti pelatihan, baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah hal itu disebabkan oleh kurang sosialisasi dari pemerintah atau pihak swasta ketika mengadakan pelatihan atau karena pekerja wanita sektor informal kurang peduli untuk mengikuti pelatihan? Namun, yang paling penting adalah adanya kerja sama antara pemerintah/swasta dan masyarakat, terutama pekerja wanita, sehingga dapat mewujudkan tenaga kerja terampil era MEA.

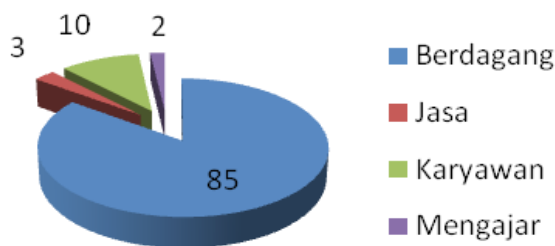
#### (5) Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dilakukan akan berpengaruh pada pendapatan yang dihasilkan. Pada sektor informal pekerjaan yang paling banyak ditekuni adalah sebagai pedagang.

Hal yang sama juga terjadi dengan pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang yang mayoritas bekerja sebagai pedagang.

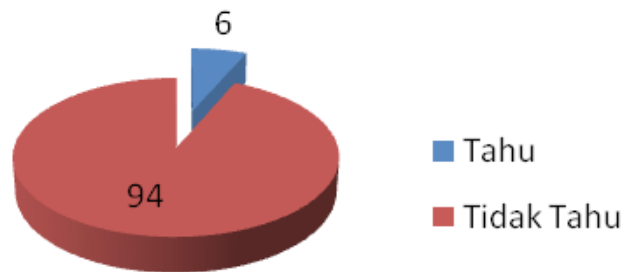
Gambar 4 menunjukkan bahwa dari 108 pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang terdapat 85 orang yang bekerja sebagai pedagang, 10 orang sebagai karyawan, 3 orang pada bidang jasa, dan 2 orang bekerja sebagai pengajar privat. Kondisi ini juga sama seperti kebanyakan kajian tentang sektor informal lainnya yang menunjukkan bahwa kebanyakan sektor informal yang ditekuni oleh para pekerjanya adalah berdagang.

Alasan pekerja wanita sektor informal memilih berdagang adalah karena waktu kerja yang lebih fleksibel sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Sebagai seorang wanita yang memiliki multiperan, maka pekerja wanita harus dapat membagi waktu antara bekerja, mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, dan lain-lain. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Abdullah (2001) dalam Warsito (2013:149) "dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat anak dan melayani suami". Pekerja wanita sektor informal mengungkapkan bahwa berdagang adalah pilihan yang tepat karena mereka dapat bekerja sesuai keinginan mereka tanpa ada aturan atau paksaan dari



Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2017

**Gambar 4** Jumlah Pekerja Wanita Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2017

**Gambar 5** Jumlah Pekerja Wanita Berdasarkan Pengetahuan Tentang MEA

Melihat kondisi ini seharusnya pemerintah dan pihak yang terkait mampu memberikan dukungan berupa pinjaman modal bagi para pekerja wanita sektor informal sehingga mereka dapat mengembangkan usaha perdagangan yang mereka jalankan. Selama ini pekerja wanita sektor informal yang bekerja sebagai pedagang hanya bekerja seadanya tanpa ada pemikiran untuk meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Padahal jika sektor ini mendapat perhatian yang baik maka dapat dipastikan akan bermunculan ekonomi-ekonomi kreatif dari masyarakat sehingga akan menghidupkan ekonomi kerakyatan.

#### (6) Pengetahuan tentang MEA

Sejak Desember 2015 MEA telah dilaksanakan oleh negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sebagai masyarakat ASEAN, Indonesia menjadi bagian dari pasar tunggal ASEAN sehingga barang, modal/ investasi, dan tenaga kerja terampil bebas masuk di Indonesia. Bagi kalangan tertentu, seperti insan pendidikan mungkin tidak asing lagi mendengar kata MEA. Namun bagi kalangan masyarakat pada umumnya belum diketahui sejauh mana pemahaman mereka tentang MEA. Peneliti menemukan fakta bahwa mayoritas pekerja wanita sektor

informal di Kota Palembang yang dijadikan informan dalam penelitian ini mengatakan tidak mengetahui bahkan ada yang belum pernah mendengar tentang MEA.

Gambar 5 menunjukkan 94 orang dari 108 pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang mengatakan bahwa mereka belum mengetahui dan mendengar tentang MEA. Sangat miris karena program yang begitu besar dan meliputi wilayah ASEAN belum pernah didengar oleh masyarakat bawah. Kondisi ini menguatkan alasan pekerja wanita sektor informal masih menjalankan usahanya dengan cara dan pola yang sama. Penyebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui tentang tantangan yang akan mereka hadapi di depan. Melihat hal ini, sangat perlu dilakukan sosialisasi tentang MEA melalui berbagai media dan partisipasi sehingga mata masyarakat Indonesia dan Kota Palembang khususnya akan terbuka tentang tantangan yang akan mereka hadapi. Jika hal itu dilakukan, maka diharapkan kesadaran para pekerja sektor informal di Kota Palembang, khususnya wanita dapat ditingkatkan demi produktivitas dan kualitas diri yang lebih baik serta berhasil usaha yang dijalankan. Dengan demikian, pada saatnya nanti penduduk Indonesia dan Kota Palembang pada khususnya akan menjadi pemain dalam kancah MEA.

## **Penutup**

### *Kesimpulan*

Karakteristik demografi yang melekat pada pekerja akan mempengaruhi kemampuan, kualitas, dan produktivitasnya dalam bekerja. Penelitian ini menemukan bahwa pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang memiliki karakteristik demografi, seperti termasuk dalam kelompok usia produktif, yaitu kelompok yang paling dominan ada pada usia 20-24 tahun.

Pendidikan pekerja wanita sektor informal mayoritas setingkat SMA ke bawah. Pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang mayoritas memiliki keterampilan, tetapi tidak digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha karena keterbatasan dana. Kemudian mayoritas pekerja wanita sektor informal belum mengikuti pelatihan. Pekerjaan yang banyak dilakukan oleh pekerja wanita sektor informal adalah berdagang. Selanjutnya pekerja wanita sektor informal mayoritas tidak memiliki pengetahuan tentang MEA sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas agar dapat bersaing dalam era MEA.

### *Saran*

Pemerintah ataupun pihak yang terkait harus dapat melakukan strategi dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pekerja wanita sektor informal di Kota Palembang sehingga mampu bersaing dalam era MEA. Bentuk strategi yang dapat dilakukan seperti; melakukan pelatihan, peminjaman modal dan yang terpenting melakukan sosialisasi tentang MEA ke masyarakat secara lebih baik. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar dapat dilakukan

kajian tentang cara atau model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pekerja wanita sektor informal. Selain itu juga perlu dilakukan kajian tentang optimalisasi pedagang sektor informal supaya dapat berkembang dan mampu bersaing dalam era MEA.

## **Daftar Pustaka**

- Abdurofiq, Atep. 2015. "Menakar Pengaruh masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia". *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1543/pdf>. Diunduh pada 06 Mei 2017, 13:11 WIB.
- Ahdiah, Indah. 2013. "Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat". *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 5, No. 2, Oktober.
- Alfredi; dkk. 2013. "Pengaruh Karakteristik Demografi, Sosial, dan Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Penyadap Getah Pinus di Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa". <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/41aa84c963c5a5244fb87db4d09886cb.pdf>, Diunduh pada 06 Mei 2017, 10:32 WIB.
- Aswiyati, Indah. 2016. "Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat". *Jurnal Holistik*, Tahun IX, No. 17 / Januari-Juni..
- Dwipawati, Ni Made Gunarsih. 2013. "Keterlibatan Pekerja Wanita pada Industri Kerajinan Seni Ukir dan Lukis di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (Tinjauan Geografi Ekonomi)". [ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/download/1223/1087](http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/download/1223/1087), Diunduh pada 16 April 2017, 21:31 WIB.
- Handoyono, I Gede Suryana Ryan; Putu Yudi



*ANALISIS KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PEKERJA WANITA SEKTOR INFORMAL  
PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI KOTA PALEMBANG*

- Setiawan. 2015. "Pengaruh Karakteristik Demografi dan Ketidakpuasan Terhadap Perilaku Mengeluh Konsumen pada Bengkel Service Sepeda Motor Yamaha di Ponorogo Denpasar Bali". E-jurnal Manajemen Unud, Vol.4, No. 10, 2015: 3317-2245.
- Lamba, Arung. 2011. "Kondisi Sektor Informal Perkotaan dalam Perekonomian Jayapura-Papua". Jurnal Ekonomi Bisnis, TH. 16, No. 2, Juli 2011. <http://fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/9-Arung-Lamba.pdf>, Diunduh pada 06 Mei 2017, 11:37 WIB.
- Pitoyo, Agus Joko. 2007. "Dinamika Sektor Informal di Indoensia Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro". Jurnal Populasi, 18(2), <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/viewFile/12081/8868>, Diunduh pada 06 Mei 2017, 12:52 WIB.
- Risnawati. 2016. "Peran Ganda Istri yang Bekerja dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit pada PT. Bumi Mas Agro Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur". eJournal Sosiatri-Sosiologi, 2016, 4(3): 113-126.
- Riwantoko, Mardheka Ndaru; Abdur Rofi. 2013. "Karakteristik Demografi, Sosial, dan Ekonomi serta Pola Pendapatan Usaha Perdagangan di Sepanjang Jalan Jogja-Solo Kabupaten Klaten". <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/viewFile/130/127>, Diunduh pada 06 Mei 2017, 10:20 WIB.
- Rolis, Moh. Ilyas. 2013. "Sektor Informal Perkotaan dan Ikhtiar Pemberdayaanya". Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No. 2, Oktober.
- Soebyakto, Bambang Bemby; Armansyah. 2016. "Migran Women Working at Informal Sectors: Empirical Study in Kuto Batu Village, Ilir Timur II Palembang City". International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6, No. 4; April 2016.
- Usman, Fajar. 2016. "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Daya Saing Investasi Indonesia". Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 3, No. 1, Jan-Mar.
- Warsito. 2013. "Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat". Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2013: 148-163.
- Wauran, Patrick C. 2012. "Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD)", Vol.7, No. 3, Edisi Oktober 2012. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=107033&val=997>, Diunduh pada 06 Mei 2017, 10:54 WIB.
- Yoga, I Made Sedana; Gede Ketut Warmika. 2013. "Hubungan Karakteristik Demografi Dengan Perilaku Keluhan Konsumen". <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=82483&val=989>, Diunduh pada 06 Mei 2017, 09:50 WIB.

**DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS  
PERSATUAN NEGARA**

Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Agus Joko Pitoyo (*e-mail*: aguspit@ugm.ac.id)

**Abstrak**

Banyak pandangan yang menyebutkan bahwa etnisitas merupakan penghambat untuk kesatuan dan persatuan. Hal penting yang menjadi tantangan ke depan adalah mendudukan variasi etnik sebagai bentuk kemajemukan bangsa yang mendukung persatuan negara. Dengan menggunakan data Sensus Penduduk di Indonesia, yakni Sensus Penduduk 1930, Sensus Penduduk 2000 dan Sensus Penduduk 2010, tulisan ini mencoba mengungkapkan dinamika etnis di Indonesia dalam perspektif historis. Penelitian ini mendiskusikan dinamika perkembangan etnik di Indonesia serta melihat bahwa keanekaragaman etnik tersebut dapat menjadi tantangan dan pemacu dalam persatuan negara. Melalui masyarakat multikultural yang saling menghargai perbedaan kebudayaan, akan dapat tercipta masyarakat yang memiliki pandangan, jiwa, dan tujuan yang sama. Selain itu, perwujudan dari perkembangan etnik di Indonesia juga harus disertai dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang tidak hanya memihak pada golongan mayoritas saja karena asas yang dikedepankan adalah persamaan dan menghargai hak atas perbedaan kebudayaan.

**Kata kunci:** etnisitas, persatuan, kebangsaan, keanekaragaman

**DYNAMICS OF ETHNIC DEVELOPMENT IN INDONESIA IN THE CONTEXT OF  
NATIONAL UNITY**

**Abstract**

Many views suggest that ethnicity is an obstacle to the unity. It is important to understand the variety and complexcity of ethnic in Indonesia in the context of unity. Using data Indonesian Cencus in 1930, 2000 and 2010 this study attempts to reveal ethnic dynamics in Indonesia in a historical perspective. This study discusses the dynamics of ethnic development in Indonesia as well as sees that ethnic diversity can be a challenge and a driver in the unity of the State. Through a multicultural society that respects cultural differences, it will create a society with the same vision, soul and purpose. In addition, the embodiment of ethnic development in Indonesia also must be accompanied by the support of government policies that not only favor certain majority group because the principle of equality is equality and respect for the right to cultural differences.

**Keywords:** *ethnicity, unity, nation, diversity*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara dengan komposisi sukuyang sangat beragam. Hasil dari kerjasama BPS dan ISEAS (Institute of South Asian Studies) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ciri bahwa negera ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Telah diakui di tingkat internasional bahwa masyarakat Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan masyarakat paling majemuk di dunia selain Amerika Serikat dan India (Sudiadi, 2009).

Sejak kemerdekaan Indonesia, data tentang etnisitas sangat terbatas, bahkan sensus penduduk yang oleh Pemerintah Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Baru belum menyentuh etnisitas (BPS, 2011). Hal itu terkait dengan kebijakan politik Pemerintah Indonesia yang berpandangan bahwa perbedaan suku yang dibesar-besarkan merupakan sebuah persoalan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah pun berhati-hati dalam hal ini. Melalui sensus penduduk yang dilaksanakan BPS, pemerintah menghapus pertanyaan mengenai etnisitas dengan alasan pertanyaan tersebut akan mendorong sikap sukuisme dan membahayakan persatuan bangsa.

Survei etnisitas yang pertama kali dilakukan adalah tahun 1930 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Banyak diantara para peneliti menggunakan data sensus tersebut sebagai acuan komposisi sukudi Indonesia. Pemerintah berhati-hati dalam menonjolkan perbedaan etnis. Pemerintah masih beranggapan bahwa etnisitas merupakan hambatan untuk

tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pemerintah membentuk opini secara sistematis bahwa etnisitas merupakan konotasi negatif terhadap persatuan dan kesatuan (Tirtosudarmo, 2002). Hal senada juga diungkapkan oleh Soejatmiko (1983) seperti dikutip Abdullah dalam Jurnal *Etnovisi* Volume II Nomor 1 Tahun 2006 bahwa pemerintah Orde Baru menganggap etnisitas dan kesukuan merupakan penghambat pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan adalah syarat utama untuk mengatasi perselisihan antarsuku (Abdullah, 2006). Atas beberapa diskursus tersebut, tulisan ini hendak secara terperinci memetakan dan menjelaskan dinamika suku di Indonesia dalam perspektif historis.

## **Persebaran Suku di Indonesia**

Salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Dalam upaya pemerataan penduduk dan pemerataan pembangunan, pemerintah melanjutkan program yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga perkebunan di pulau-pulau Indonesia yang masih jarang penduduknya. Program kolonisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia dengan program Transmigrasi. Program ini telah dilaksanakan utamanya pada era pemerintahan Orde Baru dengan intensif (Tirtosudarmo, 2007).

Kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan penduduk dari pulau yang padat penduduk menuju pulau yang berpenduduk jarang ini berimplikasi pada komposisi penduduk yang menjadi lebih heterogen di pulau tujuan. Pengiriman transmigran oleh pemerintah yang menyebabkan komposisi penduduk daerah penerima menjadi lebih

heterogen akan menciptakan proses akulturasi budayasehingga terjadi variasi suku dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, heterogenitas suku cenderung akan lebih banyak dijumpai di daerah-daerah yang memiliki sejarah program transmigrasi.

Selama ini Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terbesar dan paling maju. Pulau Jawa merupakan pusat pembangunan dengan Jakarta sebagai ibukota negara yang juga terletak di Pulau Jawa. Selain ibukota negara, Pulau Jawa juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mobilitas penduduk luar Jawa menuju Pulau Jawa pun tinggi. Sebagai catatan, tahun 1990, persentase penduduk Pulau Sumatera yang bermigrasi ke Jawa adalah 90 persen dari total penduduk Pulau Sumatera yang melakukan migrasi. Angka ini meningkat menjadi 91,3 persen tahun 2000. Bukti yang lainnya adalah migran dari Pulau Kalimantan tahun 1990 sebesar 80 persen menuju Pulau

Jawa dan tahun 2000 persentasenya tetap tinggi, yakni 79,5 persen. Begitu pun halnya dengan pulau-pulau lainnya, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua, persentase migran yang menuju Jawa juga relatif tinggi (BPS, 2015). Mencermati kecenderungan arus migrasi dari luar Pulau Jawa menuju Pulau Jawa yang terus tinggi, maka heterogenitas penduduk di seluruh wilayah Indonesia cenderung akan semakin heterogen. Hal ini bersifat timbal balik dan saling dukung, dalam arti tidak hanya pulau di luar Jawa sebagai tujuan transmigrasi, tetapi juga Pulau Jawa sebagai tujuan migrasi penduduk luar Jawa. Tentu saja multikulturalisme akan terus berlangsung dan semakin menguatkan perbedaan dalam persatuan Indonesia (Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1, tersaji 25 suku utama di Indonesia tahun 2000 dengan perincian 11 suku besar dengan persentase populasi lebih dari satu persen dan 14 suku lainnya dengan persentase 0,2-1 persen. Tiga suku terbesar

**Tabel 1 Distribusi Suku di Indonesia menurut Urutan Peringkat Tahun 2000**

Urutan Peringkat	Suku	Jumlah	Persen	Urutan Peringkat	Suku	Jumlah	Persen
1	Jawa	83.865.724	41,71	14	Cirebon	1.890.102	0,94
2	Sunda	30.978.404	15,41	15	Tionghoa Gorontalo/	1.738.936	0,86
3	Melayu	6.946.040	3,45	16	Huidanaio	974.175	0,48
4	Madura	6.771.727	3,37	17	Aceh	871.944	0,43
5	Batak	6.076.440	3,02	18	Toraja	750.828	0,37
6	Minangkabau	5.475.145	2,72	19	Nias/Kono/Niha	731.620	0,36
7	Betawi	5.041.688	2,51	20	Minahasa Buton, Butung,	659.209	0,33
8	Bugis	5.010.421	2,49	21	Butong	578.231	0,29
9	Banten	4.113.162	2,05	22	Atoni-Metto	568.445	0,28
10	Banjar	3.496.273	1,74	23	Manggarai	566.428	0,28
11	Bali	3.027.525	1,51	24	Bima	513.055	0,26
				25	Mandar	504.827	0,25

Sumber: Suryadinata, dkk., 2003

**Tabel 2 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Sumatera  
Tahun 2000-2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi/Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Aceh					
	- Aceh	871.944	50,32	- Aceh	3.819.955	85,382
	- Jawa	274.926	15,87	- Jawa	400.023	8,941
	- Lainnya	164.678	9,5	- Batak	147.295	3,292
2.	Provinsi Sumatera Utara					
	- Batak	4.827.264	41,95	- Batak	5.785.716	44,75
	- Jawa	3.753.947	32,62	- Jawa	4.319.719	33,41
	- Nias	731.620	6,36	- Nias	911.820	7,05
3.	Provinsi Sumatera Barat					
	- Minangkabau	3.747.343	88,35	- Minangkabau	4.219.729	87,33
	- Batak	187.656	4,42	- Batak	222.549	4,61
	- Jawa	176.023	4,15	- Jawa	217.096	4,49
4.	Provinsi Riau					
	- Melayu	1.792.558	37,74	- Melayu	1.828.815	33,20
	- Jawa	1.190.015	25,05	- Jawa	1.608.268	29,20
	- Minangkabau	534.854	11,26	- Batak	691.399	12,55
5.	Provinsi Jambi					
	- Melayu	910.832	37,37	- Jambi	1.337.521	43,57
	- Jawa	664.931	27,64	- Jawa	893.156	29,10
	- Kerinci	254.125	10,55	- Melayu	164.979	5,37
6.	Provinsi Sumatera Selatan					
	- Melayu	2.142.523	31,25	- SUMSEL	4.120.408	55,36
	- Lainnya	1.965.462	28,67	- Jawa	2.037.715	27,38
	- Jawa	1.851.589	27,01	- Melayu	602.741	8,10
7.	Provinsi Bengkulu					
	- Jawa	348.505	22,31	- Sumatera lainnya	942.027	55,07
	- Rejang	333.635	21,36	- Jawa	387.281	22,64
	- Serawai	279.154	17,87	- SUMSEL	144.197	8,43
8.	Provinsi Lampung					
	- Jawa	4.113.731	61,89	- Jawa	4.856.924	64,06
	- Lainnya	663.026	9,97	- Lampung	1.028.190	13,56
	- Sunda	583.453	8,78	- Sunda	728.684	9,61
9.	Provinsi Bangka Belitung					
	- Melayu Sumatera	Melayu	646.194	- Melayu Sumatera	841.771	69,03
	- Jawa	Tionghoa	103.736	- Jawa	101.655	8,34
	- Tionghoa	Jawa	52.314	- Tionghoa	99.624	8,17

Sumber: BPS, 2010

di Indonesia berturut-turut adalah suku Jawa 41,71 persen (83,9 juta penduduk), suku Sunda 15,41 persen (31 juta penduduk), dan suku Melayu 3,45 persen (7 juta penduduk). Fakta ini menunjukkan bahwa suku Jawa merupakan suku dominan di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Perlu disampaikan bahwa penentuan suku tahun 2000 tersebut dilakukan menggunakan pendekatan *self identity*. BPS menggunakan prinsip *self identity*, yaitu prinsip penentuan suku kepada setiap penduduk dengan memberikan hak sepenuhnya pada tiap individu untuk menentukan sendiri suku yang sesuai. Penduduk diberikan hak menentukan sendiri suku yang tepat melekat pada dirinya. Sebagai contoh, apabila seseorang dilahirkan dari pasangan bapak bersuku Minang dan ibu bersuku Jawa, maka anak tersebut dapat memilih berdasarkan penilaiannya sebagai suku Minang atau Jawa.

### **Perkembangan Suku di Pulau Sumatera**

Demi melihat dinamika persebaran suku di Indonesia, perlu dilakukan pembahasan berdasarkan pulau dengan provinsi sebagai unit analisis terkecil. Dimulai dari Pulau Sumatera, distribusi penduduk menurut suku di pulau ini sangat bervariasi. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera memiliki persebaran suku yang cukup merata. Ini dapat dilihat pada komposisi jumlah penduduk yang ada di beberapa provinsi, seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Di keempat provinsi tersebut tidak ada suku yang mendominasi populasi hingga mencapai 50 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, beberapa suku yang cukup dominan adalah Melayu, Jawa, Minangkabau, Banjar, Bugis, Sunda, Nias, Batak, Kerinci, Tionghoa, Madura, Komerling, dan suku-suku kecil lainnya di Sumatera.

Berdasarkan Tabel 2, terdapat indikasi dominansi suku Jawa di Pulau Sumatera. Suku Jawa adalah suku yang cukup dominan di sembilan provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dan merupakan suku pendatang yang paling dominan. Hampir di semua provinsi, bahkan suku/etnik Jawa menempati peringkat kedua terbesar penduduk setelah suku adat (asli) menurut data tahun 2000-2010. Hal tersebut karena di Pulau Sumatera, kecuali Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, suku Jawa menduduki posisi ketiga terbesar setelah suku adat Minangkabau dan Batak. Terlihat bahwa selisih jumlah antara suku Jawa dengan suku Batak di Provinsi Sumatera Barat dan begitu pula antara suku Jawa dengan suku lainnya di Provinsi Sumatera Selatan relatif kecil.

Hal yang menarik terkait dengan perkembangan suku Jawa di Pulau Sumatera adalah yang terjadi di Provinsi Lampung. Persentase suku Jawa di Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dengan persentase sekitar 61 persen tahun 2000 dan meningkat menjadi 64 persen tahun 2010. Pada 2000, bahkan suku Lampung tidak muncul sebagai tiga suku terbesar di provinsi tersebut dan baru tahun 2010 muncul suku Lampung yang menempati peringkat kedua penduduk terbesar. Perkembangan suku Jawa di Lampung merupakan hasil dari program kolonisasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda tahun 1905. Lampung adalah daerah pertama yang dijadikan tujuan pemindahan penduduk dari Jawa Tengah. Oleh karena itu, suku Jawa sangat banyak di provinsi ini, bahkan sejak sebelum program transmigrasi diresmikan oleh pemerintah pada 1946.

Selain suku Jawa, di Provinsi Lampung juga terdapat suku Bali dan Sunda yang juga cukup dominan. Etnik Tionghoa merupakan salah satu suku yang meningkat jumlahnya secara cukup pesat. Berdasarkan hasil

Sensus Penduduk 2000, etnik suku Tionghoa tidak masuk dalam tiga belas besar suku di Provinsi Lampung. Pada Sensus Penduduk tahun 2010 etnik Tionghoa menempati peringkat 9 dengan 39.979 jiwa atau 0,53 persen.

Selain suku Jawa yang banyak tersebar di Pulau Sumatera, terdapat suku Melayu yang mendominasi di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Akar budaya di keempat provinsi tersebut adalah budaya Melayu. Provinsi hasil pemekaran dari Sumatera Selatan, yakni Jambi dan Bangka Belitung, pun memiliki akar budaya Melayu yang terus berkembang setelah pemekaran. Hal inilah yang menjadikan suku Melayu tetap cukup dominan di Pulau Sumatera. Beberapa suku lain yang juga dominan adalah suku Aceh, Minangkabau, dan Batak dengan dominansi suku Aceh di Provinsi NAD serta suku Minangkabau di Sumatera Barat jika didasarkan pada persebaran selama tahun 2000-2010. Kedua suku tersebut adalah suku asli dengan persentase lebih dari 85 persen. Sementara itu, suku Batak dominan di Sumatera Utara yang juga terbesar selama periode 2000-2010 dengan persentase sekitar 40 persen.

### **Perkembangan Suku di Pulau Jawa**

Pulau Jawa, pulau yang disebut-sebut sebagai pusat pertumbuhan, nyatanya memiliki jumlah penduduk terbesar. Suku Jawa yang merupakan suku asli juga memiliki persebaran terbanyak di hampir semua provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah suku Jawa, suku Sunda adalah suku kedua terbanyak di pulau yang paling padat ini. Suku Sunda dominan berada di Provinsi Jawa Barat yang merupakan suku adat di daerah tersebut. Namun, suku

ini juga ditemukan memiliki persebaran yang besar di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten. Suku ketiga terbanyak secara umum di Pulau Jawa adalah suku Betawi yang memiliki persebaran besar di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sementara itu, muncul suku-suku lainnya yang hanya tersebar di beberapa provinsi tertentu, yaitu suku Banten di Provinsi Banten, suku Madura di Jawa Timur, dan etnik Tionghoa di Jawa Tengah.

Dominansi suku-suku asli dari Pulau Jawa bukan berarti Jawa tertutup terhadap suku di luar Jawa. Hal ini terbukti dengan perkembangan suku-suku dari luar Jawa yang cukup pesat, dalam arti banyak pendatang dari luar Jawa yang kemudian berkembang di Jawa. Beberapa suku luar Jawa dengan persentase cukup tinggi adalah suku Batak, Minangkabau, Melayu, Bugis, Banjar, dan Bali. Hal lain yang cukup menarik adalah perkembangan etnik Tionghoa sebagai etnik yang berasal dari luar negeri yang berkembang pula di Jawa. Etnik Tionghoa selalu berada pada sepuluh besar suku di seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Apabila dilihat secara detail, terdapat dinamika perkembangan suku-suku di Pulau Jawa. Suku Jawa memiliki jumlah terbesar dan persebaran persebarannya pun tersebar menyeluruh di Indonesia. Perkembangan dari 2000 menuju 2010 terus kearah positif. Jika suku Jawa terus berkembang ke arah positif, pada sisi lain banyak suku lain yang justru berkurang dominasinya. Sebagai contoh adalah suku Sunda di Jawa Barat yang turun menjadi sekitar 71 persen pada 2010 dari sebelumnya 73 persen tahun 2000. Begitu pun halnya dengan suku Banten di Provinsi Banten yang turun menjadi sekitar 40 persen pada 2010 dari sebelumnya sekitar 46 persen tahun 2000. Fakta ini menunjukkan adanya pertambahan jumlah absolut, tetapi

jumlah relatifnya (persentasenya) berkurang. Terdapat indikasi perkembangan suku lain yang lebih besar dibandingkan dengan suku adat asli. Hal tersebut tidak lepas dari peran pembangunan daerah yang banyak menarik minat penduduk suku dari daerah lain untuk masuk dan menetap.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat pula bahwa secara umum, suku Jawa di Jawa Tengah dan DIY yang merupakan suku adat asli di kedua provinsi ini mengalami penurunan persentase dari 2000 sampai 2010. Sementara itu, suku Jawa mengalami perkembangan persentase di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pada periode 2000-2010 suku Jawa telah

berkembang pesat, utamanya di Provinsi Banten dari 12,3 persen menjadi 15,63 persen. Fakta ini menjadi bukti bahwa suku Jawa di Pulau Jawa pun berkembang ke provinsi-provinsi yang memiliki adat asli bukan Jawa.

Dominasi suku Jawa di Pulau Jawa tidak mutlak terjadi di seluruh provinsi di Jawa. Terdapat beberapa provinsi dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Sebagai contoh, provinsi dengan heterogenitas suku tersebut tercermin dari data yang dimiliki DKI Jakarta. Beberapa suku yang berkembang di Jakarta, antara lain, adalah Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, Batak, Minangkabau,

**Tabel 3 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Jawa Tahun 2000-2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi / Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	DKI Jakarta					
	- Jawa	2.927.340	35,16	- Jawa	3.453.453	36,17
	- Betawi	2.301.587	27,65	- Betawi	2.700.722	28,29
	- Sunda	1.271.531	15,27	- Sunda	1.395.025	14,61
2.	Provinsi Jawa Barat					
	- Sunda	26297124	73,73	- Sunda	30.889.910	71,87
	- Jawa	3.939.465	11,04	- Jawa	5.710.652	13,29
	- Betawi	1.901.930	5,33	- Betawi	2.664.143	6,20
3.	Provinsi Jawa Tengah					
	- Jawa	30.287.197	97,96	- Jawa	31.560.859	97,73
	- Sunda	323.207	1,05	- Sunda	451.271	1,40
	- Tionghoa	165.531	0,54	- Tionghoa	139.878	0,43
4.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta					
	- Jawa	3.020.157	96,82	- Jawa	3.331.355	96,53
	- Lainnya	36.769	1,18	- Sunda	23.752	0,69
	- Sunda	17.593	0,56	- Melayu	15.430	0,45
5.	Provinsi Jawa Timur					
	- Jawa	27344974	78,68	- Jawa	30.019.156	80,69
	- Madura	6.281.058	18,07	- Madura	6.520.403	17,53
	- Lainnya	439.527	1,26	- Cina	244.393	0,66
6.	Provinsi Banten					
	- Banten	3.785.925	46,86	- Banten	4.321.991	40,77
	- Sunda	1.830.973	22,66	- Sunda	2.402.236	22,66
	- Jawa	986.146	12,2	- Jawa	1.657.470	15,63

Sumber: BPS, 2010



Melayu, Bugis, Madura, Banten, dan Banjar. Tidak ada suku yang tinggal di Jakarta dominan dengan persentase di atas 50 persen. Suku Betawi dan Sunda yang lebih mencitrakan suku asli, bahkan persentasenya berturut-turut hanya 27,65 persen dan 15,27 persen. Fakta heterogenitas suku ini juga terjadi di provinsi baru, yakni Provinsi Banten. Suku terbesar di sana, yakni suku Banten, memiliki persentase kurang dari 50 persen dari total penduduk. Sementara itu, terdapat lima suku utama di provinsi tersebut, yakni Banten (46,86 persen), Sunda (22,66 persen), Jawa (12,2 persen), Betawi (9,62 persen), dan Tionghoa (1,11 persen). Bukti komposisi suku yang beragam dari Provinsi DKI Jakarta dan Banten menunjukkan perkembangan suku tidak hanya di dominasi oleh suku Jawa saja.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan perekonomian, serta pusat berbagai

kegiatan lainnya yang menarik banyak penduduk dari berbagai suku untuk datang dan memperbaiki tingkat perekonomiannya. Perluasan pembangunan *the Greater Jakarta* yang selanjutnya melebar ke Provinsi Banten menjadikan Provinsi Banten sebagai kawasan industri yang terus berkembang pesat. Perluasan pembangunan industri ini menyebabkan arus migrasi menuju Provinsi Banten sangat tinggi sehingga heterogenitas penduduk terus berkembang.

### **Perkembangan Suku di Pulau Kalimantan**

Perkembangan suku di Pulau Kalimantan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan pulau lainnya. Secara umum, suku Banjar adalah suku terbanyak yang terdapat di Pulau Kalimantan kemudian diikuti oleh suku Jawa. Suku Banjar adalah suku terbanyak yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah

**Tabel 4 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Kalimantan  
Tahun 2000 – 2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi/Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Kalimantan Barat					
	- Sambas	444.929	11,92	- Dayak	2.194.009	50,03
	- Tionghoa	352.937	9,46	- Melayu	814.550	18,57
	- Jawa	341.173	9,14	- Jawa	427.333	9,74
2.	Provinsi Kalimantan Tengah					
	- Banjar	435.758	24,2	- Kalimantan Lainnya	588.650	26,67
	- Jawa	325.160	18,06	- Jawa	478.434	21,67
	- Ngaju	324.504	18,02	- Banjar	464.260	21,03
3.	Provinsi Kalimantan Selatan					
	- Banjar	2.271.586	76,34	- Banjar	2.686.627	74,34
	- Jawa	391.030	13,14	- Jawa	524.357	14,51
	- Bugis	73.037	2,45	- Bugis	70.460	1,95
4.	Provinsi Kalimantan Timur					
	- Jawa	721.351	29,55	- Jawa	1.069.826	30,25
	- Lainnya	481.449	19,72	- Bugis	735.624	20,80
	- Bugis	445.820	18,26	- Kalimantan Lainnya	472.179	13,35

Sumber: BPS, 2010

dan Kalimantan Selatan. Kemudian di Provinsi yang sama, suku Jawa menempati peringkat kedua penduduk terbesar selama tahun 2000-2010.

Komposisi suku di setiap provinsi cukup dinamis. Provinsi Kalimantan Barat terdapat suku Sambas, Tionghoa, dan Jawa sebagai tiga besar suku terbesar tahun 2000. Kemudian tahun 2010 susunannya berubah menjadi suku Dayak, Melayu, dan Jawa yang menempati tiga besar suku yang dominan. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tiga suku besar, yaitu Banjar, Jawa, dan Ngaju pada 2000. Urutan tersebut kemudian berubah tahun 2010 menjadi suku Kalimantan lainnya, Jawa, dan Banjar.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan terdapat suku yang sama selama 2000-2010, yaitu Banjar, Jawa, dan Bugis. Hal yang menarik adalah di Provinsi Kalimantan Timur. Suku Jawa, bahkan menempati posisi pertama suku terbesar tahun 2000-2010. Perbedaan urutan suku dominan terjadi pada kedua dan ketiga. Pada 2000 posisi setelah suku Jawa adalah suku Kalimantan lainnya kemudian diikuti suku Bugis. Pada 2010 urutannya berubah, suku Bugis menempati posisi kedua terbesar setelah Jawa dan di peringkat ketiga ada suku Kalimantan lainnya. Ini menunjukkan bahwa suku Bugis yang bukan merupakan suku asli Provinsi Kalimantan Timur juga berkembang cukup pesat.

**Tabel 5 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Sulawesi Tahun 2000 – 2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi/Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Sulawesi Utara					
	- Minahasa	654.720	33,19	- Minahasa	1.019.314	45,03
	- Sangir	390.811	19,81	- Sulawesi Lainnya	879.579	38,86
	- lainnya	252.143	12,78	- Gorontalo	187.163	8,27
2.	Provinsi Sulawesi Tengah					
	- Kaili	412.281	20,5	- Sulawesi lainnya	1.630.937	62,16
	- Bugis	289.492	14,39	- Bugis	409.709	15,62
	- Jawa	166.013	8,25	- Jawa	221.001	8,42
3.	Provinsi Sulawesi Selatan					
	- Bugis	3.266.440	41,9	- Bugis	3.605.693	44,96
	- Makassar	1.982.187	25,43	- Makassar	2.380.208	29,68
	- Toraja	702.951	9,02	- Sulawesi Lainnya	1.578.622	19,68
4.	Provinsi Sulawesi Tenggara					
	- Buton	414.530	23,34	- Bugis	3.605.693	44,96
	- Bugis	341.742	19,24	- Makassar	2.380.208	29,68
	- Tolaki	289.220	16,28	- Sulawesi Lainnya	1.578.622	19,68
5.	Provinsi Gorontalo					
	- Gorontalo	750.541	90,43	- Gorontalo	925.626	89,05
	- Lainnya	34.329	4,14	- Sulawesilainnya	45.113	4,34
	- Jawa	20.427	2,46	- Jawa	35.289	3,40

Sumber: BPS, 2010

### **Perkembangan Suku di Pulau Sulawesi**

Beralih dari tiga pulau sebelumnya, Pulau Sulawesi memiliki keanekaragaman suku tersebar yang relatif berbeda. Jika tiga pulau sebelumnya sangat identik dengan suku Jawa yang menempati suku dengan jumlah penduduk terbanyak, maka di pulau yang terdiri atas lima provinsi ini, suku Jawa hanya muncul di dua provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Pada kedua provinsi tersebut suku Jawa sebagai suku terbesar ketiga selama tahun 2000-2010. Fakta ini adalah bukti bahwa suku Jawa belum berkembang pesat di Pulau Sulawesi. Suku yang paling banyak tersebar di pulau ini adalah suku Bugis. Perkembangan suku Bugis cukup pesat, jumlahnya pada 2010 hampir dua kali dibandingkan dengan jumlah suku Bugis tahun 2000.

Setiap provinsi di Pulau Sulawesi juga memiliki karakteristik suku terbesar yang khas. Di Provinsi Sulawesi Utara, suku Minahasa adalah suku terbesar selama tahun 2000-2010 kemudian diposisi kedua adalah suku Sangir menurut data 2000 dan berubah tahun 2010 menjadi suku Sulawesi lainnya yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah suku lainnya menurut data tahun 2000 dan berubah menjadi suku Gorontalo tahun 2010. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki suku Jawa pada posisi ketiga suku terbesar dan suku Bugis pada posisi kedua selama 2000-2010. Sementara itu, suku yang menempati peringkat pertama tahun 2000 adalah suku Kaili dan bergeser menjadi suku Sulawesi lainnya tahun 2010. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan, suku Bugis berada di peringkat pertama dan suku Makassar di peringkat kedua selama tahun 2000-2010. Posisi ketiga tahun 2000 adalah suku Toraja, tetap tahun 2010 suku Sulawesi lainnya yang menempati posisi ketiga suku terbesar

di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tenggara komposisi tiga suku terbesar tahun 2000 sangat berbeda dengan tahun 2010. Pada 2000 tiga suku terbesar dari urutan terbanyak adalah suku Buton, Bugis, dan Tolaki kemudian suku Bugis menjadi terbesar tahun 2010 diikuti dengan suku Makassar dan Sulawesi lainnya. Suku Jawa baru masuk dalam urutan tiga besar suku dominan pada distribusi suku di Provinsi Gorontalo. Suku Jawa menempati urutan ketiga setelah suku Gorontalo dan suku lainnya. Jumlah suku Jawa antara 2000 sampai 2010 di Provinsi Gorontalo meningkat cukup pesat, yakni sekitar 15 ribu penduduk dalam kurun waktu 10 tahun.

### **Perkembangan Suku di Pulau Bali, NTB, dan NTT**

Tiga pulau yang berbeda ini memiliki suku dengan karakteristik tersendiri. Suku-suku yang dominan adalah suku adat asli di setiap provinsi. Suku Jawa yang di Pulau Jawa dan Sumatera dominan, persentasenya kecil di ketiga provinsi ini. Suku-suku asli cenderung dominan dengan persentase cukup tinggi, yakni di atas 60 persen. ini adalah bukti bahwa suku-suku di Provinsi Bali, NTB, dan NTT cenderung lebih homogen.

Provinsi Bali dengan suku Bali menduduki peringkat pertama sebagai suku terbanyak dan suku Jawa di peringkat kedua menurut data tahun 2000-2010. Posisi ketiga tahun 2000 adalah suku lainnya yang kemudian berubah menjadi suku Madura tahun 2010. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki suku Sasak sebagai suku terbesar tahun 2000-2010. Kemudian Bima dan Sumbawa berturut-turut menempati posisi kedua dan ketiga tahun 2000. Tahun 2010 adalah suku berasal dari NTB lainnya yang menempati posisi dua dan muncul suku Bali yang berada di posisi

**Tabel 6 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Bali, NTB, dan NTT Tahun 2000 – 2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi / Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Bali					
	- Bali	2.794.793	88,85	- Bali	3.336.065	85,97
	- Jawa	214.598	6,82	- Jawa	372.514	9,60
	- lainnya	38.489	1,22	- Madura	29.864	0,77
2.	Provinsi Nusa Tenggara Barat					
	- Sasak	2.594.629	67,75	- Sasak	3.033.631	67,57
	- Bima	513.055	13,4	- Suku asal NTB lainnya	1.156.493	25,76
	- Sumbawa	319.423	8,34	- Bali	119.407	2,66
3.	Provinsi Nusa Tenggara Timur					
	- Atoni Metto	1.121.433	29,49	- Suku asal NTT	3.793.242	81,18
	- Manggarai	568.445	14,95	- Suku asal Kalimantan	678.090	14,51
	- Sumba	566.428	14,89	- Jawa	54.511	1,17

Sumber: BPS, 2010

ketiga. Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2000 memiliki suku Atoni Metto di peringkat pertama, suku Manggarai di peringkat kedua, dan suku Sumba di peringkat ketiga. Kemudian pada 2010 suku asal NTT adalah suku terbesar dengan persentase lebih dari 81 persen, diikuti suku asal Kalimantan di peringkat kedua dan Jawa di peringkat ketiga.

### **Perkembangan Suku di Pulau Maluku dan Papua**

Pulau Maluku dan Papua masing-masing memiliki dua provinsi. Provinsi di Pulau Maluku adalah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Provinsi di Pulau Papua adalah Papua dan Papua Barat. Komposisi suku di Kepulauan Maluku pada 2000 memiliki persebaran yang lebih bervariasi dibandingkan dengan tahun 2010. Pada 2000 suku-sukunya tidak ada yang dominan, persentasenya sekitar 10 persen, yakni di Provinsi Maluku adalah suku Kei (10,97 persen), Buton (10,59 persen), dan Ambon (10,56 persen). Begitu pula di Provinsi

Maluku Utara, yaitu suku Sula (9,46 persen), Makian (9,12 persen), dan Galela (7,24 persen). Fakta ini menjadi bukti bahwa suku-suku di Pulau Maluku sangat beragam dan heterogen. Itulah sebabnya pada 2010 suku-suku yang beragam tersebut digabungkan ke dalam suku besar dari tiap pulau. Pada 2010 urutan suku dominan di Pulau Maluku adalah suku Maluku di peringkat pertama, suku Sulawesi di peringkat kedua, dan suku Jawa di peringkat ketiga.

Berbeda dengan provinsi di Pulau Maluku, Provinsi di Pulau Papua, yakni Papua dan Papua Barat, memiliki persebaran suku Jawa yang lebih dominan. Provinsi Papua pada 2000 memiliki distribusi suku, yaitu Jawa, Biak Numfor, dan Dani. Tahun 2010 berbagai suku kecil di Papua digabung menjadi satu menjadi suku Papua, selanjutnya mendominasi menjadi 76,31 persen, selanjutnya di urutan kedua adalah suku Jawa (8,39 persen), dan urutan ketiga suku asal Sulawesi (3,67 persen). Perkembangan suku Jawa terlihat lebih cepat di Provinsi Papua Barat. Pada 2000 suku Jawa

**Tabel 7 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Maluku dan Papua  
Tahun 2000 – 2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi / Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Maluku					
	- Kei	125.954	10,97	- Maluku	1.127.148	73,83
	- Buton	121.579	10,59	- Sulawesi	247.266	16,20
	- Ambon	120.969	10,53	- Jawa	79.340	5,20
2.	Provinsi Maluku Utara					
	- Sula	63.282	9,46	- Maluku	687.003	66,35
	- Makian	60.985	9,12	- Sulawesi Lainnya	240.427	23,22
	- Galela	52.639	7,24	- Jawa	42.724	4,13
3.	Provinsi Papua					
	- Jawa	211.663	12,48	- Papua	2.121.436	76,31
	- Biak Numfor	126.070	7,43	- Jawa	233.145	8,39
	- Dani	120.745	7,12	- Sulawesi Lainnya	102.157	3,67
4.	Provinsi Papua Barat					
	- Jawa	211.663	12,48	- Papua	387.816	51,48
	- Biak Numfor	126.070	7,43	- Jawa	111.274	14,77
	- Dani	120.745	7,12	- Maluku	78.855	10,47

Sumber: BPS, 2010

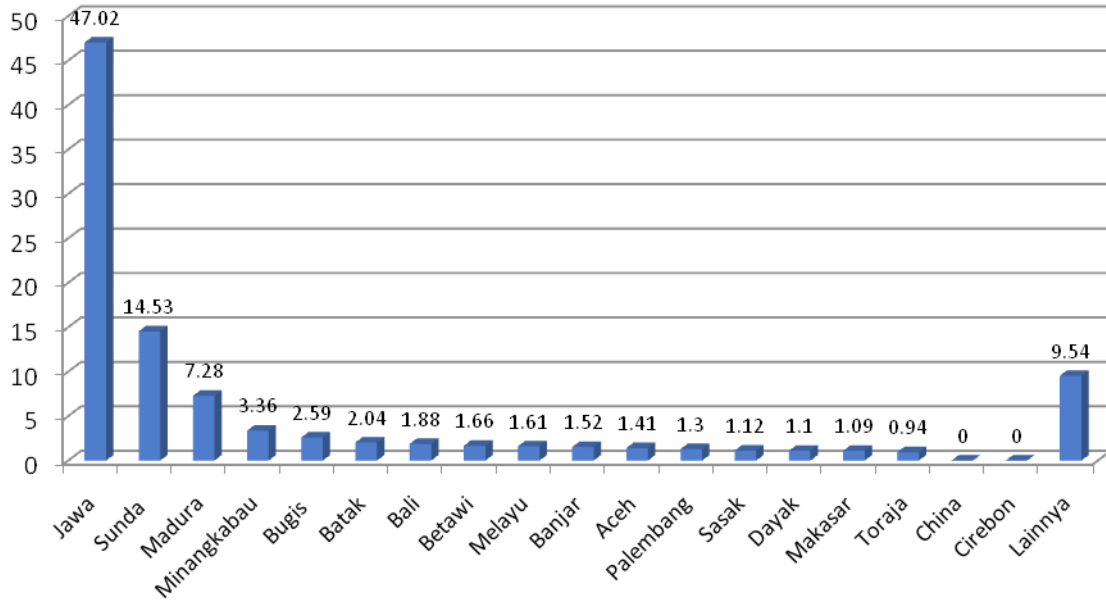
adalah peringkat pertama dengan persentase 12,48 persen. Jumlah tersebut meningkat pada 2010 menjadi 14,77 persen walaupun peringkatnya turun menjadi urutan kedua. Hal ini terjadi karena suku-suku asli di Provinsi Papua Barat digabung menjadi suku Papua.

### **Perkembangan Komposisi Suku di Indonesia 1930-2010**

Studi etnisitas di Indonesia sejak era kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru menjadi sebuah hal yang dihindari karena berpotensi melemahkan integrasi bangsa. Diskusi tentang etnik secara berkepanjangan berujung pada persoalan SARA yang tentunya harus disikapi secara hati-hati. Hal ini terbukti dengan sedikitnya kajian tentang etnik. Studi kependudukan yang mendalam tentang etnik dilaksanakan pertama kali pada

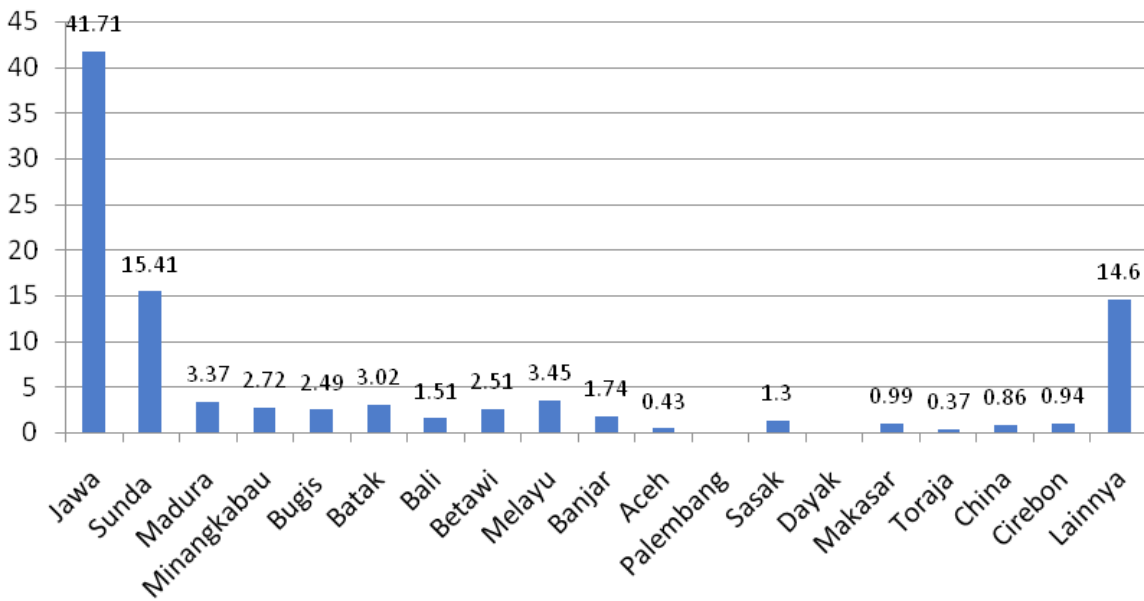
1930 di zaman Pemerintah Belanda. Setelah itu, kajian etnik baru ada pada era reformasi, yakni tahun 2000 berdasarkan hasil Sensus BPS. Begitu pula berdasarkan pada hasil Sensus Penduduk 2010, studi tentang etnik dilihat kembali.

Distribusi penduduk Indonesia menurut etnik pada 1930 didominasi oleh etnik Jawa, yaitu sekitar 47,02 persen. Hampir separuh dari penduduk Indonesia adalah Jawa, kemudian disusul Sunda (14,53 persen), Madura (7,28 persen), Minangkabau (3,36 persen), Bugis (2,59 persen), dan etnik-etnik lainnya (lihat Gambar 1). Hal ini menjadi bukti bahwa sejak sebelum Indonesia merdeka, etnik yang ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Sunda, dan Madura adalah tiga etnik besar yang mendominasi di Indonesia. Etnik dari pulau lain yang cukup dominan adalah etnik Minangkabau, Bugis, Batak, dan Bali.



Sumber: BPS, 2010

**Gambar 1** Komposisi Suku di Indonesia Tahun 1930 (dalam Persen)



Sumber: BPS, 2010

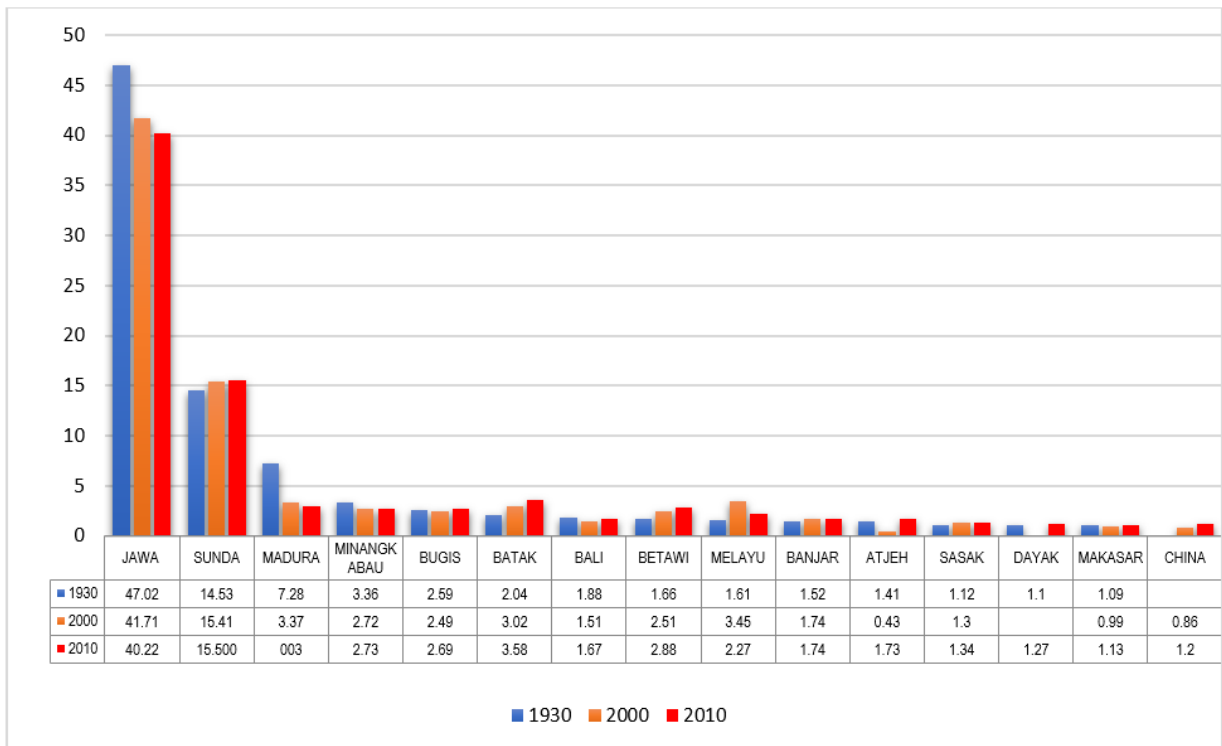
**Gambar 2** Komposisi Suku di Indonesia Tahun 2000 (dalam Persen)

*DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS  
PERSATUAN NEGARA*

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, terjadi perubahan urutan lima suku terbesar di Indonesia. Suku Jawa, Sunda, dan Madura tetap menjadi tiga tertinggi, suku Batak yang di tahun 1930 berada di urutan keenam (2,04 persen), pada 2000 menjadi urutan keempat (3,02 persen). Urutan suku Bugis turun dari lima besar di 1930 menjadi urutan keenam di 2000 (lihat Gambar 2). Hal lain yang menarik adalah keberadaan suku dari luar negeri, yakni suku China/Tionghoa, yang pada 1930 persentasenya sangat kecil kemudian pada 2000 telah mendekati satu persen.

Pada periode 1930-2000, etnis Jawa dari 47,02 persen turun menjadi 41,71 persen dari total penduduk di Indonesia walaupun populasi etnis Jawa di Indonesia cenderung mendominasi di berbagai pulau. Kondisi itu tidak lepas dari program pemerintah yang dilakukan sejak pemerintahan kolonial Belanda yang dilanjutkan oleh

Pemerintah RI sebagai upaya pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk dari pulau padat penduduk menuju pulau dengan penduduk yang jarang. Namun, berdasarkan persentase penduduk, etnis Jawa menurun 6 persen. Program kependudukan yang optimal dilaksanakan di Indonesia pada era Orde Baru, yakni Keluarga Berencana (KB), dapat menjadi penjelaras penurunan persentase suku Jawa. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan kependudukan dua anak cukup cenderung diterima secara kuat di Pulau Jawa. Selain suksesnya program keluarga berencana, pendidikan untuk perempuan dan kesempatan kerja bagi perempuan mampu menekan angka pernikahan dini di kalangan perempuan. Pendidikan juga mampu memberikan kontribusi tidak langsung terhadap kesadaran masyarakat untuk merencanakan kelahiran anak.



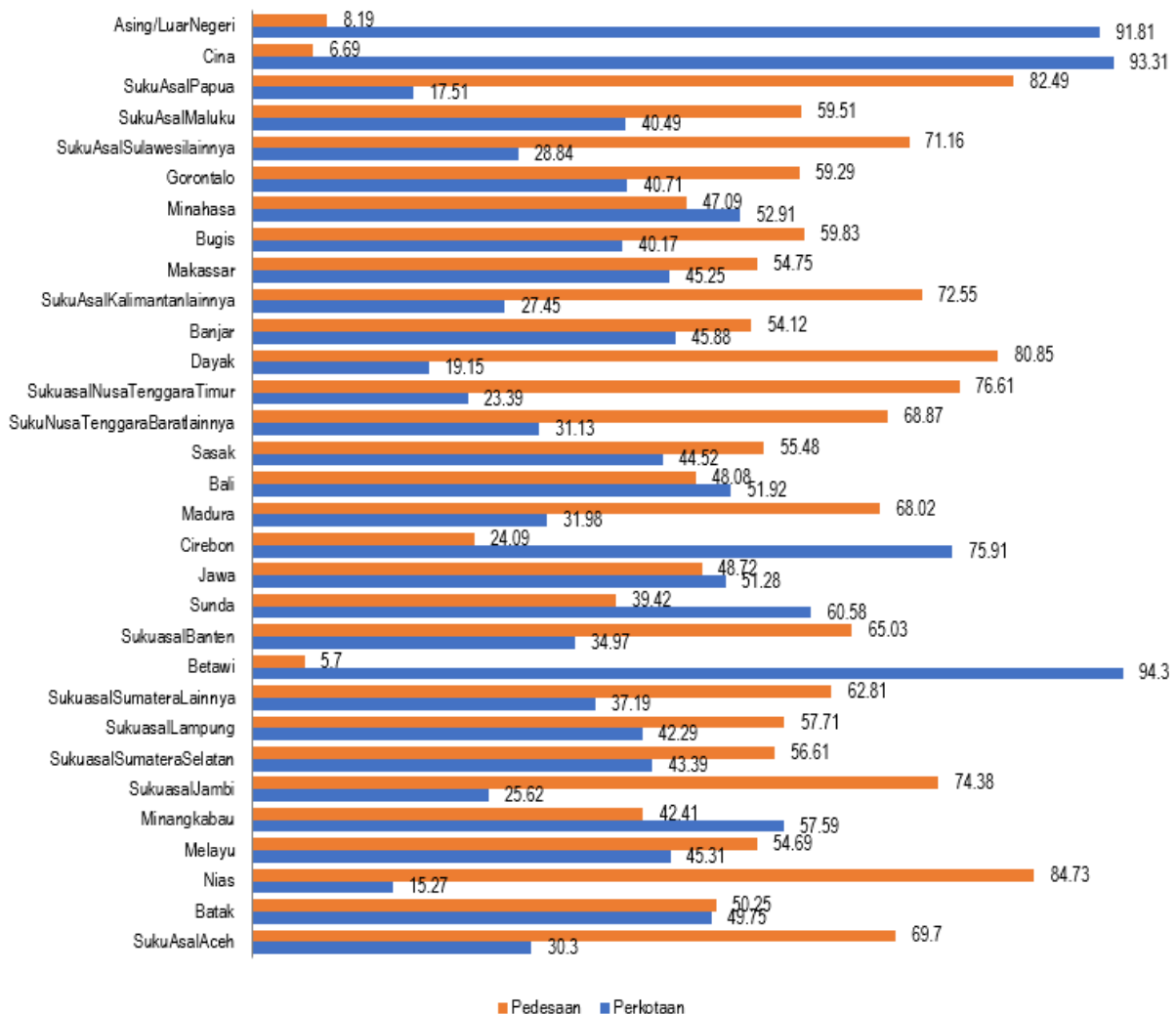
Sumber: BPS, 2010

**Gambar 3** Dinamika Suku di Indonesia Tahun 1930 – 2010 (dalam Persen)

Tidak kalah menarik dengan penurunan suku Jawa, suku Madura menurun drastis dari 7,28 persen, menjadi 3,37 persen. Suku Madura adalah salah satu suku yang aktif berperan dalam suksesnya program pemerintah yakni transmigrasi. Berbagai kerusuhan berbasis etnik sebagaimana terjadi di Pulau Kalimantan, setidaknya menjadi penjelas penurunan persentase suku Madura di Indonesia. Kerusuhan yang berskala nasional tersebut, dengan ribuan korban jiwa tentu saja mengurangi

jumlah penduduk etnis Madura di Indonesia tahun 2000. Kejadian traumatis tersebut juga diperkirakan berpengaruh terhadap pengakuan suku saat dilakukan sensus. Artinya, banyak suku Madura yang menjawab bukan suku Madura saat dilakukan sensus demi menjaga keamanan diri mereka. Hal lain yang berhubungan dengan penurunan suku Madura adalah keberhasilan program KB.

Perbandingan data dari tahun 1930 dengan sensus penduduk tahun 2000 dan sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan



Sumber: BPS, 2010

**Gambar 4** Komposisi Suku di Indonesia menurut Status Desa dan Kota Tahun 2010 (dalam persen)



tren penurunan untuk etnik Jawa dari 47,02 persen di tahun 2000 dan kembali turun menjadi 41,71 persen di tahun 2010. Kenaikan persentase terjadi pada etnik Sunda dari tahun 1930 sebanyak 14,53 persen menjadi 15,41 persen kemudian kembali naik menjadi 15,50 di tahun 2010. Tidak kalah menarik juga pertumbuhan etnik Tionghoa yang juga mengalami kenaikan dari 0,86 persen menuju 1,2 persen. Kelengkapan data etnik ini dapat dilihat lebih detail di Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS sehingga dapat dilihat persebaran etnik di desa dan kota di Indonesia.

Persebaran etnik di kota-kota didominasi oleh penduduk etnik Tionghoa, Betawi, dan Cirebon, Sunda serta penduduk asing. Selain suku tersebut, komposisi desa dan kota cenderung seimbang. Etnik Betawi sebagai penduduk asli Jakarta cenderung lebih banyak tinggal diperkotaan, begitu juga dengan etnik Tionghoa yang sebagian besar berada pada pusat-pusat perekonomian. Sebagian etnik Tionghoa yang tinggal di desa adalah mereka yang berada di Kalimantan karena populasi etnik Tionghoa cenderung lebih banyak.

Dari persebaran ini terlihat kesenjangan antara penduduk desa dan kota yang sangat tajam. Beberapa suku, seperti etnik Papua, Nias, sebagian etnik Lampung, dan etnik Nusa Tenggara berada pada perdesaan. Dapat dikatakan bahwa mereka jauh dari pusat-pusat kegiatan perkotaan dan pusat perekonomian. Sementara itu, di Indonesia jumlah kemiskinan tertinggi berada di perdesaan.

### **Dinamika Suku dalam Konteks Negara Persatuan**

Membangun masyarakat multikulturalis Indonesia berarti menempatkan kesetaraan dalam perbedaan sebagai posisi sentral

dalam ideologi yang dibangun (Syaifuddin, 2006). Tentu saja hal tersebut berbeda dengan konsep pluralisme yang menjadikan perbedaan, dalam hal ini keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan, sebagai posisi sentral. Jika pluralisme menganggap bahwa perbedaan kebudayaan masyarakat harus dihargai dan dijamin hak-haknya oleh penguasa, multikulturalisme menekankan pada gagasan kesetaraan dan saling menghargai dengan mempertimbangkan keberadaan budaya lainnya. Secara lebih lanjut, multikulturalisme di Indonesia dapat diarahkan untuk menguatkan kesadaran atas identitas bersama yaitu nasionalisme. Kemudian kemajemukan budaya dianggap sebagai ciri yang melekat pada bangsa Indonesia dan masyarakat multi etnis sebagai penggerak untuk mencapai tujuan bersama karena menyadari bahwa ideologi yang dibentuk secara historis memiliki tujuan yang sama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan demikian, konsep multikulturalisme dapat digunakan sebagai langkah menjaga persatuan negara.

Di sisi lain, perkembangan suku di Indonesia yang semakin heterogen dalam suatu wilayah administrasi dapat menyebabkan pemerintah sebagai pengatur wilayah belum maksimal mewujudkan kesetaraan multikultural. Terwujudnya masyarakat multikulturalis seharusnya didukung dengan adanya kebijakan multikultural (Syaifuddin, 2006) yang mengedepankan kesetaraan dan saling menghargai dalam pengelolaan perbedaan kebudayaan. Secara teoretis, unsur dominan seringkali dianggap sama dengan unsur mayoritas dalam suatu kelompok walaupun hal ini tidak selalu benar (Syaifuddin, 2006). Seringkali pengutamaan kelompok mayoritas dalam implementasi kebijakan tersebut melupakan adanya kelompok lain,

dalam hal ini etnis minoritas. Hal tersebut yang kemudian dapat memicu konflik etnik.

Tidak hanya dalam permasalahan perekonomian, akulturasi budaya juga diperlukan untuk meredam gesekan antarsuku di provinsi yang cenderung heterogen. Provinsi Jawa Barat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal nasionalisme, baik bagi etnik pendatang maupun etnik asli Jawa Barat. Hal tersebut mengingat bahwa selain sebagai perluasan pembangunan Kota Jakarta, Bandung juga merupakan tujuan pendidikan bagi penduduk di Indonesia.

### Kesimpulan

Perkembangan etnik di Indonesia secara historis menunjukkan bahwa suku di Indonesia tersebar secara heterogen dengan keanekaragaman yang tinggi. Salah satu jalan untuk mewujudkan persatuan bangsa di tengah masyarakat yang heterogen adalah melalui masyarakat multikulturalis. Melalui masyarakat multikulturalis yang saling menghargai perbedaan kebudayaan, akan dapat tercipta masyarakat yang memiliki pandangan, jiwa, dan tujuan yang sama. Selain itu, perwujudan dari perkembangan etnik di Indonesia juga harus disertai dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang tidak hanya memihak pada golongan mayoritas saja karena asas yang dikedepankan adalah persamaan dan menghargai hak atas perbedaan kebudayaan.

### Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. 2006. "Tantangan Multikulturalisme dalam Pembangunan". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Etnovisi*, II (1).

Arkanudin. 2006. "Menelusuri Akar Konflik Antaretnik". *Mediator*, VII (2).

Asry, M. Yusuf. 2013. *Masyarakat Membangun Harmoni, Resolusi Konflik dan Bina Damai Etno Relijius di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2010. *Peta Kawasan Rawan Konflik di DKI Jakarta*. Jakarta: BKBP

BPS. 2011. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Analisis Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS

BPS. 2015. *Bunga Rampai Analisis Determinan Hasil SP 2010*. Jakarta: BPS.

Darwin, Muhadjir. 2003. *Freedom From Fear: Social Disruption and System Violence in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.

Harahap, Ahmad Rivai. 2006. "Multikulturalisme dalam Bidang Sosial". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Etnovisi*, II(1).

Hendrastomo, Grendi. 2012. "Potensi Konflik Dibalik Munculnya Komunitas Berpagar". *Socia*, 11(1), 31 – 41.

Kambo, Gustiana, A. 2015. "Etnisitas dalam Otonomi Daerah". *The POLITICS. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1).

Lubis, Nur A. Fadhil. 2006. "Multikulturalisme dalam Politik: Sebuah Pengantar Diskusi Multikulturalisme dalam Politik". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi*, VII(1).

Syaifuddin, Achmad Fedyani. 2006. "Membumikan Multikulturalisme di Indonesia". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Etnovisi*, II(1).

Suryadinata, Leo., Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta. 2003. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Tan, Sofyan. 2006. "Pendidikan Multikulturalisme: Solusi Ancaman

*DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS  
PERSATUAN NEGARA*

Disintegrasi Bangsa”. Jurnal Antropologi Sosial Budaya. *Etnovisi*, II(1).

Tarigan, Robert Valentino. 2006. “Pendidikan Multikulturalisme: Dari Lingkup Keluarga Hingga Media Massa Multikulturalisme”. Jurnal Antropologi Sosial Budaya. *Etnovisi*, II(1).

Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Mencari Indonesia: Demografi – Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LIPI Press.

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA  
KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Muhamad Saleh, Muhadjir Darwin, Agus Heruanto Hadna,  
dan Dewi Haryani Susilastuti

Policy Studies Program, Center for Population and Policy Studies,  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Muhamad Saleh (e-mail: muhamadsaleh65@gmail.com)

**Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan daerah dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata. Melalui kebijakan ini, diharapkan kepariwisataan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta membuka lapangan kerja. Namun sejak keluarnya perda tersebut hingga 2016, pembangunan kepariwisataan tidak mengalami peningkatan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada informan yang dipilih secara purposive. Informan tersebut adalah para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di sektor pariwisata, Data juga dikumpulkan melalui teknik observasi di obyek pariwisata. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen yang terkait dengan kepariwisataan di Kota Tarakan. Data dianalisis secara kualitatif. Efektivitas implementasi kebijakan dalam studi ini dilihat dari pendekatan sasaran, sumber, dan proses. Studi ini menemukan implementasi kebijakan dari ketiga pendekatan tersebut tidak efektif. Faktor yang memengaruhi (in)efektivitas implementasi (1) Aktor, sebagai pengambil keputusan (2) Dukungan anggaran, untuk membangun dan menambah fasilitas umum, sarana prasarana (3) Komitmen dari para pemangku kepentingan (4) Kreatifitas dan inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (5) Kerjasama Lintas Sektor dalam pembangunan pariwisata di Kota Tarakan. Rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut. (1) Penambahan fasilitas pendukung pariwisata dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. (2) Membangun kemitraan dengan sektor swasta, UKM, asosiasi kepariwisataan. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kepariwisataan.

Katakunci: evaluasi, implementasi kebijakan, efektivitas, kepariwisataan

## **EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS NUMBER 9 YEAR 2011 ABOUT THE CONDUCT OF TOURISM BUSINESS IN THE TARAKAN CITY OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE**

### **Abstract**

This study aims to evaluate the effectiveness of local policy implementation in the implementation of tourism business in Tarakan City. The base of the study is the issuance of Regional Regulation (Perda) Tarakan City No. 9 of 2011 on the Implementation of Tourism Enterprises. Through this policy, tourism is expected to increase regional economic growth and community welfare, as well as open employment. But since the issuance of the regulation until 2016, the development of tourism has not increased. The method used in this study is descriptive qualitative. Primary data were collected through interview technique to informant selected purposively. The informants are policymakers and other stakeholders in the tourism sector. Data are also collected through observation techniques in tourism objects. Secondary data were collected from documents related to tourism in Tarakan City. Data were analyzed qualitatively. The effectiveness of the policy implementation is viewed from the approach of target, source, and process. This study has found that policy implementation of the three approaches is not effective. Factors affecting the (in) effectiveness of implementation are (1) Actors, as decision makers; (2) Budget support, to build public facilities, infrastructure facilities; (3) Commitment of the stakeholders (4) Creativity and innovation from the Organization of the Region (5) Cross-Sectoral Cooperation in tourism development in Tarakan City. (1) The addition of tourism support facilities by involving the private sector and the public. (2) Building partnerships with the private sector, SMEs, tourism associations. (3) Increasing the quality of human resources in the tourism sector.

**Keywords:** evaluation, policy implementation, effectiveness, tourism

### **Pendahuluan**

#### *Latar Belakang*

Dengan kondisi alam Sumber daya wisata yang memiliki potensi di Kota Tarakan bisa dilihat dari keanekaragaman hayati, wisata alam pesisir, kekayaan budaya dan adat masyarakat setempat, yakni seni budaya khas Tidung dan *Pearl Harbournya* Indonesia maka Kota Tarakan menggerakkan sektor pariwisata untuk penguatan dan pengembangan kapasitas ekonomi.

Christie dan Crompton (2003), menyebutkan pariwisata dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, menggerakkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, menciptakan interaksi dengan produksi lainnya dan bidang penyedia jasa.

Dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan pariwisata Kota Tarakan.

Namun, sejak Perda tersebut dijalankan hasil yang di lihat di lapangan berbeda karena kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) sejak perda tersebut diberlakukan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 137.459 orang. Jumlah kunjungan pada tahun 2014 melonjak menjadi 204.145 orang. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 193.538 orang, dan terus menurun menjadi 192.575 orang pada tahun 2016.

Berdasarkan paparan di atas, tampak ada ketidaksinkronan antara trend pariwisata dengan upaya Pemerintah Kota Tarakan mengembangkan pariwisata melalui peraturan daerah, maka penulis tertarik untuk melihat apa yang terjadi ketika kebijakan dibuat tanpa basis data. Apakah kebijakan yang dibuat dalam konteks seperti itu bisa efektif?

#### *Rumusan Masalah*

Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan?

Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau inefektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan?

#### *Tujuan Penelitian*

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan.

Menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan inefektivitas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

## **Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori**

### *Tinjauan Pustaka*

#### 1. Kebijakan Publik

*Kebijakan publik* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik (Dunn, 2003).

#### 2. Kebijakan Pariwisata

Peran pemerintah dalam bidang pariwisata (Subadra, 2006) antara lain yaitu: a) Perencanaan Pariwisata; b) Pembangunan Pariwisata; c) Kebijakan Pariwisata; dan d) Peraturan Pariwisata Peraturan.

#### 3. Dampak Pariwisata

Pembangunan pariwisata memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi daerah. Cohen (1984, dalam Pitana dan Gayatri, 2005) mengidentifikasi dampak pariwisata dalam delapan kelompok antara lain: 1) meningkatkan penerimaan devisa; 2) bertambahnya pendapatan masyarakat; 3) terbukanya lapangan kerja; 4) perubahan harga-harga; 5) pembagian manfaat atau keuntungan; 6) kepemilikan dan control; 7) menggerakkan pembangunan pada umumnya; dan 8) menambah pendapatan pemerintah.

### *Kerangka Teori*

#### 1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan dapat menyangkut

*EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI  
KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA*

estimasi atau penilaian kebijakan yang meliputi implementasi, substansi dan dampak (Anderson, 1975).

2. Efektivitas Kebijakan

Menurut Anthony (2005) Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Selanjutnya, Hendrik (2002) mengatakan ada tiga pendekatan efektivitas dan cara mengukur efektivitas tersebut, yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses.

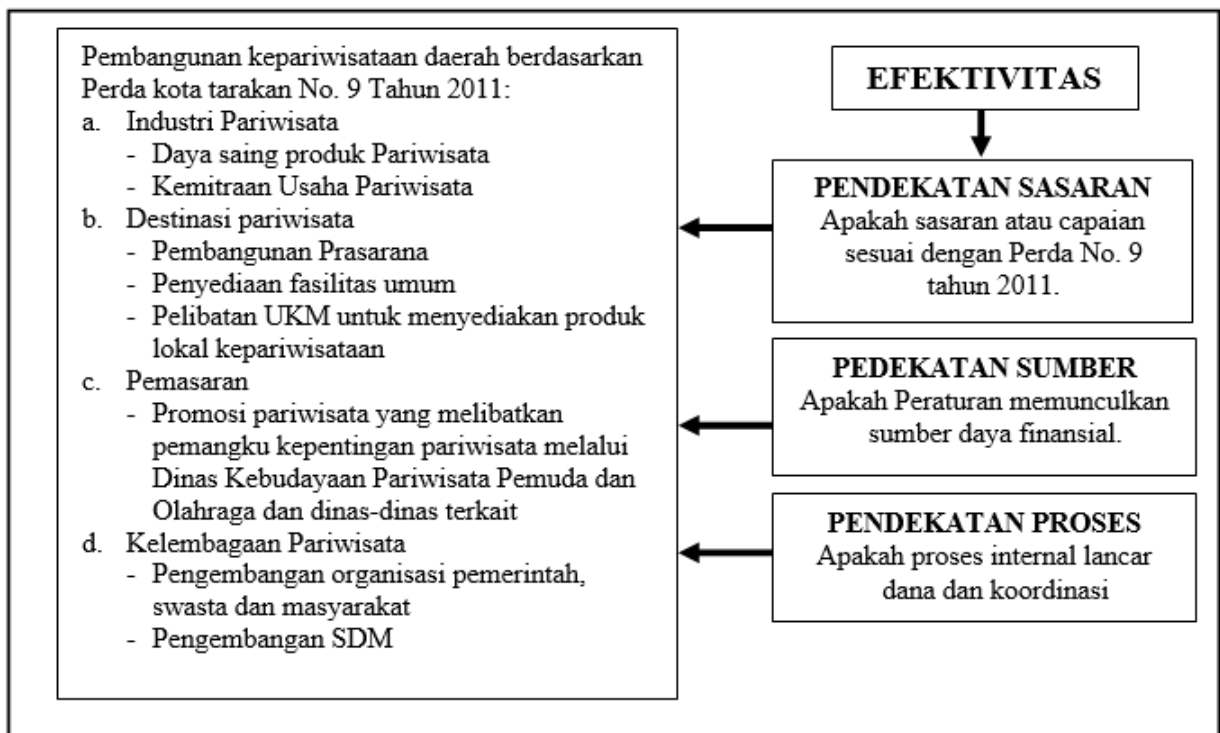
3. Pengukuran Efektivitas

Evaluasi efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan

usaha kepariwisataan di Kota Tarakan, akan dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan sebagaimana yang dikatakan oleh Hendrik (2002) yaitu pendekatan sasaran (apakah sasaran atau capaian tersebut sesuai dengan Perda); pendekatan sumber (apakah peraturan daerah tersebut memunculkan sumber daya finansial); pendekatan proses (apakah proses internal lancar, ada koordinasi yang terbangun dengan baik).

*Kerangka Pemikiran*

Evaluasi efektivitas implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan sebagaimana yang telah di bahas di atas dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagaimana berikut ini:



**Gambar 1** Kerangka Pemikiran, Evaluasi Efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Metode ini bertujuan mengangkat sikap, pengaruh, dan persepsi yang tidak dapat diperoleh jika menggunakan metode survei kuantitatif.

### *Lokasi dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Kota Tarakan. Kota ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagai tempat diimplementasikannya Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

### *Proses Penelitian*

Teknik Pengumpulan Data meliputi: 1) Observasi; 2) Studi Literatur; 3) Wawancara.

Informan. Informan dipilih dengan metode purposive, di mana peneliti menentukan secara sengaja informan yang diyakini mempunyai pengetahuan mengenai materi yang sedang diteliti.

### *Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, dan daftar data sekunder.

### *Metode Analisis*

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dan diolah dalam bentuk tabel atau matrik data adalah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Kota Tarakan dan Peluang Pengembangan Pariwisata*

Kota Tarakan memiliki luas 657,33 km<sup>2</sup>, 38,2% diantaranya yaitu 250,8 km<sup>2</sup> adalah daratan dan selebihnya sejumlah 61,8% setara dengan 406,53 km<sup>2</sup> terdiri dari lautan. Di sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dan di bagian selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Pada bagian Timur dibatasi dengan Kecamatan Pulau Bunyu, dan Laut Sulawesi. Disebelah barat dibatasi oleh pesisir pantai Kecamatan Sesayap, dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung. Berpenduduk sebanyak 239.787 jiwa (BPS, 2013). Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Tarakan dari sumbangan sektor tersier yakni lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan terbesar rata-rata 21,45 % (2000-2011) dan 21,57 % (2012-2014).

### *Potensi Pariwisata Kota Tarakan*

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tarakan, obyek-obyek wisata Kota Tarakan sebagai berikut: 1) Wisata Alam; 2) Wisata Budaya; 3) Wisata Sejarah; 4) Wisata Pendidikan; 5) Agro Wisata; 6) Wisata Religi; 7) Wisata Bahari; 8) Wisata Kuliner; 9) Wisata Minat Khusus; 10) Wisata Belanja

Deskripsi berbagai obyek wisata yang dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa betapa besarnya potensi pariwisata yang ada di Kota Tarakan, jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.



*EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI  
KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA*

*Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9  
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan  
Kepariwisata Kota Tarakan*

Secara operasional Hendrik (2002) mengatakan ada tiga pendekatan yang bisa digunakan mengukur efektivitas implementasi Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Tarakan, yakni: Pendekatan Sasaran, pendekatan Sumber dan Pendekatan Proses.

A. Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran adalah upaya untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target semula.

1. Industri Pariwisata

Wahab (1996) mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu jenis industri yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan, taraf hidup serta mendongkrak sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pemerintah Kota Tarakan berusaha membangun pariwisata untuk mewujudkan Visi Walikota Tarakan yaitu: *"Mewujudkan Tarakan Sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri, Perikanan dan Pariwisata; Didukung oleh Sumber Daya Manusia serta Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan"*.

a. Daya Saing Produk Pariwisata

Berdasarkan Marpaung (2001) obyek dan daya tarik wisata merupakan sebuah aktivitas atau bentuk serta fasilitas yang selalu berkaitan sehingga membuat wisatawan tertarik untuk datang ke satu tempat atau wilayah tertentu.

b. Kemitraan Usaha Pariwisata

Pembangunan destinasi wisata Kota Tarakan hanya menggunakan Anggaran pemerintah Kota Tarakan (APBD) melalui Anggaran Dinas Pariwisata tanpa keterlibatan sektor swasta dan masyarakat.

2. Destinasi Pariwisata

Middleton (1988) memberikan rincian ada lima elemen utama dalam pengembangan destinasi pariwisata yaitu daya tarik, fasilitas, jasa dan harga yang dikeluarkan oleh konsumen. Fasilitas destinasi dan jasa kepariwisataan meliputi akomodasi, restoran, bar, kafe, rumah makan, transportasi, sarana olah raga, took cendramata, dan jasa lainnya. Aksebilitas termasuk infrastuktur, peralatan, perlengkapan, faktor operasional, dan kebijakan pemerintah Kota Tarakan.

a. Pembangunan Prasarana

Suwantoro (2004) menjelaskan kebutuhan wisatawan terhadap fasilitas yang baik atau diperlukan pada umumnya adalah sebagai berikut: 1) Transportasi; 2) penginapan; 3) makanan/minuman; 4) obyek wisata, atraksi wisata; 5) hiburan; 6) oleh-oleh dan cinderamata.

b. Penyediaan Fasilitas Umum

Sedangkan menurut Marpaung dan Bahar (2002) sebagian infrastruktur yang banyak dipikirkan dan baik adalah sebagai berikut: 1) Air; 2) Komunikasi dan aliran listrik; 3) Pembangunan kotoran dan air limbah; 4) Jalan dan jalan raya; 5) Taman dan rekreasi; 6) Fasilitas kesehatan; 7) Pendidikan; 8) Rumah karyawan; 9) Keamanan.

- c. Melibatkan Usaha Kecil Menengah untuk menyediakan produk lokal

Pembangunan pariwisata harusnya bersinergi dengan sektor industri atau Usaha Kecil Mengengah (UKM), agar pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dapat meningkat hal ini terbukti dari penuhnya wisatawan yang datang ke tempat-tempat yang menyediakan produk khas daerah.

### 3. Pemasaran

Pemasaran adalah sebuah proses perencanaan, penelitian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dalam suatu aktivitas yang dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan, dirancang dalam rangka memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan serta menjadi tujuan organisasi (Morrison, 2002).

- a. Promosi Pariwisata yang Melibatkan Pemangku Kepentingan Pariwisata melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan dinas terkait.

Promosi idealnya dilaksanakan melalui media yang dipandang efektif dan berkesinambungan untuk dapat menjangkau pasar, media cetak atau elektronik yang disediakan oleh beberapa ahli marketing (Bahar, 2002).

### 4. Kelembagaan Kepariwisata

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ditemukan kelembagaan diartikan sebagai satu sistem organisasi atau badan sosial yang melaksanakan suatu aktivitas untuk menghasilkan tujuan bersama (Pusat Bahasa, 1997).

- a. Pengembangan Organisasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Dalam pengelolaan obyek wisata Kota Tarakan dibutuhkan kelembagaan yang berfungsi dan berperan aktif.

- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Umar (2008) berpendapat pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi dalam aktivitas pengadaan, pemeliharaan, pengembangan dan kompensasi, pengintegrasian, serta memutuskan hubungan kerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan terpadu.

Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat setempat agar memiliki kompetensi profesi dalam menyediakan barang dan jasa serta pelayanan kepariwisataan kepada para wisatawan.

### B. Pendekatan Sumber

Pendekatan Sumber untuk menilai apakah dengan implementasi dapat memunculkan sumber pendapatan. Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang diperlukan.

Pembangunan kepariwisataan Kota Tarakan tidak menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota Tarakan karena. Obyek-obyek wisata yang dikembangkan tidak meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Tarakan pihak swasta atau pengusaha belum ada yang menanamkan investasinya dalam obyek pariwisata.

### C. Pendekatan Proses

Dilihat dari pendekatan proses, implementasi Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan belum terkoordinasi. Jika mengacu pada apa yang dikatakan Hendrik (2002), maka kondisi demikian dikatakan tidak sehat. Akibatnya, pelaksanaan Perda menjadi tidak efektif dan efisien.

### D. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Efektivitas dan Inefektivitas Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata

#### 1. Aktor.

Walikota sebagai pengambil keputusan masih mengalami kesulitan dalam menggerakkan keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut terlibat dalam mensukseskan Perda No. 9 Tahun 2011.

#### 2. Dukungan anggaran masih rendah.

Pengalokasian dana APBD untuk membangun dan menambah fasilitas umum, sarana prasarana masih minim atau tidak memadai.

#### 3. Komitmen.

Komitmen para pemangku kepentingan di daerah masih sangat rendah.

#### 4. Kreatifitas dan inovasi yang rendah dari Organisasi Perangkat Daerah.

Pembangunan obyek wisata hanya tertumpu pada Organisasi Perangkat Daerah Pariwisata.

#### 5. Kerjasama Lintas Sektor.

OPD belum selaras dalam pembangunan pariwisata di kota Tarakan.

### Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

#### *Kesimpulan*

Berdasarkan analisis dan paparan pada BAB-BAB didepan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan tidak efektif. Alasan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan Pendekatan Sasaran

Kota Tarakan tidak memiliki Daya saing. Dinas-dinas terkait, swasta dan masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan promosi. Kelembagaan Kepariwisata, Organisasi masyarakat tidak berfungsi. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang berkompeten

#### 2. Berdasarkan Pendekatan Sumber

Pembangunan pariwisata di Kota Tarakan tidak meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Tarakan

#### 3. Berdasarkan Pendekatan Proses

Pembangunan obyek wisata tanpa berkolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kelembagaan kepariwisataan, Organisasi, SDM tidak memiliki suatu mekanisme terpadu

#### 4. Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau inefektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan adalah:

- Aktor, sebagai pengambil keputusan
- Dukungan anggaran, untuk membangun fasilitas umum, sarana prasarana

- Komitmen dari para pemangku kepentingan.
- Kreatifitas dan inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah
- Kerjasama Lintas Sektor dalam pembangunan pariwisata di Kota Tarakan.

### Rekomendasi Kebijakan

1. Daya saing pariwisata perlu ditingkatkan dengan menambah Fasilitas umum, sarana prasarana pada obyek-obyek wisata dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat.
2. Membangun kemitraan dengan sektor swasta, UKM, kelembagaan kepariwisataan dan masyarakat dan menambah jenis dan jumlah produk barang-barang kerajinan ciri khas Kota Tarakan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesi Sumber Daya Manusia kepariwisataan.

### Daftar Pustaka

- Anderson, James A. 1975. Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences. New York: Praeger University Series.
- Anthony, Robert N. Govindarajan, Vijay. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen Jakarta: Salemba Empat, Edisi Sebelas,
- Bahar, Herman. 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta.
- Budi, Pakarti, Sadar. (2015). "Model Struktural Pengembangan Daya Saing destinasi Wisata Studi Kasus Kota Jakarta." *University Research Colloquium 2015*. Issn 2407-9189. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Christie T. Iain and Crompton D. Elizabeth. 2003. "Republik of Madagascar: Tourism Sektor Study Africa Region". Working Paper Series No. 63.
- Croitoru, Mihai. 2011. "Tourism Competitiveness Index –An Empirical Analysis Romania vs. Bulgaria". *Journal Theoretical and Applied Economics*, Volume XVIII (2011), No. 9 (562). <https://ideas.repec.org/a/agr/journal/v9%28562%29y2011i9%28562%29p155-172.html>.
- Dessler, Gary. 2011. Human Resource Management Thirteenth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendrik, Kristian. 2002. *Evaluasi Sistem Distribusi Air Bersih Pada PDAM Tirta Sakti Cabang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Tesis Magister. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
- Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Leiper, P. 1990. Tourism Management. RMIT, Collingwood, Victoria.
- Marpaung, Happy dan Bahar, Herman. 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta.
- Marpaung, Happy. 2001. Pengetahuan Kepariwisata. Bandung: Alfabeta.
- Middleton, V.T.C., 1988. Marketing in Travel & Tourism, Heinemann Profesion Publishing. Oxford.
- Morrison, M. 2002. Hospitality and Travel Marketing. Third Edition. Australia: Delmar Thompson Learning.
- Nica, Ana, Maria. Zdaniuk, Aleksander, Bartłomiej. Nistoreanu Puiu. 2013. "Analysis Of Competitiveness In The Tourism sektors Within Central And Eastern Europe: Romania Case Study". <http://www>.

*EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI  
KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA*

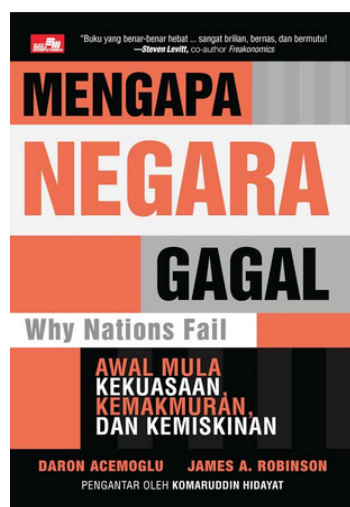
- academia.edu /3139668/Analysis\_Of\_Competitiveness\_In\_Tourism\_Sektors\_Within\_Central\_And\_Eastern\_Europe\_Romania\_Case\_Study.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pendit, I Nyoman, S. 1999. *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana*. Cetakan Keenam (Edisi Revisi). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan. Tarakan: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Sadono, Sukirno. 1978. *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Kebijaksanaan*. Yogyakarta: Petaling Jaya.
- Singka, Kamaruddin. Alam, Samsu, Andi. Nurlinah. 2011. "*Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bau-bau*." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 4, Nomor 2, Juli 2011 (97-108) ISSN 1979-5645.
- Spillane, James. 1994. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subadra, I Nengah. 2006. *Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*. S2 Kajian Pariwisata. Bali: Universitas Udayana.
- Sumartini, Siti. 2017. *Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan public dalam Mewujudkan Pembangunan kepariwisataan Daerah Dalam Tinjauan Hukum*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper Unisbank ke-3 (Sendi\_U 3) 2017. ISBN: 9-789-7936-499-93
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Swarbrooke, J and Susan Horner. 1999. *Consumer Behaviour in Tourism second Edition*. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
- Trisnawati, Rina, dkk. 2008. "*Analisis Daya Saing Industri Pariwisata Untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah: (Kajian Perbandingan Daya Saing Pariwisata Antara Surakarta Dengan Yogyakarta)*". *Economic Journal of Emerging Markets*, Vol 13 No 2, tahun 2008. [index.php / JEP/ article/view/224](http://index.php/JEP/article/view/224).
- Tsai, Henry. Song, Haiyan & Wong, Kevin K. F. 2009. "*Tourism and Hotel Competitiveness Research, Journal Of Travel & Tourism Marketing*". Volume 26. <http://www.Tandfonline.Com/Doi/Full/10.1080/10548400903163079#.Vei3kfcetriu>.
- Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata.
- UNESCO. 2009. *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*.
- Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Wall, G. 1997. *Sustainable Tourism- Unsustainable development*. In S. Wahab & JJ. Pigram (eds.), *Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainable* (pp. 33-49). London: Routledge.

**Resensi Buku**  
**NEGARA GAGAL: BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?**

Muhadjir Darwin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Muhadjir Darwin (e-mail: d\_muhadjir@yahoo.com)



Judul : Mengapa Negara Gagal – Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan  
 Penulis : Daron Acemoglu dan James A. Robinson  
 Penerjemah : Arif Subianto  
 Pengantar : Komarudin Hidayat  
 Penerbit : Elex Media Komputindo  
 Cetakan : Pertama, 2014  
 Tebal : 582 halaman

Buku yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, New York: Crown Business, 2012, telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Cetakan pertama dari buku terjemahan ini terbit tahun 2014. Buku tersebut telah tiga kali dicetak ulang, yaitu pada 2015, 2017, dan 2017. Buku aslinya yang ditulis dalam Bahasa Inggris dan naik cetak tahun 2012 juga telah dua kali dicetak ulang, yaitu pada 2014 dan 2017. Pencetakan ulang sekian kali dalam rentang waktu yang pendek ini menunjukkan bahwa buku ini direspons positif oleh pasar dengan menjadi buku laris (*best seller*). Buku ini bermaksud menjawab pertanyaan besar: mengapa di era globalisasi seperti sekarang ini masih ada negara yang kaya dan ada negara yang miskin? Apakah

benar penjelasan lama yang menyatakan bahwa keberhasilan negara ditentukan oleh faktor budaya, letak geografis, dan perbedaan iklim?

Penulis secara gamblang menjawabnya “tidak”. Bukan itu sebabnya. Jika benar itu adalah penyebabnya, mengapa banyak negara yang memiliki kesamaan latar belakang budaya dan etnis serta berdekatan secara geografis sehingga berada di dalam iklim yang sama dapat mengalami keberhasilan yang jauh berbeda? Kontras miskin dan kaya secara kasat mata dapat dilihat antara negara Botswana, Afrika, yang dinilai berhasil dalam pembangunan ekonomi, dengan situasi di negara-negara Afrika lainnya, seperti Zimbabwe, Kongo, dan Sierra Leone, yang masih sarat dengan perang saudara dan kelaparan. Perbedaan mereka tampak

secara mencolok dalam prestasi ekonomi, padahal karakteristik manusia, budaya, dan geografi mereka sama. Kontras yang sama ditunjukkan antara Korea Utara yang miskin serta Korea Selatan yang makmur dan sejahtera. Bagaimana keduanya dapat berbeda, padahal berada di semenanjung yang sama, dengan iklim yang sama, serta dihuni penduduk dengan latar belakang etnis dan budaya yang sama?

Jika bukan faktor-faktor tersebut, lalu apa yang menjadi penentunya? Jawabannya adalah sistem ekonomi politik. Negara yang memiliki sistem ekonomi politik yang inklusif akan berpotensi menjadi negara kaya, sedangkan negara yang memiliki sistem ekonomi politik yang ekstraktif tinggal menunggu waktu untuk terseret ke dalam jurang kemiskinan, instabilitas politik, dan gagal sebagai negara. Ada tiga faktor yang membedakan keduanya, yaitu apakah negara tersebut memiliki sistem politik demokratis atau otoriter, apakah memiliki struktur insentif yang dapat diakses oleh semua penduduk atau cenderung bias kepada kepentingan elite, dan apakah negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena mengikuti kemajuan teknologi ataukah tidak? Negara yang inklusif adalah negara yang memiliki sistem politik yang demokratis, tidak bias kepada kepentingan elite, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, negara yang ekstraktif bersifat sebaliknya.

Pertanyaan untuk kita di sini adalah bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia tergolong sebagai negara gagal? Sayangnya, buku tersebut tidak secara eksplisit menyinggung Indonesia. Namun, Jared Diamond dalam tulisannya yang berjudul *How Societies Choose to Fail or Succeed* (2005) mengidentifikasi empat belas negara yang berpotensi gagal dan diprediksi

bakal lenyap dari muka bumi, salah satunya adalah Indonesia. Tiga belas negara lainnya adalah Haiti, Irak, Somalia, Rwanda, Burundi, Madagaskar, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Mongolia, Kepulauan Solomon, dan Filipina. Diamond menyebutkan faktor penghancur yang menjadikan negara-negara tersebut gagal membebaskan diri adalah kekacauan politik dan kerusakan lingkungan hidup.

Masuk akalkah jika Indonesia dikelompokkan ke dalam negara yang berpotensi gagal? Buku Diamond ditulis tahun 2005 dan jika data yang digunakan adalah sebelum 2005, masuk akal untuk mengatakan Indonesia berpotensi gagal. Ketika itu Indonesia telah menjadi negara yang demokratis sehingga kita dapat digolongkan sebagai negara yang inklusif. Akan tetapi, ketika itu juga Indonesia masih belum bebas dari kekacauan politik, seperti konflik sosial yang keras di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Indonesia juga mengalami banyak teror yang menelan banyak korban jiwa. Dari sisi lingkungan, prediksi tersebut masuk akal jika mengingat parahnya perusakan alam atau lingkungan yang berlangsung di Indonesia, baik itu di darat (perusakan hutan karena pertambangan, pembakaran hutan, dan pembalakan liar), laut (perusakan terumbu karang dan habitat laut), maupun udara (kabut asap karena pembakaran hutan dan kontribusinya terhadap pemanasan global).

Akan tetapi, situasi Indonesia sekarang tentu berbeda dengan situasi pada awal dekade 2000-an. Indonesia mengalami situasi yang terus membaik di era 2010-an. Konflik berdarah telah dapat diatasi dan masyarakat di daerah konflik telah kembali damai. Demikian pula dengan saat pilkada lalu. Ada tensi politik yang tinggi saat itu dan masyarakat seolah terbelah ke dalam dua kubu yang bermusuhan, tetapi untungny tidak

berakhir dengan konflik fisik. Situasi politik akan kembali memanas menjelang pemilu dan pilpres 2019, tetapi mudah-mudahan tidak sampai menimbulkan kekacauan politik. Sayangnya, dalam hal lingkungan, Indonesia masih belum cukup berhasil mengatasinya.

Secara keseluruhan, dapat dinilai bahwa situasi kerentanan (*fragility*) Negara Indonesia telah cukup terkendali, paling kurang setelah 10 tahun reformasi. Hal ini tampak dari hasil pembuatan indeks negara gagal yang dibuat oleh *The Fund of Peace*. Lembaga ini menghitung *annual fragile index* (indeks kerentanan tahunan) dari 178 negara berdasarkan 12 indikator tentang tekanan sosial, ekonomi, dan politik terhadap negara, serta menggunakan lebih dari 100 indikator, termasuk pembangunan tidak merata, legitimasi negara, protes kelompok masyarakat dan pengakuan hak asasi manusia.

Pada 2012, yaitu pada pertengahan periode kedua dari pemerintahan SBY, Indonesia berada di urutan ke-63 dari 178 negara. Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara Asean lain, seperti Myanmar, Kamboja, atau Filipina, tetapi masih lebih buruk dibandingkan dengan Singapura, Malaysia atau Thailand. Pada 2017 ini Indonesia berada di peringkat 94, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, bahkan masih lebih baik 2 poin dari tahun sebelumnya (2016). Hal ini berarti suatu kemajuan, tetapi berada di urutan tersebut tidak sama sekali berarti Indonesia telah bebas dari kerentanan. Ada empat derajat kerentanan menurut The Fund of Peace, *sustainable*, *stable*, *warning*, dan *alert*. Indonesia masih di level *warning* (peringatan), masih jauh dari situasi *stable*, apalagi *sustainable*.



## Pedoman untuk Penulis

Populasi adalah jurnal penelitian dan analisis kritis masalah-masalah terkait tema besar kependudukan dan kebijakan. Redaksi menerima naskah artikel hasil penelitian, baik kepastakaan maupun lapangan, dan resensi buku dalam lingkup tema tersebut. Naskah yang diajukan harus orisinal, belum pernah dipublikasikan atau sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan oleh media lain, dan tidak mengandung unsur plagiarisme (dinyatakan dengan pernyataan tertulis).

### Pengiriman Naskah

- *Populasi* menggunakan *Open Journal System* (OJS) dan menganjurkan para penulis melakukan register terlebih dahulu kemudian mengunggah naskah secara *online* di <http://jurnal.ugm.ac.id/populasi>. OJS mempermudah dewan redaksi, editor, *peer review*, dan penulis dapat memantau proses naskah, secara *online*.
- Naskah dalam bentuk MS-Word dikirim via *e-mail* ke [jurnalpopulasi@ugm.ac.id](mailto:jurnalpopulasi@ugm.ac.id) atau [jurnalpopulasi@gmail.com](mailto:jurnalpopulasi@gmail.com).
- Soft file boleh juga diserahkan langsung ke sekretariat Pengelola Populasi, di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Gedung Masri Singarimbun, Lt. 2. Jl. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Tlp. 0274-6491153, 547867.

### Ketentuan Naskah

- Mohon perhatikan instruksi di bawah ini dengan cermat. Penyunting berhak mengembalikan atau menolak naskah yang tidak sesuai dengan butir-butir instruksi di bawah ini.
- Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berformat MS-Word, huruf Times New Roman, 1 spasi, tidak melebihi 7.000 kata.
- Judul dan subjudul: Judul harus spesifik dan efektif sehingga sekali baca dapat ditangkap maksudnya. Judul terdiri sebanyak-banyaknya 14 kata pada naskah berbahasa Indonesia atau 10 kata pada naskah berbahasa Inggris. Subjudul di dalam teks harus singkat dan jelas. Hindari terlalu banyak subjudul dan hindari penggunaan nomor. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai judul dalam bahasa Inggris.
- Penulis: nama (-nama) penulis ditulis di bawah judul tanpa mencantumkan gelar akademik atau jabatan apa pun. Deskripsi singkat tentang penulis, meliputi institusi asal penulis dan *e-mail* korespondensi ditulis di bawah nama penulis.
- Catatan kaki: Gunakan catatan kaki dari pada catatan akhir.
- Abstrak (*abstract*) dan kata kunci (*keywords*): disusun dalam satu paragraf 100-200 kata, yang menjelaskan secara gamblang, utuh, dan lengkap keseluruhan isi tulisan. Intisari berisi ide-ide pokok tentang latar belakang, masalah dan tujuan, kerangka berpikir, metode, pembahasan, dan kesimpulan, serta ditulis dengan

bahasa yang tidak sama dengan bahasa naskah. Abstrak disertai dengan kata kunci yang mencerminkan konsep-konsep paling penting yang dikandung naskah. Kata kunci terdiri sekurang-kurangnya 2 kata dan sebanyak-banyaknya 4 kata. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

- Tabel, grafik, gambar, ditulis dalam ukuran huruf yang sama, atau relatif sama, dengan ukuran huruf pada naskah. Judul tabel atau gambar ditulis dengan lay-out sebagai berikut:

- **Tabel 1 Kepemilikan Aset Berdasarkan Status Ekonomi**

- **Gambar 1** Skema Penyaluran Bansos

- Setiap tabel atau gambar harus menyertakan sumber atau catatan di bawahnya.
- Pendahuluan: menguraikan secara ringkas tentang latar belakang dan formulasi masalah penelitian, tujuan penelitian, serta kajian teoretis yang relevan dan jika memungkinkan, menyebutkan hipotesis.
- Metode: menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk di dalamnya pemaparan tentang desain penelitian, sasaran penelitian, instrumen dan teknik/prosedur pengumpulan data, serta analisis data.
- Pembahasan: menyajikan secara naratif pokok-pokok hasil penelitian dengan didukung sajian tabel, grafik atau diagram, serta menjawab permasalahan penelitian dengan cara menafsirkan temuan dan mengaitkannya dengan struktur pengetahuan yang telah mapan.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Daftar Pustaka: memuat semua kepustakaan yang dirujuk dalam naskah dan tidak memuat kepustakaan yang tidak dirujuk. Yang menjadi pertimbangan kepustakaan adalah sebagai berikut. Derajat kemutakhiran kepustakaan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir. Semakin banyak kepustakaan primer diacu, semakin naskah bermutu.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Resensi buku. Naskah resensi buku harus menyertakan informasi mengenai judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman buku yang dirensi. Isi resensi buku memuat informasi dan pemahaman mengenai apa yang diungkapkan di dalam buku tersebut, serta penilaian dan pertimbangan kepada pembaca akan pentingnya buku tersebut. Naskah resensi buku berkisar antara 1.500-2.000 kata.

## Penulisan Referensi

### Dalam Naskah

- Karya yang dikutip dalam teks menggunakan format: (Gray, 2008: 501).
- Pengutipan dalam kelompok ditulis secara alfabetis menggunakan titik koma sebagai pemisah: (Brown, 2008; Gray & Gani, 1998; Stuart, 2002).
- Gunakan 'et.al.' atau 'dkk' ketika mengutip satu karya yang ditulis oleh lebih dari dua penulis, tetapi tulis semua pengarang di dalam Daftar Pustaka.

- Untuk membedakan karya yang berbeda oleh penulis yang sama dalam tahun yang sama, gunakan huruf a, b, c, dst., seperti Arifin (2002a, 2002b).
- Tidak ada penulisan menggunakan garis bawah atau *underline* baik di dalam naskah, catatan kaki maupun daftar pustaka.

#### Dalam Daftar Pustaka

- Penulisan karya dalam daftar pustaka ditulis dalam urutan alfabetis dan kronologis.
- Buku dengan satu penulis: Singarimbun, Masri. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku dengan lebih dari satu penulis: Baumert, Kevin; Ruchi Bhandari and Nancy Kete. 1999. *What Might a Developing Country Climate Commitment Look Like?* Washington, D.C.: World Resources Institute.
- Penulis berbentuk korporasi atau lembaga: Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. 2006. "Penelitian Peningkatan Efektivitas Program Raskin Melalui Pendampingan Lembaga Perguruan Tinggi". (Laporan akhir). Yogyakarta: Bekerja sama dengan Perum Bulog.
- Artikel majalah atau jurnal: Listyaningsih, Umi dan Eddy Kiswanto. 2008. "Bantuan Langsung Tunai: mengatasi Masalah dengan Masalah". *Populasi*, 19 (1), 13-26.
- Artikel dari surat kabar: Darwin, Muhadjir. 2008. "Strategi dan Pencapaian MDGs". *Kedaulatan Rakyat*, 15 Oktober, hlm. 9.
- Karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain): Asmi, Handria. 2010. "Manajemen Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Agam: Studi Penyaluran Bantuan Korban Gempa Bumi Tanggal 30 September 2008". (Tesis). Yogyakarta: Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Makalah seminar: Milla, Mirra Noor. 2008. "Profil Psikologis Teroris di Indonesia: Dasar Bagi Penerapan Metode Counter-Terrorism". *Makalah Seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 10 September*.
- Artikel dari internet: Abimanyu, Anggito. 2006. "Kebijakan Publik Dalam Praktek". <http://www/paue.ugm.ac.id/seminar/update2007/anggito-1.ppt>, diakses 2 Juni 2008, pukul 10.00 WIB.
- Buku terjemahan: Jellinek, Lea. 1994. *The Wheel of Fortune: the History of a Poor in Jakarta*. Diterjemahkan oleh Eddy Zainuri dengan judul *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES.
- Pustaka tidak diketahui penulisnya: Anonim. 2007. *Kiat Sukses Modal Kepercayaan*. Yogyakarta: Sokolimo Press.

Kepastian naskah yang dimuat akan diberitahukan melalui *e-mail* korespondensi atau pos. Selagi penulis belum memperoleh kepastian tersebut, tidak boleh mengirimkan naskah untuk diterbitkan di tempat lain.



**FORMULIR BERLANGGANAN**

Nama (Instansi/Perorangan) : .....

Alamat : .....

.....

.....

.....

.....

Harap dicatat sebagai pelanggan Jurnal POPULASI, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bersama ini saya kirimkan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri No. 137-00-0624454-1, atas nama YP3K-UGM sebesar

Rp .....

untuk ..... edisi, mulai nomor/bulan .....

dengan harga per eksemplar Rp35.000.

....., ..... 201....

Pelanggan,

.....

